Kata Pengantar :
Prof. Dr. Maghfur Ahmad, M.Ag.

UIN ABDURRAHMAN WAHID:

GUS DUR

Inspirasi & Imajinasi

Penulis:
Muhammad Autad An Nasher, Muhammad Jauhari Sofi, Mukh. Imron Ali Mahmudi, Anindya Aryu Inayati, Bagus Purwo Nugroho, Syamsul Bakhri, Mukoyimah, Ayon Diniyanto, Abdul Mukhlis, Ahmad Khotim Muzakka, Nanang Hasan Susanto, Ahmad Taufiq, Mochammad Najmul Afad, Grita Gusti Gandi, Nur Qomariyah Imzastini, Noorma Fitriana M. Zain, Hendri Hermawan Adinugraha, Khairul Anwar, Teddy Dyatmika, Vika Inayati, Riril Widi Handoko, M. Minanur Rohman, Dewi Anggaeni, Shinta Nurani.

Editor:
Tsalisa Yuliyanti

Penerbit:
Scientist Publishing
UIN Gus Dur
2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

UIN ABDURRAHMAN WAHID:
GUS DUR, INSPIRASI, & IMAJINASI

Muhammad Autad An Nasher, Muhammad Jauhari Sofi, Mukh. Imron Ali Mahmudi, Anindya Aryu Inayati, Bagus Purwo Nugroho, Syamsul Bakhri, Mukoyimah, Ayon Diniyanto, Abdul Mukhlis, Ahmad Khotim Muzakka, Nanang Hasan Susanto, Ahmad Taufiq, Mochammad Najmul Afad, Grita Gusti Gandi, Nur Qomariyah Imzastini, Noorma Fitriana M. Zain, Hendri Hermawan Adinugraha, Khairul Anwar, Teddy Dyatmika, Vika Inayati, Riril Widi Handoko, M. Minanur Rohman, Dewi Anggaeni, Shinta Nurani.

Penerbit:
Scientist Publishing
2022

Judul:
UIN Abdurrahman Wahid: Gus Dur, Inspirasi, & Imajinasi

Penulis:
Muhammad Autad An Nasher, Muhammad Jauhari Sofi, Mukh. Imron Ali Mahmudi, Anindya Aryu Inayati, Bagus Purwo Nugroho, Syamsul Bakhri, Mukoyimah, Ayon Diniyanto, Abdul Mukhlis, Ahmad Khotim Muzakka, Nanang Hasan Susanto, Ahmad Taufiq, Mochammad Najmul Afad, Grita Gusti Gandi, Nur Qomariyah Imzastini, Noorma Fitriana M. Zain, Hendri Hermawan Adinugraha, Khairul Anwar, Teddy Dyatmika, Vika Inayati, Riril Widi Handoko, M. Minanur Rohman, Dewi Anggaeni, Shinta Nurani.

Editor:
Tsalisa Yuliyanti

Tata letak:
Muhamad Rifa'i Subhi

Desain Sampul:
Ahmad Furqon

Penerbit:
Scientist Publishing
Jl. Kusuma Bangsa No.9 Kota Pekalongan 51141

Cetakan I, Agustus 2022.
Pekalongan, Scientist Publishing, 2022.
xii + 136 halaman; 17,6 x 25 cm
ISBN: **978-623-88227-0-6**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dicetak oleh: **Percetakan Nusantara.**

PENGANTAR

GUS DUR, MENJULANG DI LANGIT AKADEMIK

Prof. Dr. Maghfur Ahmad, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Perihal nama K.H. Abdurrahman Wahid itu tidak main-main. Nama, memang tidak layak dibuat mainan. Orang tua kita, orang-orang Jawa, termasuk dalam diskursus Islam menganjurkan memberi nama yang baik, keren, dan membanggakan. Bukan sekedar sebagai identitas atau pembeda. Terselip doa, inspirasi, harapan, dan imajinasi-imajinasi masa dapan di balik sebuah nama. Dengan nama besar Gus Dur, "ada spirit, pesan, dan nilai-nilai yang harus diperjuangkan oleh UIN Pekalongan," pesan bu Nyai Shinta Wahid. Dua kali penulis sowan, 28/12/2022 dan 02/08/2022.

Jargon apa arti sebuah nama, "*What's in a name*"? yang dipopulerkan William Shakespeare tidak berlaku. "Mawar tetap saja indah, meskipun tidak diberi nama *rose,"* kata sastrawan Inggris ini bisa menyesatkan. Penulis *The Tempest itu, menarasikan bahwa nama dianggap sesuatu yang tidak penting*. Bagi saya, sebaliknya. Nama sungguh urgen, pokok, dan prinsip. Shakespeare rupanya lupa, bahwa dimana-mana mawar itu berduri. Indah tetapi berpotensi melukai. Bermata dua, mempesona dan sekaligus membahaya. Bagi orang-orang pesimis, sirik dan suka nyinyir lebih senang melihat "duri"-nya. Sebaliknya, pribadi-pribadi yang terbuka dan optimis selalu memandang sisi indah sebuah mawar. Begitu pun respons khalayak dalam membaca nama UIN yang berbasis di pesisir utara ini. Gus Dur, seperti mawar. Indah dan menjadi magnet, tetapi juga ada yang gelisah sebab 'berduri'. Sebagian kita menilai ada

“duri” sektarian, kultus pribadi dan juga dianggap menyebarkan semangat primordialisme. Tentu, sinyal ini menjadi pengingat bagi pengelola kampus.

Baiklah, terkait nama UIN ini, kita tidak pernah bisa mengendalikan pikiran orang lain. Boleh-boleh saja dan hak setiap insan merespons setiap persoalan. Nama UIN K.H. Abdurrahman Wahid sudah final dan resmi, merujuk pada Perpres Nomor 86 Tahun 2022. Muncul pertanyaan, gugatan, dan kekecewaan, tetapi secara umum ada gelombang besar harapan-harapan. Nama adalah hasil pilihan, kebijakan, dan memiliki akar historis yang kuat pada tokoh-tokoh “Nahdliyin” pendiri kampus “Bumiayu,” yang kini menjadi UIN. Dari masyarakat untuk Negeri. Dari komunitas eksklusif menjadi milik negara yang menganut prinsip setara. Kembali ke nama. Memilih adalah menyisakan. Ada yang terakomodasi, tentu banyak pihak yang sekedar jadi lampiran dan catatan pinggir. Tentunya tidak bermaksud menafikan, menegasikan, maupun menyingkirkan peran dan kontribusi sosok lain. Di sini, berlaku hukum, bahwa sebuah pilihan “tidak pernah bisa memuaskan semua penghuni dunia.” Pekerjaan rumah kita, tentunya meneladani spirit juang Gus Dur di bidang akademik. Ilmu pengetahuan untuk perubahan sosial, demi dan atas nama kemanusiaan.

Sejak pertengahan tahun 2021, lembar-lembar naskah ide, pemikiran, dan gerakan “sang penakluk” telah kita bentang dalam berbagai forum ilmiah. Dari FGD, zoominar, hingga berseminar ria. Dari Prof Nurkholis Setiawan, Prof. Anas Saidi, Kang Sastro, Kang Suedy, hingga Gus Ulil Abshar Abdalla. Dari titik pijak paradigmatik sampai arah dan visi keilmuan UIN. “Gus Dur” adalah lautan kitab. Samudra wacana. Jejak-jejak akademik K.H. Abdurrahman Wahid telah menghiasi ruang angkasa intelektualisme. Reputasi dan ketokohannya membumbung dalam singgasana para ilmuwan. Kampus, lembaga, dan komunitas, baik dalam maupun manca negara telah mentahbiskan K.H. Abdurrahman Wahid dengan berbagai anugerah. Melalui nama Abdurrahman Wahid, UIN Pekalongan sudah selayaknya berkomitmen meneladani, dan lahir

batin siap menjadi kampus unggul, seperti harumnya sosok Presiden RI ke-4 dalam pentas kampus dunia. Gus Dur dan ide-idenya telah mengglobal dan meng-internasional.

Berangkat dari dan meniti secara tekun tradisi intelektualisme pesantren, Gus Dur menjadi sosok ilmuwan sosial yang gigih dan mengagumkan. Agamawan yang menyinari umat. Leader yang bertanggung jawab atas persoalan rakyatnya. Berderet-deret penghargaan menjadi bukti atas reputasinya yang tak terbantahkan. Ramon Magsaysay Award Foundation, pada tahun 1990 mengakui kehebatan Kiai asal Jombang dalam bidang *Community Leadership*. Hadiah ini diberikan untuk mengenang Mantan Presiden Philipina, Ramon Magsaysay. Keteladanan, integritas, kegigihan dalam melayani, idealisme pragmatis dalam pemerintah demokratis. Gus Dur unggul di atas tokoh-tokoh dunia dalam mengelola dan menggerakkan masyarakat, dengan basis pengetahuan dan pengalaman. Pengakuan dunia kampus atas kepemimpinan Gus Dur juga diberikan oleh Columbia University, New York. Universitas kenamaan ini, mengakui *leadership* cucu pendiri Nahdlatul Ulama, dengan menyematkan "*The Global Leadership Award*." (2009).

Pada tahun 1991, pemerintah Mesir memberi anugerah kepada Gus Dur dalam bidang dakwah dan penyebaran, dan pemberdayaan Islam. "*Islamic Missionary Award from the Government of Egypt*" disematkan pada pundak sang Kiai. Penghargaan ini merupakan peneguhan atas perolehan di tahun sebelumnya (1990), Majalah Editor memberi gelar kepada Wahid sebagai Penggerak Islam. Meskipun Abdurrahman Wahid unggul sebagai penggerak Islam, dalam dirinya juga memiliki pemikiran, penjiwaan, dan pembelaan terhadap kaum minoritas. Konsistensi dalam membela kaum minoritas inilah yang mengantarkan beliau mendapat anugerah dari Mebal Valor di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 2009. Gus Dur tanpa kenal lelah berjuang dan membela hak-hak dasar kaum Konghucu di Indonesia. Pada tahun ini (2009) mendapat pengakuan dari Simon Wieshenthal Center, New York. Sebuah lembaga

yang konsen terhadap penegakan HAM dan toleransi antar umat beragama. Penghargaan-penghargaan itu adalah salah satu wujud dari keberpihan ayahanda Alissa Wahid terhadap kaum marginal. Berpihak, mulai dari kata hati, pikiran, ungkapan, sikap hingga perbuatan.

Pengakuan atas kepakaran, keahlian, dan reputasi Gus Dur sebagai pakar dan intelektual bisa dilihat dari deretan Doctor Honoris Causa. Tahun 2000, Gus Dur memperoleh Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand. Di tahun ini juga beliau mendapat Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. Tahun 2000 Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Tak ketinggalan, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand menyematkan Doktor Kehormatan dan juga dari Universitas Jawaharlal Nehru, India. Sebelumnya, pada tahun 1998 mendapatkan Honorary Degree in Public Administration and Policy Issues dari Universitas Twente, Belanda,

Berikutnya, tidak mau ketinggalan, pada tahun 2002, Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang memberi Doktor Kehormatan. Tahun 2003 Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel; Di tahun ini pula, memperoleh anugerah Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan, serta Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003). Terkini, Tahun 2021, dari ITS, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, memberi penghargaan Doktor Kehormatan. Dr HC KH Abdurrahman Wahid berjasa dalam perkembangan fakultas teknologi elektro dan informatika cerdas (FTEIC). Penghargaan ini diterima langsung oleh putri ketiga Gus Dur, Anita Hayatunnufus Wahid. Dalam sambutannya, Anita merasa senang, ada kampus berorientasi teknologi dengan moto *Advancing Humanity*, memajukan kemanusiaan. "Teknologi digital tidak boleh dibiarkan berkembang secara liar, yang dapat menghancurkan sisi kemanusiaan," paparnya.

Reputasi Gus Dur yang gemilang dan membanggakan tentu menjadi modal sosial dan keteladanan. Keteladan lebih nyaring dari pada khutbah bertalu-talu, *lisan al-hal afshah min lisan al-maqal*. Kampus kita, masih berada di "zona" negara berkembang. Secara mental, finansial, sumber daya, infrastrukur, dan kultur berada di "blok selatan." Wajar jika membutuhkan keberkahan-keberkahan dan inspirasi-inspirasi. Butuh studi tiru, studi banding, anjang sana, anjang sini, atau yang kini populer dan agak kekinian yaitu, *benchmarking*. Perlu membuka diri layaknya karakter orang-orang pesisir, yang inklusif. Namun kita juga perlu sadar diri. Membandingkan kampus kita dengan kampus-kampus Internasional manca negara, atau dengan kampus seperti UGM, UI, atau dengan UIN senior, sungguh butuh kearifan. Lha dengan nama "K.H. Abdurrahman Wahid" tentu ada keberkahan paradigmatik, epistemologis, dan aksiologis. Gur Dur sudah jaminan internasional. Persoalannya adalah, bagaimana langkah-langkah strategis kita mengikuti jejak-jejak keilmuan dan reputasi internasional.

Menapaki manuskrip pemikiran Gus Dur, basis keilmuan yang dikembangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid adalah mentautkan rasionalitas dan spiritualitas. Ancangan ini selaras dengan visi keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Pekalongan yang berusaha mengharmonisasikan kekuatan akal, indera dan intuisi, agama dan sains, serta tradisionalisme dan modernism. Beliau menempatkan Islam sebagai inspirasi. Sukses mendialogkan Islam dan negara dalam bingkai keindonesiaan yang beragam. Secara aksiologis, Gus Dur melakukan hilirisasi ilmu secara paripurna. Bercondong kepada pihak-pihak yang tertindas, kaum minoritas dan marginal. Berharap dari keberkahan, *luberan*, inspirasi, dan warisan etos keilmuan Gus Dur, UIN Pekalongan berikhtiar menjadi pusat produksi ilmu pengetahuan yang berpihak. Keilmuan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Jangan puas sukses bertansformasi menjadi UIN secara administratif. Tetaplah bergerak kawan, kalau engkau tidak ingin membeku dan membatu. Kata teman-teman Makassar, "*Sekali layar terkembang, pantang*

biduk surut ke pantai," K.H. Abdurrahman Wahid sudah menjadi nama kampus kita, pantang rasanya mengkhianati etos keilmuan dan perjuangannya. Gus Dur telah menjulang di menara gading keilmuan, mengakar di bumi kemanusiaan. Kini giliran UIN Pekalongan mengepakkan sayap-sayap visi-misinya, menghujamkan akar "khidmah" keummatanya. Sambil tersenyum, ku-bisiki isteri mudaku satu-satunya, "*sekali jangkar hatiku berlabuh, pantang kapal bertaut ke lain hati*." Malam itu, 16 tahun pernikahanku, sungguh "*dunia milik kita berdua, aku dan kau*." *Wassalam*.

Pekalongan, Agustus 2022

Prof. Dr. Maghfur Ahmad, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Kata Pengantar Penulis

Memasuki usia yang ke 54, IAIN Pekalongan berjuang melakukan transformasi kelembagaan menuju UIN Pekalongan. Perjuangan ini meniscayakan semua elemen dan sumber daya yang kita miliki harus bergerak secara kontributif, kolaboratif dan sinergis untuk menyukseskan alih status tersebut.

Transformasi kelembagaan memang tidak mudah, namun harus terus diupayakan. Secara administrasi, PMA Nomor 20 Tahun 2020 sudah bisa terpenuhi. Namun demikian, ada cacatan-catatan krusial terkait pengembangan sumber daya manusia dan tentunya masalah visi keilmuan yang ingin dikembangkan oleh kampus. Alih status, bukan sekedar perubahan nama Institut menjadi Universitas, tidak sekedar memiliki mandat yang lebih luas, bergerak dari *tafaqquh fiddin,* menuju *Islamic studies, religion studies* atau *natural sciences studies.* Di balik itu, ada kebutuhan fundamental yang perlu dilakukan, yaitu membangun kembali paradigma, visi dan arah keilmuan UIN Abdurrahman Wahid.

Bangunan keilmuan UIN Pekalongan menjadi landasan dan energi bagi pihak-pihak kampus dan mitra untuk berproses bersama, saling bahu membahu dalam melahirkan lulusan yang berdaya saing. Menuju UIN Abdurrahman Wahid tidak cukup modal sumber daya manusia, finansial dan infrastruktur saja, UIN Pekalongan membutuhkan rancang bangun keilmuan.

Alhamdulillah, telah terbit buku berjudul "UIN Abdurrahman Wahid: Gus Dur, Inspirasi, & Imajinasi". Buku ini menyemarakkan transformasi kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan menjadi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, para penulis, mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikan yang telah mendukung proses pembuatan buku ini. Kami juga menyadari dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun kami butuhkan.

Pekalongan, Agustus 2022

Penulis

Daftar Isi

Pengantar Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan iii
Kata Pengantar..... ix
Daftar Isi xi

Menjaga Warisan Gus Dur: Harapan pada UIN Abdurrahman Wahid; Muhammad Autad An Nasher 1

Gus Dur dan Dinamisasi Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi; Muhammad Jauhari Sofi 7

Gus Dur adalah *Password;* Mukh. Imron Ali Mahmudi 13

Abdurrahman Wahid: Antara Pluralitas dan Pluralisme Agama; Anindya Aryu Inayati 19

Ber-*Tabarruk*-an dengan Nama Abdurrahman Wahid (Sebuah revolusi dan refleksi pergantian IAIN Pekalongan menjadi UIN Abdurrahman Wahid); Bagus Purwo Nugroho 23

Otonomi Teori Keindonesiaan: Diskursus Pengembangan Ilmu UIN Pekalongan dan Solusi Permasalahan di Indonesia; Syamsul Bakhri.....27

Gus Dur dan Pembangunan Budi Luhur Manusia; Mukoyimah 33

Gus Dur: Nilai dan Pendekatan; Ayon Diniyanto 37

Gus Dur, Humor Kritis, dan Kiprah Kemanusiaan; Abdul Mukhlis.....43

Gus Dur, Salafisme, dan Dilema Ortodoksi Beragama; Ahmad Khotim Muzakka 47

Membedah Visi Keilmuan UIN Abdurrahman Wahid: Kemanusiaan, Keindonesiaan, Keislaman; Nanang Hasan Susanto 51

Sang Toleran itu Bernama Abdurrahman Ad Dakhil; Ahmad Taufiq 57

Merdeka Belajar *ala* Gus Dur; Mochammad Najmul Afad 61

Berdialog *ala* Gus Dur; Grita Gusti Gandi 67

Dari Toleransi Lintas Agama Gus Dur Sampai Moderasi Beragama; Nur Qomariyah Imzastini.....71

Membumikan Semangat Gus Dur di UIN Abdurrahman Wahid; Noorma Fitriana M. Zain 75

Mengungkap Pemikiran Substantif-Inklusif Gusdur dalam Buku "Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia"; Hendri Hermawan Adinugraha 83

UIN Abdurrahman Wahid sebagai Kampus yang Ramah Disabilitas; Khairul Anwar.....91

***Rebranding* Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid melalui Akreditasi Unggul;** Teddy Dyatmika.....97

Transformasi Budaya Kampus; Vika Inayati 103

Road To UIN Abrurrahman Wahid; Riril Widi Handoko.....109

Teologi Kosmopolitan Gus Dur: Sebuah Tinjauan Filosofis; M. Minanur Rohman.....115

Sembilan Nilai Utama Gus Dur Sebagai Bangunan Keilmuan UIN Abdurrahman Wahid; Dewi Anggaeni.....123

Transmisi Nilai Humanis Gus Dur sebagai Spirit Paradigma Integrasi Triadik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan; Shinta Nurani.....133

MENJAGA WARISAN GUS DUR: HARAPAN PADA UIN ABDURRAHMAN WAHID

Muhammad Autad An Nasher
Redaktur Pelaksana Alif.id

Kurang lebih selama 3 tahun (2016-2019) penulis bekerja di Seknas Jaringan GUSDURian Indonesia. Dari satu rapat ke rapat lainnya, kami selalu membincangkan warisan (*legacy*)—nilai, pemikiran, dan perjuangan—yang telah ditinggalkan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pembagian tugas oleh putri-putrinya, sahabat, serta muridnya. Mereka berkolaborasi satu sama lain untuk *nyengkuyung* warisan yang telah ditinggalkannya.

Ya, Gus Dur tidak meninggalkan warisan dalam bentuk fisik (uang triliunan, tanah berhektare-hektare), bahkan dompet saja beliau tidak punya. Tahun 2009, dalam tulisan Alissa Wahid (*Bapakku Bukan Perekayasa Konflik: 2014*), Gus Dur sempat meminjam uang lima juta kepada Alissa, hingga Alissa menelepon Yenny dan meneteskan air mata. Sekelas Presiden ke-4, lho! Uang lima juta saja tidak punya.

Padahal, Gus Dur bisa saja memilih untuk memanfaatkan jabatannya pada waktu itu sebagai RI 1, misalnya *berkongkalikong* dengan politikus untuk mengekalkan posisinya sampai rampung. Bila perlu *nyalon* lagi (hingga 2 periode) kalau belum puas. Beliau tentu boleh memilih untuk *deal-dealan* dengan para investor, pengusaha, atau makelar proyek untuk mendapatkan aset-aset yang mengayakan diri dan keluarganya. Namun, Gus Dur tidak untuk itu. Beliau lebih memilih

untuk berpegang pada prinsip; nilai, keyakinan, dan hati nurani. Jalan lain yang tidak banyak dipilih oleh pemimpin kebanyakan saat ini.

Internalisasi Nilai dan Keteladanan Gus Dur

Mengingat IAIN Pekalongan yang saat ini akan beralih status menjadi UIN Abdurrahman Wahid (baca: Universitas Gus Dur), penulis membayangkan ihwal bangunan keilmuan dan pondasi pemikiran yang dirancang tentu mewarisi dari apa yang selama ini almarhum teladankan; nilai dan garis perjuangan. Karena berubah status tidak hanya sekadar nama.

Jaringan GUSDURian dikenal dengan sembilan (9) nilai utama Gus Dur. Sembilan (9) nilai ini menjadi pedoman (*guidance*) para penggerak komunitas GUSDURian. Terhadap situasi apapun, bergerak dengan cara bagaimanapun, dan menyikapi isu apapun, prinsipnya ada pada sembilan (9) nilai ini. Sembilan (9) nilai utama Gus Dur inilah yang menjadi bangunan atau fondasi yang harus dimiliki para penggerak komunitas.

(Nilai-nilai utama Gus Dur) di antaranya: Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, Kesederhanaan, Kekesatriaan, dan Kearifan lokal/tradisi (*GUSDURian.net/26-01-22*). Bayangan saya, UIN KH Abdurrahman Wahid dalam bergerak, bangunan/fondasi keilmuannya (baik oleh para staff maupun/dan mahasiswanya) berprinsip pada sembilan (9) nilai tadi/tersebut.

Sembilan (9) nilai di atas telah dirumuskan oleh para sahabat dan murid dari Gus Dur dalam simposium "Kristalisasi Prinsip Pemikiran Gus Dur". Ada Gus Mus (KH. A. Mustofa Bisri), Mahfud MD, Djohan Effendi, Muslim Abdurrahman, Greg Barton, Romo Benny, Franz Magnis Suseno, Imam Aziz, dan lain-lain.

Dalam tradisi pesantren, dikenal dengan istilah *sanad*. Jadi, secara keilmuan para perumus di atas adalah orang-orang yang mempunyai *sanad* keilmuan yang *qualified* atau berkualitas. Jika dilihat dari jalur

periwayatan dalam istilah hadis, mereka pernah bersinggungan langsung dengan almarhum. Tidak hanya membaca buku tentang Gus Dur, tetapi juga mengalami dan berjumpa secara fisik dengannya. Oleh sebab itu, harapan saya UIN KH Abdurrahman Wahid menjadi kampus yang menginternalisasi nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan olehnya.

Sependek yang saya tahu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki jargon integrasi-interkoneksi. Dalam segala bidang keilmuan—apapun itu—dihubungkan dengan cabang keilmuan lain yang dalam gagasan Amin Abdullah (2007), epistemologi UIN Suka seperti jejaring laba-laba. Sumber keilmuan dari al-Qur'an dan hadis, tetapi pendekatan dan metode yang digunakan bisa dengan berbagai macam cabang keilmuan seperti ilmu kalam, filsafat, tasawuf, tafsir, dan lain-lain. Antara *hadarah nash*, *falsafah*, dan *al-ilm*, terhubung-terkait.

Tidak heran jika UIN Suka dikenal maju dalam humanisasi ilmu keislamannya. Sementara UIN Walisongo Semarang mempunyai jargon *Unity of Sciences* (*Wahdal al-Ulum*), yang ditopang dengan lima prinsip: integrasi, kolaborasi, dialektika, prospektif, dan pluralistik. *Dus*, semua bangunan/fondasi tersebut tentunya akan berpengaruh dalam sisi kinerja, riset, dan transfer keilmuan dari masing-masing pengajar.

Nah, dalam pandangan penulis, UGD dapat menjadi pusat laboratorium yang menerjemahkan gagasan dan pemikiran Gus Dur di segala bidang; agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bayangan saya, *output* dari mahasiswa lulusan UDG selain mempunyai cara pandang yang kosmopolit, juga mampu menginternalisasi nilai-nilai dan pemikiran dari KH. Abdurrahman Wahid. Bekerja di mana pun, ia selalu berprinsip seperti apa yang diajarkan oleh Gus Dur.

Kita semua tahu, dunia pendidikan kita saat ini diterpa dengan sederet kasus seperti pelecehan seksual, korupsi, dan nirkemanusiaan. Tiga perilaku yang sejatinya tidak ada di dalam kamus seorang pengajar atau orang yang berilmu. Bagaimana bisa, seorang dosen melakukan tindakan yang tidak sepatutnya kepada mahasiswinya. Bagaimana

mungkin seorang pejabat di tengah pandemi melakukan korupsi miliaran rupiah dana bansos. Bagaimana mungkin seorang Bupati melakukan perbudakan modern. Bukankah moralitas menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan saat ini dan kedepannya?

Nah, dari fenomena di atas, seluruh civitas academica kembali diingatkan tentang pentingnya penanaman nilai utama (*core value*) dan akhlak (moralitas/keteladanan). Salah satu contoh yakni tentang nilai ketauhidan. Ketauhidan yang diajarkan dan dipahami oleh Gus Dur adalah ketauhidan—walaupun sama-sama ber-*Laa ilaaha illallah*—berbeda dengan ketauhidan yang dipahami kalangan ekstrimis ISIS, misalnya. Ketauhidan Gus Dur itu tidak melukai atau merugikan orang lain. Justru, ketauhidan Gus Dur adalah memanusiakan sesama, menghargai dan mengayomi.

Kalau digambarkan, gelombang pergerakan (nilai dan perjuangan) Gus Dur itu bagaikan riak air. Alissa Wahid dalam Kelas Pemikiran Gus Dur pernah mengilustrasikan disaat kita sedang melempar kerikil di tengah sungai, lalu yang muncul adalah gelombang—dari riak kecil ke riak yang besar. Nah, gelombang pergerakan Gus Dur yang pertama (baca: utama) adalah basisnya ada pada *spirituality* (tauhid/teologi), lalu dari ketauhidan bergerak pada kultur (NU, pesantren, dan keindonesiaan), lalu bergerak sebagai seorang negarawan (Presiden), dan dari semua itu, kerja-kerja yang dilakukan oleh Gus Dur selalu bermuara pada kemanusiaan. Wajar jika garis perjuangan Gus Dur selama hidupnya, bila *ditrack* (pembelaannya terhadap apapun), selalu muaranya ada pada kemanusiaan.

KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), saat haul Gus Dur di Ciganjur tahun 2010 pernah menyatakan "mengapa makam Gus Dur saat ini dipenuhi oleh lautan manusia?, karena Gus Dur mencintai manusia dan memanusiakan manusia". Bahkan dalam wasiatnya beliau berpesan supaya di atas makamnya ditulis "Di sini Berbaring Seorang Pejuang Kemanusiaan". Harapannya itu kini terwujud.

Kampus Inklusif

Gus Dur memiliki sejarah panjang dalam proses pendidikannya. Dari pesantren, lalu melalang buana ke Timur Tengah dan Eropa. Beliau merasakan perjumpaan terhadap segala keilmuan dan keanekaragaman budaya. *Local wisdom*-nya yang kuat, tetapi tidak membatasi dirinya dengan menerima segala jenis pemikiran, golongan, ilmu, budaya yang beranekaragam—itulah bayangan saya terhadap para mahasiswa UGD. Menjaga integritas, bersikap egaliter terhadap siapapun, berwawasan terbuka, namun tetap berpijak pada tradisi dan jati diri bangsa.

Bayangan saya, kampus UGD juga terbuka kepada siapapun, tidak hanya diisi oleh mahasiswa muslim *an sich*, tetapi juga diwarnai dan terbuka kepada seluruh golongan, agama, dan lintas gender. Tidak hanya mahasiswanya, tetapi juga staf-stafnya. Menjadi kampus terbuka (*open mind, will, heart*) dan bisa menjadi pangkalan buat siapapun, menjadi tempat yang nyaman bagi semua golongan.

Oleh sebab itu, basis keilmuan atau jargon UGD adalah kampus inklusif, humanis, dan kosmopolit. Kerja-kerja yang dilakukannya seperti menanam benih/*chip* dari keteladanan Gus Dur, dan *goal*-nya adalah mampu mencetak generasi yang manfaat-*maslahat*. Berpijak pada Iman (tauhid), Islam (syari'at), dan Ihsan (akhlak/tasawuf), ketiganya ini dihubungkan dengan berbagai cara pandang dari Gus Dur. Kalau Gus Yahya punya jargon "Menghidupkan Gus Dur", sementara UGD punya jargon "Mengekalkan Nilai-nilai Gus Dur".

Kerja-kerja yang dilakukan oleh Gus Dur yang bisa kita nikmati hari ini tidaklah sebentar, tetapi butuh kesabaran dan keberanian yang kuat. Capaian itu tidak hanya dinikmati hanya lima tahun sekali (jangka pendek), tetapi untuk generasi selanjutnya. Bahkan sampai sekarang dan nanti. Mewujudkan generasi emas untuk masa depan negeri dengan meng-*copy paste* keteladanan Gus Dur adalah pilihan yang tepat. Saya membayangkan Gus Dur tersenyum bahagia di alam sana, karena warisan perjuangannya kembali dilanjutkan generasi setelahnya. Gus

Dur sudah meneladani, saatnya kampus UIN Abdurrahman Wahid melanjutkan.

GUS DUR DAN DINAMISASI PEMIKIRAN ISLAM DI PERGURUAN TINGGI

Muhammad Jauhari Sofi
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

KH. Abdurrahman Wahid (selanjutnya disebut Gus Dur) adalah sosok yang kompleks. Gus Dur lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren. Kakeknya adalah seorang pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi sosial-keagamaan terbesar di Asia. Ayahnya adalah salah seorang *founding father* di Republik Indonesia dan sekaligus menjabat sebagai menteri agama pertama. Silsilah Gus Dur terhubung hingga ke raja-raja Jawa di masa lalu. Masa remajanya banyak dihabiskan di lingkungan pesantren guna mempelajari literatur klasik keislaman. Di banyak ceramahnya, Gus Dur sering kedapatan menyitir pandangan para ulama klasik dan syair-syair dari kitab kuning, sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang pesantren.

Meski tumbuh di lingkungan pesantren, bacaan Gus Dur remaja tidak terbatas hanya pada literatur klasik keislaman. Ia juga melahap buku sastra, filsafat, logika, pemikiran, dan teori sosial. Gairah Gus Dur akan ilmu pengetahuan ditunjukkannya dengan melakukan *rihlah* intelektual ke Mesir, Iraq, Eropa, hingga Kanada. Di negara-negara tersebut, ia dikabarkan banyak menghabiskan waktu di perpustakaan dan mengunjungi pusat-pusat ilmu pengetahuan. Tak heran, Gus Dur menjadi sosok yang sangat dihormati di kalangan cendekiawan muslim Indonesia, utamanya di lingkungan NU. Dengan kekayaan wawasan

yang dimiliki, Gus Dur seringkali menawarkan cara pandang alternatif dan melampaui zamannya.

Tulisan ini ingin sedikit memotret gagasan Gus Dur tentang dinamisasi pemikiran Islam dan relevansinya terhadap pengembangan keilmuan di perguruan tinggi. Sebagaimana diketahui, Gus Dur adalah pionir dalam pembaharuan (*tajdid*) pemikiran Islam di tanah air, khususnya di tubuh NU sebagai organisasi Muslim tradisional. Ia mampu menggabungkan dua tradisi pemikiran sekaligus, yaitu tradisi Timur sebagai buah dari interaksinya dengan dunia pesantren dan tradisi Barat sebagai buah dari persinggungannya dengan ilmu pengetahuan modern model Eropa. Dengan dua tradisi pemikiran tersebut, Gus Dur hadir dengan gagasan-gagasan yang segar dan mengejutkan. Gagasan itu dipegangnya secara konsisten sebagai prinsip dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Dinamisasi pemikiran Islam adalah suatu upaya menginterpretasikan kembali doktrin-doktrin keislaman sedemikian rupa sehingga mereka secara lebih dinamis dapat merespon persoalan kontemporer umat Islam. Gagasan ini, misalnya, tampak dari maraknya kontekstualisasi kitab kuning di kalangan Muslim tradisional, terutama sejak Gus Dur menahkodai NU dari tahun 1984 hingga 1999. Pembacaan secara kontekstual atas warisan intelektual Islam masa silam ini mampu mengantarkan generasi muda NU ke sebuah gerbang moralitas baru, yaitu kemerdekaan berijtihad. Banyak generasi muda NU yang belakangan sangat fasih berbicara isu-isu modern, seperti demokrasi, pluralisme (penerimaan atas kemajemukan), keadilan gender, dan sebagainya, dari perspektif Islam. Agenda kontekstualisasi kitab kuning ini senafas dengan ajaran Islam yang diyakini *shôlih li-kulli zamân wa al-makân* (relevan di setiap waktu dan tempat).

Dinamisasi pemikiran Islam juga terlihat dari wacana *pribumisasi* Islam yang dicetuskan oleh Gus Dur. Dengan *pribumisasi*, umat Islam di Indonesia diharapkan tetap menghargai budaya dan kearifan lokal. Kehadiran Islam di bumi Indonesia tidak dimaksudkan untuk memusuhi

nilai-nilai lokal dengan dalih *bid'ah*, tetapi untuk berselaras dan saling melengkapi. Islam datang untuk mewarnai keragaman budaya lokal. Dengan demikian, *pribumisasi* Islam ini bertolak belakang dengan proyek *arabisasi* yang dikampanyekan oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Menurut Gus Dur, Islam tidak perlu diidentikkan dengan budaya Arab. Sejauh tidak menyangkut keimanan dan ritual formal, umat Muslim di Indonesia tidak perlu mengikuti produk budaya yang khas bagi bangsa Arab, seperti berjubah, bercadar, berjenggot, dan berbahasa Arab dalam keseharian.

Belajar dari Gus Dur

Semangat melakukan dinamisasi pemikiran Islam sebagaimana dicontohkan oleh Gus Dur sangat relevan dihadirkan di dunia perguruan tinggi. Dinamisasi pada intinya adalah proses beradaptasi di tengah arus perubahan zaman dalam rangka memperoleh hal-hal terbaik untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, pengembangan kajian keislaman di perguruan tinggi perlu menimbang aspek kontekstualitas dan membumi. Kontekstual artinya, ilmu keislaman yang diajarkan dan dikembangkan semestinya tidak terlalu dogmatis. Dogmatisme hanya akan melanggengkan budaya *taklid* dan berlawanan dengan semangat ilmu pengetahuan itu sendiri. Membumi artinya, ilmu keislaman di perguruan tinggi perlu mengakomodir kearifan lokal sebagaimana telah dimandatkan dalam kaidah ushul fiqh *al-'âdah muhakkamah* (kebiasaan hidup suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum).

Lebih lanjut, dinamisasi pemikiran Islam di perguruan tinggi mensyaratkan pendekatan keilmuan yang multiperspektif. Multiperspektifitas akan meluaskan pandangan seseorang dalam menyikapi suatu persoalan dan memungkinkannya melihat lebih banyak alternatif atau jalan keluar. Selain itu, kita juga perlu menghidupkan nalar kritis dan skeptis (meragui), yaitu sikap tidak menerima begitu saja pernyataan orang lain. Seseorang yang telah dididik di perguruan tinggi sebaiknya selalu memeriksa dan memeriksa kembali pernyataan tertentu

sebelum menerimanya sebagai suatu informasi yang akurat. Semangat mendialogkan ilmu-ilmu agama dengan sains (ilmu alam dan ilmu sosial) juga perlu semarakkan. Baik ilmu agama dan sains harus diarahkan untuk kemaslahatan manusia dan kemanusiaan.

Menarik untuk diingat bahwa pengembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) selama beberapa dekade terakhir dimulai dan didominasi oleh pembukaan jurusan *tadris* yang mengajarkan mata pelajaran umum seperti fisika, kimia, matematika, bahasa, dan ilmu-ilmu sosial modern. Meski kebijakan ini adalah mandat dari kementerian, ilmu-ilmu agama dan sains di PTIN perlu diharmonisasikan. Hal ini karena ilmu agama (*faith*) memiliki karakteristik yang berbeda dari sains (*fact*). Yang berbeda ini tidak mungkin disatukan. Penyatuan antara ilmu agama dan sains adalah konsep yang semu dan cenderung palsu. Namun demikian, keduanya masih bisa didialogkan untuk mendatangkan lebih banyak kemanfaatan. *Sains tanpa ilmu agama adalah buta; ilmu agama tanpa sains adalah lumpuh*. Demikian bunyi aforisme yang dipopulerkan oleh Albert Einstein.

Dalam konteks IAIN Pekalongan, rencana perubahan bentuk lembaga menjadi UIN Pekalongan perlu menilik gagasan dinamisasi pemikiran Islam. Memang, secara umum agenda perubahan bentuk lembaga ini adalah untuk turut menyukseskan tujuan pendidikan Nasional di level perguruan tinggi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan keterampilan hidup, serta meningkatkan mutu kehidupan manusia. Namun demikian, sebagai lembaga berlabel Islam, IAIN Pekalongan juga mengemban tanggung jawab sebagai duta Islam. Oleh karena itu, lembaga ini harus mampu menghadirkan wajah Islam yang humanis, kontekstual dan membumi di tengah masyarakat. IAIN Pekalongan perlu membangun sistem pendidikan yang integralistik dan komprehensif untuk merespon tantangan global.

Dinamisasi pemikiran Islam seperti diuraikan di atas bisa dimulai dari penguatan khazanah ilmu-ilmu keislaman seraya tetap bersikap terbuka terhadap realitas sosial. Penguatan ini penting agar para sarjana

Muslim kita tidak kehilangan legitimasi saat berhadapan dengan masyarakat yang kian beragam. Ketika mewacanakan kontekstualisasi kitab kuning dan pribumisasi ajaran Islam, secara pribadi Gus Dur sudah mahir membaca kitab kuning dan memahami inti ajaran Islam.

GUS DUR ADALAH *PASSWORD*

Mukh. Imron Ali Mahmudi
Peneliti Diaspora

Akhir tahun lalu, saya melakukan penelitian lapangan di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Lasem adalah kota yang multikultural, terdiri dari komunitas masyarakat Tionghoa, Jawa, dan Santri dengan agama yang berbeda pula, yakni Islam, Konghucu, Kristen, Katholik, dan Buddha. Keragaman latar belakang itu membuat saya harus menyesuaikan diri ketika melakukan interaksi dengan masyarakat Lasem. Menariknya, proses penyesuaian itu berjalan mulus selama penelitian dengan 1 *password* penting, yaitu "Gus Dur".

Dalam dua dekade terakhir ini, model kebangsaan kita seperti masih mencari praktik terbaiknya. Dibukanya keran reformasi membuat berbagai pemikiran baru masuk ke Indonesia. Sayangnya, tidak semua pemikiran itu cocok diterapkan di Indonesia. Di satu sisi, ada berbagai aliran fundamentalis agama yang memaksakan penerapan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, kelompok sekular yang berusaha menihilkan peran agama dalam kehidupan juga muncul.

Berbagai aliran tersebut seringkali berbenturan (meskipun tidak selalu) dengan mode keberagamaan (keislaman) dan keindonesiaan manusia Indonesia. Kelompok fundamental misalnya, berusaha melakukan 'syariatisasi' hukum mulai dari pemahaman dengan kadar yang bisa diterima sampai level ingin mengganti ideologi negara dengan khilafah karena mereka memahami *'barangsiapa yang tidak menghukumi*

sesuai apa yang diturunkan Allah, maka ia berbuat aniaya' secara *letter lijk* sehingga menolak hukum apapun selain hukum Islam.

Sementara, kelompok sekular juga berusaha menghadapkan agama dengan negara atau bahkan ilmu pengetahuan (sains). Dalam tahun-tahun terakhir kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan aneh seperti, 'percaya dokter atau ulama?', 'pilih salat berjamaah (diasumsikan sebagai perintah agama) atau *social distancing* (diasumsikan sebagai anjuran pemerintah)?', sampai pilihan 'Al Quran atau Pancasila?'. Agama seolah-olah beroposisi biner dengan sains atau dengan negara. Eropa memang punya pengalaman pelik soal agama dan negara tetapi apakah itu berlaku di Indonesia?

Prinsip-prinsip fundamental dan sekular yang demikian itu tentu saja tidak selalu cocok dengan kultur manusia Indonesia yang selama ini berkembang. Indonesia memiliki keragaman suku, etnis, agama, dan budaya. Oleh karena itu, apa yang sudah disepakati oleh *founding father* dengan model kebangsaan yang berdasar pada pancasila adalah ide terbaik untuk kehidupan bersama di Indonesia.

Legacy Gus Dur

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mempertimbangkan ide-ide kelompok fundamental dan sekular tersebut? Atau, bagaimana kita mempertimbangkan 86% penduduk Indonesia yang beragama Islam? Disini perlu ada penempatan (*positioning*) agama dan negara yang tepat untuk keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Positioning Gus Dur soal negara dan agama di Indonesia jelas dan masyhur dalam ungkapan 'Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan juga negara agama'. Sulit menemukan lanjutan pernyataan itu kecuali "Indonesia ini negara yang bukan-bukan". Begitulah celoteh Gus Dur. Pernyataan itu tidak cukup lugas sebenarnya karena kategorisasi soal jenis negara tidak sehitam-putih negara agama dan sekuler. Ada jenis lain seperti, negara dengan satu agama resmi dan negara anti-agama.

Alih-alih terjebak dalam kategorisasi itu, Gus Dur menjawab bagaimana pandangan-pandangannya soal *positioning* itu. Gusdur menjadi pioner yang merumuskan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila. Sebagaimana disampaikan dalam Muktamar NU 1984 yang menjadi tonggak sejarah NU kembali ke *Khittah* 1926, pada dasarnya, Pancasila itu Islami; tidak bertentangan dengan Islam bahkan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, pandangan Gus Dur soal 'syariatisasi' hukum nasional juga jelas seperti yang ditulis dalam *Kedaulatan Rakyat* (Oktober, 2003) bahwa proses itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Artinya, ada pemihakan pada konstitusi dalam proses 'syariatisasi' hukum nasional. Dengan kata lain, yang terjadi adalah proses menasionalisasi sebagian hukum syariah. Dengan pandangannya ini, kita jadi semakin jelas pada kadar mana proses 'syariatisasi' bisa diterima atau tidak, misalnya dalam kasus penggantian ideologi khilafah. Inilah *legacy* Gusdur.

Warisan lain dari Gusdur yang juga tak kalah penting adalah soal inklusifitas. Keberpihakannya terhadap minoritas tak perlu diragukan lagi. Salah satu jasa yang paling diingat adalah ketika menjadi Presiden, Gusdur mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang melarang perayaan agama dan adat istiadat Tionghoa dilakukan di depan umum. Sejak dicabutnya Inpres tersebut, masyarakat Tionghoa bisa menikmati kemeriahan Imlek yang juga menjadi hari libur fakultatif.

Sekelumit laku Gus Dur itu masih bisa kita warisi sampai saat ini. Konsistensi Gus Dur baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi ditekan negara maupun saat berkuasa sebagai presiden menunjukkan karakter dominan Gus Dur. Oleh karena itu, wafat sebagai pejuang kemanusiaan adalah *legacy* Gus Dur yang sangat penting. Berkah (baca: dampak) nya, pemikiran Gus Dur masih sangat relevan, bermanfaat, dan juga diterima masyarakat luas.

Menariknya, inklusifitas Gus Dur itu masih ampuh meskipun beliau sudah wafat. Hal ini riil saya hadapi ketika meneliti Lasem dengan

resistensi orang-orang Tionghoa yang diakibatkan sentimen terhadap mereka yang masih kuat. Oleh karena itu, saya tidak cukup mudah untuk masuk ke dalam masyarakat Lasem. Ditambah desain rumah Tionghoa yang cenderung berpagar tinggi, turut mempersulit saya untuk berbaur.

Sebagai orang baru, identitas saya tentu dipertanyakan. Sebagaimana juga pendatang baru yang lain yang patut juga dicurigai—setidaknya diwaspadai—kehadirannya supaya tidak membawa situasi yang destruktif bagi kerukunan masyarakat Lasem. Disinilah keramat gusdur bekerja. Saya kerap kali mengidentifikasi diri sebagai pengikut, atau setidaknya pengagum Gus Dur atau bisa disebut GUSDURian. Identitas itu begitu mudah diterima bagi masyarakat Tionghoa dan kelompok minoritas lain di Lasem, seperti penganut Buddha, Kristen, dan Katholik, apalagi santri.

Nama Gus Dur seperti *password*. Segala hambatan untuk masuk ke masyarakat Lasem sirna begitu saja seketika saya mengidentifikasi diri dengan nama Gus Dur dengan cara memperkenalkan diri (atau diperkenalkan) sebagai pengagum Gus Dur, memakai kaos bergambar Gus Dur, dan juga membicarakan pemikiran Gus Dur. Mereka menjadi lebih terbuka terhadap saya begitu mendengar kata Gus Dur. Hal itu tentu sangat membantu saya untuk menggali informasi lebih dalam untuk keperluan penelitian.

Terlepas dari itu, disinilah saya kira keramat atau *karomah* atau *legacy* Gus Dur yang sangat esensial. Gus Dur meninggalkan *legacy* untuk keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan yang diterima oleh berbagai kalangan. Apapun yang melekat dengan nama Gus Dur menunjukkan punya visi yang seirama dengannya.

Ketika nama itu melekat pada universitas, spirit perjuangan Gus Dur semoga akan menyala bagi siapapun yang berproses di dalamnya. Oleh karena itu, rencana transformasi kelembagaan IAIN Pekalongan menjadi UIN KH Abdurrahman Wahid juga tentu akan menegaskan identitas serta visi universitas yang sesuai dengan apa yang menjadi visi Gus Dur.

Saya kira, berangkat dari Pekalongan, ini juga akan jadi kata kunci yang akan membukakan banyak kemajuan positif baik bagi moderasi beragama, kehidupan keindonesiaan yang damai dan inklusif serta kemanusiaan yang bermartabat sebagaimana yang ditinggalkan Gus Dur. Sekali lagi, *password* nya adalah Gusdur.

ABDURRAHMAN WAHID: ANTARA PLURALITAS DAN PLURALISME AGAMA

Anindya Aryu Inayati
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Salah satu tokoh istimewa yang sangat konsisten dalam membela hak-hak kaum minoritas dan mengusung kemajemukan adalah Dr. (HC). KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Presiden Indonesia ke-4 ini seringkali disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena begitu *getol* mengangkat tema toleransi dan mengumandangkan bahwa Indonesia adalah milik seluruh elemen masyarakat, tanpa membedakan ras, suku, bahasa, etnik, bahkan agama dan keyakinan. Bagi Gus Dur, Pluralisme adalah menghargai adanya pluralitas yang merupakan *Sunnatullah.*

Ada sedikit perbedaan definisi pluralisme versi Gus Dur dan pluralisme yang umum dipahami berbagai kalangan akademisi dan pemikir Muslim di seluruh dunia. Jika pluralisme pada umumnya adalah paham yang menyamaratakan seluruh agama, yang artinya bahwa semua agama sama benarnya. Maka Gus Dur dengan tegas membuat batas dari keseragaman terhadap kebenaran seluruh agama. Setiap agama tetaplah paling benar bagi penganutnya. Pluralisme Gus Dur memberikan makna baru yang mengarah kepada pluralitas, yaitu sebagai paham yang mengajarkan untuk menyadari bahwa di luar keimanan terhadap agama, ada keimanan individu lainnya terhadap agamanya. Bagi Gus Dur, Pluralisme mengajarkan kesadaran kepada

setiap manusia yang beragama dan terutama Muslim, bahwa ada kemajemukan beragama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pembelaan Gus Dur terhadap suatu kelompok minoritas, bukanlah hanya karena mereka berbeda, namun juga membela keadilan. Salah satu pembelaan Gus Dur terhadap hak-hak minoritas terkait etnis Thionghoa pasca terjadinya kerusuhan di tahun 1998. Gus Dur dalam wawasan kebangsaannya, mengakui etnis Thionghoa sebagai suku-etnis yang berkedudukan sama dengan etnis-suku Jawa, Batak, Papua, Arab, India, Jepang dan Eropa yang telah lama bermukim dan menjadi warga negara Indonesia. Etnis Thionghoa juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang sah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pemaknaan baru terhadap pluralisme ini, merupakan salah satu representasi ke-Indonesia-an Gus Dur dalam pengamalan pancasila, sila ke-3 dan ke-5. Dimana dengan menjaga keberagaman (pluralitas), Indonesia bersatu sebagaimana sila ke-3. Dan dengan menjaga keberagaman, sila kelima -yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia- dapat terwujud. Meskipun demikian, perbedaan definisi pluralisme versi Gus Dur ini, agaknya tidak banyak dipahami oleh cendekiawan Muslim Indonesia. Sehingga tindakan dan pembelaan Gus Dur terhadap beberapa kelompok minoritas seringkali disalah-artikan sebagai suatu tindakan *nyleneh* yang kontroversial dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dari sisi kemanusiaan, KH. Abdurrahman Wahid adalah sosok yang kukuh mendukung kemerdekaan setiap individu untuk dapat menentukan pilihan dan pendiriannya sebagai seorang warga Negara yang sadar dan sekaligus menghormati perbedaan dan kemajemukan Indonesia. Gus Dur adalah seorang Humanis tulen yang demokratis. Ia berkeyakian bahwa Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Islam yang damai dan membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*). Hingga dalam bidang politik, rahmat dari Islam haruslah dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh pihak. Sehingga dalam pengantar

buku berjudul *Tradisionalisme Radikal* (1997) karya Greg Fealy, Gus Dur dengan tegas berpendapat, bahwa tidak ada monopoli kebenaran politik, sebab kebenaran adalah proses dialektika yang terjadi dari kebebasan berpikir dan berkehendak setiap manusia. Salah satu nilai humanisme yang dikukuhkan Gus Dur adalah sikap saling menghormati, sebab setiap manusia haruslah dihormati apapun latar belakang agama, suku, bahasa dan profesinya. Saling menghormati juga berarti memuliakan orang lain dengan tidak menjatuhkan atau merendahkannya demi meraih sesuatu. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam Haji *Wada'*, menyampaikan pesan humanisme yang juga menjadi salah satu tujuan dari syariat Islam, yaitu menjaga martabat (*dignity*) manusia.

Fathurrohman dalam salah satu tulisannya bertajuk "Fikih Pluralisme dalam Perspektif Ulama NU" dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menuliskan bahwa konsep pluralisme Gus Dur setidaknya memiliki 3 dimensi yaitu; dimensi pemikiran (*mind*), dimensi perilaku (*attitude*) dan dimensi tindakan (*action*). Pada dimensi pertama, yaitu dimensi pemikiran, Gus Dur banyak menuangkan ide mengenai keberagaman (pluralitas) yang merupakan kehendak Allah yang dengan jelas tertulis di dalam Al-Qur'an. Maka Gus Dur mengimbau kepada segenap umat Muslim untuk tidak melakukan homogenisasi dengan menyeragamkan pemahaman ajaran agama dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain, sebab tindakan ini justru tidak sesuai dengan *spirit* Al-Qur'an. Pada dimensi perilaku, Gus Dur aktif melibatkan diri dalam berbagai kegiatan dan forum pro-demokrasi, pendukung Hak Asasi Manusia (HAM) dan komunitas lintas agama. Keterlibatan Gus Dur dalam forum-forum tersebut seringkali mendapatkan stigma negatif dari berbagai pihak yang berpikiran fundamental dan radikal, tetapi tidak menyurutkan langkah Gus Dur untuk merangkul seluruh elemen masyarakat Indonesia, tanpa batas agama, kepercayaan, ras, suku, etnis, budaya, maupun bahasa. Dimensi ketiga, adalah tindakan. Pada dimensi ini, Gus Dur yang sedang menjabat sebagai Presiden ke-4, tanpa ada keraguan mencabut Instruksi

Presiden (Inpres) nomor 14 tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat Tionghoa, yang kemudian membuka pintu kemerdekaan segenap etnis Tionghoa di tanah air untuk merayakan tahun baru Imlek. Dampak dari dicabutnya inpres ini, tahun 2002 Presiden Megawati Soekarno Putri menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Selain itu, Gus Dur juga aktif terlibat dalam dialog antar agama. Keterbukaannya dan sikapnya yang bersahabat terhadap pemeluk berbagai agama dan keyakinan adalah gambaran nyata dari toleransi beragama dan penghargaan yang tinggi terhadap pluralitas.

Tantangan yang menjadi konsekuensi dari sikap moderat Gus Dur ini, tentu tidaklah ringan. Dia harus menghadapi hujatan dan tuduhan-tuduhan sesat dari berbagai kalangan. Terutama dari kelompok Muslim Konservatif. Namun, tokoh yang lahir dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil ini adalah contoh sosok yang konsisten terhadap pemikiran dan perbuatannya. Tantangan tersebut tidak membuatnya goyah. Sebab, bagi Gus Dur, Islam adalah pemersatu bangsa dan pelindung bagi pluralisme masyarakat atau kemajemukan warga negara Indonesia. Islam harus mampu menjawab laju modernitas dengan bersikap toleran, egaliter dan demokratis. Sehingga nilai-nilai Islam yang universal dan esensial dapat menyatu dalam tubuh nasionalisme, meskipun tanpa perlu dibeli label "Islam" atau "Syariah".

KH. Abdurrahman Wahid dengan konsep pluralismenya dimaknai dengan pengakuan terhadap adanya pluralitas dan kemajemukan beragama, bernegara dan bermasyarakat menjadi representasi dari perpaduan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan dari seorang pemimpin yang berkarisma dengan kedalaman keilmuan dan pemahaman terhadap hakikat kehidupan.

BER-*TABARRUK*-AN DENGAN NAMA ABDURRAHMAN WAHID

(Sebuah revolusi dan refleksi pergantian IAIN Pekalongan menjadi UIN Abdurrahman Wahid)

Bagus Purwo Nugroho
Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Nama adalah sebuah cerminan dari orang tua kita ketika seorang bayi telah lahir ke dunia. Dalam Islam sendiri sangatlah dianjurkan kepada orang tua agar memberikan nama terhadap anaknya yang masih bayi. Rasulullah Saw pernah menggantikan nama *Al Harb* (perang/permusuhan/perpecahan) menjadi *Ash Shalih* (damai/baik/tenteram), *Murrah* (pahit/asam/jelek) diganti menjadi *Hasan* atau *Jamil* (indah/bagus/baik), dan lain sebagainya. Bahkan beliau juga memberikan nama kepada anaknya diambil dari nama para Nabi dan Rasul.

Pemberian nama yang baik terhadap anak menjadi perhatian yang sarat akan pendidikan akhlak nantinya. Kalau anak kita diberikan nama yang baik ataupun mengambil dari nama nabi, sahabat, ataupun ulama sekalipun akan mendatangkan nilai keberkahan atau dalam dunia ke-ASWAJA-an dikenal dengan *tabarruk* atau istilah jawanya *ngalap berkah.* Dengan pemberian nama yang baik akan menjadi harapan yang baik sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dapat menjadi cerminan baik dan inspiratif dari tokoh yang dipilih namanya. Misalnya seorang anak diberi nama Saifullah yang merupakan gelar dari sahabat

Nabi yang bernama Khalid bin Walid dengan harapan supaya anak tersebut mempunyai ketegasan dan keberanian terhadap penentang Islam. Bahkan, seorang aktris Bollywood yang diberikan nama identik sebuah pedang sahabat Nabi. Dia adalah Saif Ali Khan. Aktor Bollywood yang sering kita jumpai di film Bollywood yang terkenal akan emosial cintanya yang meledak yakni *Kal Ho Naa Ho* (produksi 2004) ini mempunyai arti di balik namanya tersebut. Saif diartikan pedang dan Ali merupakan sahabat Nabi yang pemberani melawan kezaliman yakni Ali bin Abi Thalib, adapun Khan adalah marga orang Hindustan atau Pakistani muslim. Jadi, kalau digabungkan akan menjadi "pedang Ali", yakni Dzulfiqar. Begitu juga dengan Salman Khan yang nama depannya menggunakan nama salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al Farisi, dan lain sebagainya.

Hal tersebut selaras juga dengan perubahan nama IAIN Pekalongan yang sebentar lagi akan berubah menjadi UIN Abdurrahman Wahid atau sering kita sebut dengan UIN Gus Dur. Kita harus tahu lebih mendalam tentang sosok Gus Dur ini. Namun, banyak yang tersirat dalam pikiran kita, mengapa harus diubah menjadi UIN Abdurrahman Wahid bukan tokoh yang lain dan masih banyak seperti UIN Sunan Kudus, UIN Nurcholish Madjid, ataupun UIN Maulana Luthfi yang terkenal di kancah internasional. Kenapa harus Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bukan yang lain?

Saya tidak protes dengan penggantian nama IAIN Pekalongan menjadi UIN Abdurrahman Wahid. Kita semuanya telah mengetahui bahwa beliau adalah presiden keempat yang penuh dengan karisma. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai kepribadian Gus Dur yang menjadi latar belakang perubahan nama IAIN Pekalongan diganti dengan UIN dengan *bertabarruk* dan mengambil nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pertama, beliau dikenal sebagai Bapak Humanisme Indonesia. Dalam buku *Humanisme Gus Dur* yang ditulis oleh Syaiful Arif (2013), berisi mengenai segala pemikiran Gus Dur yang selalu mengedepankan

prinsip humanisme. Artinya, pemikiran tentang harkat dan martabat kemanusiaan mencapai level tertinggi dari segalanya. Khususnya, di hadapan Tuhan dan oleh karena itu, manusia harus dimuliakan. Beliau pernah menyatakan bahwa "*Agama harus disandingkan dengan kemanusiaan. Jika tidak, ia akan menjadi senjata fundamentalistis yang memberangus kemanusiaan*". Pernyataan ini secara jelas menggambarkan kesadaran Gus Dur akan perlunya nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai '*sandingan*' yang harus berdampingan dengan agama sehingga agama tidak berbalik arah atau bahkan menyerang manusia atas nama Tuhan.

Ini merupakan sebuah keyakinan yang lahir dari kedalaman batin seorang bahwa dalam memahami totalitas keislamannya harus meneliti tiga hal; bertauhid, bersyariat, dan mengupayakan kesejahteraan manusia. Tiga hal dasar ini menunjukkan dasar keagamaan bagi humanisme. Artinya, pemuliaan Gus Dur atas manusia dan upaya menyejahterakan anak Adam ini dilakukan setelah Gus Dur bertauhid dan bersyariat. Oleh karena itu, dalam pemikiran Gus Dur, kemanusiaan tidak bisa dibenturkan dengan syariat dan tauhid. Bahkan sebaliknya, kemanusiaan menjadi amal bagi keimanan dalam kerangka syariat.

Kedua, hal yang perlu diketahui dari Gus Dur adalah selain mengedepankan humanisme, beliau juga mengedepankan rasa toleransi daripada kepentingan politik. Beliau merupakan tokoh yang sangat gigih dalam memperjuangkan toleransi beragama dalam masyarakat majemuk. Bagi Gus Dur, toleransi bukan persoalan epistemologi (hukum fiqih) sehingga membutuhkan definisi, tetapi aksiologi (nilai moralitas) dari konsep-konsep yang bersifat normatif dalam Islam. Ia selalu bergandengan dengan konsep pluralisme. Jika pluralisme membicarakan soal bagaimana realitas kemajemukan agama dapat diterima, maka toleransi adalah lebih menekankan bagaimana berperilaku dalam kemajemukan tersebut.

Toleransi menurut Abdurrahman Wahid sebagaimana yang ditulis oleh Faizatun Khasanah dalam bukunya yang berjudul *Etika Gus Dur Religius – Rasional* (2018) bukanlah gagasan yang berdiri sendiri,

tetapi menyatu dengan dimensi sosial dalam frame besar kehidupan berbangsa. Secara teoretis, toleransi dalam pemikiran Abdurrahman Wahid ini juga bukan pemikiran yang terpisah dengan dimensi keagamaan, akan tetapi merupakan proses dialogis antara keilmuan Islam dengan keilmuan humaniora yang menghasilkan sikap dan tindakan toleran sebagai aksiologinya. Intinya antara humanisme memiliki hubungan erat dengan toleransi.

Ketiga, Gus Dur mempunyai sebuah gagasan terpenting yaitu tentang pribumisasi Islam. Ini merupakan gagasan Gus Dur yang paling populer. Hal tersebut bahkan menjadi *trademark* darinya yang menandai keprihatinan Gus Dur -sejak dahulu- atas kebudayaan Islam di Indonesia di tengah ancaman *arabisasi* yang telah berlangsung hingga saat ini. *Pribumisasi* Islam ternyata tidak hanya melalui proses *indigenisasi* Islam ke dalam budaya lokal dalam artian antropologis. Akan tetapi, *kontekstualisasi* Islam ke dalam realitas kehidupan dalam kerangka proses kebudayaan secara filosofis.

Pribumisasi Islam menurut Gus Dur bukanlah *Jawanisasi* Islam atau sinkretisme. Sebab, *jawanisasi* menunjukkan dominasi budaya Jawa atas Islam sehingga Islam hanya menjadi "kulit luar" dari substansi yang bersifat Jawa. *Pribumisasi* Islam juga bukan sinkretisme sebab sinkretisme merupakan pencampuradukan macam-macam teologi yang tak beraturan. Melalui itu, *pribumisasi* Islam merupakan upaya mengakomodasi perkembangan realitas melalui kemungkinan pengembangan penafsiran atas *nash*, yang disediakan oleh metode *qawaa'idul fiqhiyyah* dan *Ushul fiqh* (metode 'Urf). Atas dasar itu, lahirlah pemikiran Islam Nusantara atau Islam Indonesia.

Hal-hal tersebut yang mendasari perubahan nama IAIN dengan nama UIN Abdurrahman Wahid. Perubahan nama ini bukanlah untuk menarik perhatian banyak orang yang masuk dalam lingkungan kampus ini karena namanya menarik, tetapi menjadi keberkahan dari beliau agar seluruh civitas academica dapat meniru keteladanan beliau *rahimahullah* yang **Humanis**, **Toleransi**, dan **Berbudaya**.

OTONOMI TEORI KEINDONESIAAN: DISKURSUS PENGEMBANGAN ILMU UIN PEKALONGAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN DI INDONESIA

Syamsul Bakhri
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pengembangan ilmu di PTKIN seharusnya bisa bermanfaat sepenuhnya untuk masyarakat, agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dan bisa menciptakan lingkungan yang aman bagi anggotanya. Dengan demikian, tidak terjadi kesenjangan, kesejahteraan yang timpang, perselisihan, dan kerusuhan di masyarakat. Sayangnya banyak yang memaknai dan menerapkan pengembangan Ilmu sekadar ilmu untuk ilmu. Pertanyaannya apakah pengembangan ilmu di PTKIN sudah bermanfaat sepenuhnya untuk masyarakat atau masih sekadar ilmu untuk ilmu. Jika jawabannya masih ilmu untuk ilmu berarti hanya bermanfaat pada sisi internal keilmuan saja. Akan tetapi, jika bermanfaat sepenuhnya untuk masyarakat berarti pengembangan keilmuan sudah pada jalurnya yaitu bermanfaat secara internal (keilmuan) dan eksternal (masyarakat).

Ilmu pengetahuan memang memiliki otonomi dalam mempelajari alam semesta, tetapi masalah moral akan timbul ketika penggunaan pengetahuan ilmiah tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, contohnya untuk melakukan operasi transgender. Sejauh ini, ilmu pengetahuan memiliki sisi kajian internal dan eksternal. Sisi kajian internal digunakan manakala ilmu hanya menggunakan metode

spesifik yang dimiliki untuk dipraktikan ilmuan secara otonomi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada sisi kajian eksternalistik ilmu akan berkaitan dengan manfaatnya pada berbagai lembaga sosial di masyarakat.

Ilmu yang berkembang tidak saja merupakan kerangka pemikiran logis, tetapi juga telah teruji. Dengan ilmu, seseorang akan bisa menjelaskan gejala sosial dan alam secara rinci, kemudian dapat menyimpulkan, memprediksi, dan merekomendasikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Pada hakikatnya, ilmu memiliki objek kajian (ontologis), memiliki metode untuk mencapai kebenaran (epistemologis), dan memiliki kemampuan terkait dengan masyarakatnya (aksiologis). Ilmu yang bisa terus berkembang, pada prinsipnya terdapat pertimbangan etis, kaidah moral, dan norma kerja profesinya. Karena, tanpa dukungan dari masyarakat secara struktural maupun kultural niscaya perkembangan Ilmu akan tumbuh dan diakui.

Menurut Prof. A.T. Soegito dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila (2008), Pada hakikatnya ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang hanya pada satu sisi saja (misalnya internal), kesan yang diperoleh menjadi perbuatan yang terpotong (*truncatedsetion*) dan hal ini jelas akan memisahkan ilmu pada aplikasinya. Dengan kata lain, tidak ada ilmu yang bebas nilai atau ilmu akan berkembang melalui nilai normatif atau sebenarnya tidak ada ilmuan yang otonom. Secara subjektif, bisa disimpulkan selama ini ilmu di PTKIN kurang berkembang karena pengembangannya hanya secara internal saja.

Contoh kasus dalam perkembangan teknologi transportasi *online* yang menimbulkan konflik dengan transportasi konvensional; Virus Covid-19 yang tidak terprediksi oleh perguruan tinggi, para ilmuan, dan pemerintah; radikalisme yang berkembang keranah digital yang semakin sulit untuk diatasi; perkembangan *metaverse* yang mana institusi pendidikan sama sekali belum turut berperan di dalamnya. Semakin berkembangnya teknologi maka perubahan sosial di masyarakat akan menjadi sangat cepat sehingga terjadi inovasi disruptif.

Disruptif Innovation yaitu istilah yang digunakan Christensen untuk menjelaskan gangguan yang terjadi karena inovasi teknologi baru, bahkan merusak pasar yang sudah ada, menggantikan teknologi terdahulu, dan menciptakan pasar baru. Oleh karena itu, untuk menyikapi inovasi disrupsi dalam berbagai sektor yang sedang melanda Indonesia, butuh peran lembaga pendidikan tinggi dan ilmuan di dalamnya untuk mempersiapkan perubahan sosial yang akan terjadi dan memberikan masukan terhadap langkah kebijakan pemerintah.

Pemanfaatan teknologi tanpa memperhatikan aspek sosial masyarakat membuat penanganan konflik transportasi *online* sulit diatasi dan berlarut-larut, padahal jika sinergisitas antara ilmuan sosial dan pemerintah berjalan dengan baik hal tersebut bisa diantisipasi, misalnya dengan penerapan kebijakan pengelolaan transportasi *online* dengan sistem Koperasi dengan sistem kerakyatan yang digagas oleh Bung Hatta, sebuah kajian sosiologi ekonomi khas masyarakat Indonesia.

Pada kasus virus Covid-19, jika perguruan tinggi, ilmuan, dan pemerintah berhasil memprediksi hal tersebut, tentunya korban jiwa dan langkah preventif bisa dilakukan. Mengenai radikalisme yang merambah melalui dunia digital juga akan semakin masif penanganannya jika ada sinergisitas dan gotong-royong antara ahli IT, ahli agama, ilmuan sosial, pemerintah dan elemen masyarakat berjalan dengan baik.

Hal terbaru mengenai *Metaverse*, lembaga pendidikan juga tidak cepat untuk berperan di dalamnya, meyebabkan pemahaman masyarakat menjadi keliru. Perspektif yang berkembang bahwa *metaverse* akan menimbulkan dampak negatif. Padahal alat (*Metaverse*) sifatnya adalah netral, tidak memiliki sifat positif atau negatif, contoh pisau jika kita tau apa fungsinya dan digunakan sesuai peruntukannya dalam bingkai nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat maka pisau itu akan bermanfaat saat digunakan untuk memasak dan lain sebagainya, tetapi jika pisau digunakan untuk kejahatan baru akan berdampak negatif. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus berperan dan menjelaskan

mengenai *Metaverse* agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi tersebut.

Difusi paradigma bahwa sebuah penelitian hanya dilakukan oleh seseorang yang linier keilmuannya dengan masalah yang terjadi dan paradigma untuk memiliki gelar linier dalam menempuh pendidikan adalah sesuatu yang harus dievaluasi karena dalam pengembangan keilmuan yang terpenting adalah pendalaman pemahaman dalam suatu bidang kajian keilmuan dan permasalahan sosial tertentu. Memang, linier dalam penelitian dan gelar akademik adalah dua sisi mata uang yang berkaitan, tetapi perlu keluwesan dan bijaksana dalam menyikapinya. Minimal kita dalam membentuk sebuah tim penelitian, anggotanya berasal dari berbagai latar belakang disiplin Ilmu. Dalam menyelesaikan masalah sosial di era industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 kita akan membutuhkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu. Para pemenang hadiah Nobel di Dunia mereka adalah individu yang belajar, mengembangkan, dan berpikir multidisipliner. Lembaga pendidikan tinggi harus sadar, sekarang telah terjadi ledakan karir pekerjaan yang bukan berasal dari lulusan lembaga pendidikan (Youtubers, Programer, NFT, dll).

Butuh pemikiran yang keluar dari kebiasaan yang telah dijelaskan diatas dan komitmen bersama untuk mengembangkan ilmu di UIN Pekalongan. Selain itu, Saya menyarankan agar tidak menjadikan Universitas sebagai menara gading. Pemerintah, universitas, dan ilmuwan harus bersinergi dalam menciptakan SDM unggul, penelitian yang berkualitas, jurnal ilmiah yang berkualitas, penghargaan terhadap para ilmuwan/akademisi yang tinggi, dan melakukan pengkajian permasalahan secara multidisipliner sebagai pijakan untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas. Pengembangan Ilmu di UIN Pekalongan harus bersinergi antara ilmu agama dengan ilmu eksakta dan sosial. Ilmu yang dikembangkan di UIN Pekalongan harus mempunyai kajian khas ke-Indonesia-an yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan juga masyarakat.

Tawaran yang saya ajukan untuk pengembangan keilmuan UIN Pekalongan adalah otonomi teori Keindonesiaan. Kenapa otonomi teori, karena selama ini permasalahan di Indonesia yang dikaji menggunakan teori-teori yang lahir di barat dengan karakteristik informan penelitian yang berbeda dengan karakteristik masyarakat Indonesia terbukti kurang tepat dan efektif ketika diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia.

Salah satu contoh kajian yang bisa dikembangkan oleh UIN Pekalongan adalah kajian mengenai kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya gotong royong. Menurut Prof. Dr. Damardjati Supanjar dalam buku yang berjudul *Jumenengan* Filsafat Demokrasi Pada Budaya Lokal Jawa (2005) ciri utama filsafat Nusantara umumnya, Jawa khususnya ialah gotong royong, yang secara universal dikenal sebagai filsafat organisme atau filsafat proses. Filsafat ini memandang realitas itu berstruktur (lahir-batin) dan berproses (awal-akhir). Istilah gotong royong ada di seluruh bagian kebudayaan masyarakat Indonesia, merupakan sebuah kearifan lokal yang harus dikembangkan, sangat spesifik, dan hanya ada di Indonesia.

Selain itu, gotong-royong memiliki makna solidaritas dalam budaya masyarakat Indonesia. Penerapan dalam dunia pendidikan solidaritas bisa dikembangkan dalam pembelajaran kooperatif dan *problem solving*. Perilaku solider sangat dibutuhkan dalam membangun masyarakat *Madani* yang mampu memandang diri, lingkungan, dan dunia serasi, selaras, dan seimbang. Nilai solidaritas juga merupakan manifestasi dari karakter peduli. Jika bisa memaknai dan menerapkan gotong-royong untuk pengembangan pengetahuan, sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bangsa ini, maka setiap permasalahan akan mendapatkan solusi yang tepat dan bisa diterima oleh masyarakatnya.

GUS DUR DAN PEMBANGUNAN BUDI LUHUR MANUSIA

Mukoyimah
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Gus Dur menjadi *trendsetter* pluralisme di tengah-tengah gemuruhnya isu perselisihan agama dan ras budaya. Beberapa tahun belakangan isu ras dan agama masih hangat diperbincangkan di beberapa sektor. Baik sektor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Setelah beberapa peristiwa penistaan agama dan pelecehan perbedaan ras mengakibatkan beberapa orang 'dibuikan'. Hal ini seolah menggambarkan kondisi di tengah-tengah masyarakat yang masih mengalami disharmonisasi.

Pada awal kehadiran pemikiran Gus Dur masih menimbulkan banyak kontroversi di tengah pola pikir masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu pandangan Gus Dur telah menjelma menjadi pandangan baru yang pada akhirnya menyadarkan seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya menjaga toleransi beragama dan budaya.

Manusia dan agama bagai dua sisi mata uang yang apabila satu tiada maka sama dengan ketiadaan keduanya. Budaya dan manusia memiliki hubungan sangat erat. Manusia lahir di tengah budaya sehingga kehadirannya ikut serta dalam membentuk pola prilaku. Hal inilah yang menjadikan manusia, agama, dan budaya merupakan satu lingkungan yang sulit terpisah.

Gus Dur memandang bahwa fitrah manusia dengan manusia lain ialah saling memahami dengan akal dan menjaga persaudaraan dengan budi. Akal manusia tanpa budi maka tidak akan mampu melahirkan keluhuran jiwa. Agama berperan penting dalam menentukan corak, polarisasi peran, dan pelapisan sosial dalam masyarakat. Meski perdebatan agama membentuk masyarakat atau sebaliknya masih belum menemukan titik akhir.

Meski demikian, tidak banyak orang mampu mewujudkan harmonisasi dalam beragama dan berbudaya di tengah hiruk pikuk kehiduapan yang semakin berkembang. Degradasi moral akal budi ini semakin hari kian terasa. Bisa saja hal ini terjadi karena manusia disibukkan dengan menata ulang dunianya dalam isu keterbaruan sistem informasi, ketercepatan melahirkan teknologi baru dan penerapannya, kualitas pendidikan yang dipaksa bertukar nilai menjadi jasa dan ekonomi sehingga dapat mampu hidup dalam kurun waktu lama di tengah persaingan yang ketat.

Kesibukan ini mengakibatkan keangkuhan manusia pada ranah kepekaan etis. Manusia lebih nampak menonjolkan akal tanpa menyandarkan pada budi luhur. Gus Dur menjelaskan bahwa sebagai manusia yang lahir ditengah lingkungan multibudaya harus mampu menghidupkan budaya dengan agama dan mempraktikkan ajaran agama melalui budaya. Dengan demikian, tujuan membangun kebinekaan dalam naskah proklamasi Indonesia dapat terwujud dan bukan sekadar sebagai janji tulis yang tercantum pada naskah 1 Juni 1945. Ialah manusia menjadikan pancasila sebagai pedoman hidup dan dasar negara yang dihidupkan oleh seluruh masyarakat.

Pandangan Budi luhur Gus Dur mendorong terwujudnya manusia yang mampu melaksanakan nilai pancasila tanpa syarat. Sebenarnya rakyat ini telah dididik sejak dini baik dalam kultur budaya lingkungan maupun lembaga pendidikan. Di dunia pendidikan sejak dini, anak-anak dididik untuk saling toleransi dalam berperilaku dan berucap dengan menerapkan nilai-nilai pancasila. Seperti saling menjaga dan

menghormati perbedaan agama, berucap baik agar tidak menyinggung ras yang berbeda, menunjukkan sikap saling menghargai di segala lini perbedaan kehidupan. Namun, ternyata hal ini tidak cukup.

Selain pendidikan kultural, sepertinya ranah pendidikan menjadi wadah paling tepat untuk membangun pola pikir dan perilaku masyarakat. Dunia pendidikan efektif untuk menyuntikan ideologi-ideologi baru kepada generasi penerus. Agar praktik-praktik penistaan agama dan pelecehan atas perbedaan suku dan ras tidak terjadi lagi.

Ajaran Gus Dur tentang akal budi mendorong manusia senantiasa sadar bahwa bermasyarakat di tengah multikulturnya memerlukan ajaran agama sehingga mendorong akal lebih berbudi. Akal manusia tanpa agama dapat mendorong terjadinya kejahatan, seperti mencemooh, membuli, menistakan, dan memprovokasi. Apalagi, era sekarang ini adalah masa digitalisasi percepatan informasi semakin menjadi. Suntikan pola pikir dan perilaku dapat segera disebarkan dan ditiru oleh siapapun tanpa sekat umur dan takar suku.

Akal yang didasarkan pada nilai agama menurut Gus Dur akan meuwujdkan cinta kasih. Cinta kasih manusia sesungguhnya sangat tepat untuk melindungi kehidupan manusia di segala masa kehidupan. Budi merupakan serangkaian kemampuan kognitif yang memungkinkan kesadaran, persepsi, pertimbangan, dan ingatan pada manusia atau dalam bahasa Gus Dur ialah alat batin yang mampu mendorong manusia berperilaku baik dan menghilangkan yang buruk. Indonesia dengan segala perbedaan agamanya sangat riskan terdampak konflik. Oleh karena itu, pandangan Gus Dur tentang akal budi manusia ini perlu dikaji ulang di dunia pendidikan sehingga menghasilkan mata pelajaran yang memiliki ruh-ruh nilai etis agama dan budaya baik *science*/sains maupun sosial. Di ranah pendidikan agama terutama Islam dipandang perlu untuk membangun sikap toleransi terhadap setiap perbedaan baik pandangan maupun praktik.

Saat Clifford Geertz datang ke Mojokerto (Pare, Kediri Jawa Timur) tahun 1950-an, dia menjumpai Islam tidak tunggal melainkan lahir

dengan tampilan tiga wajah yang kemudian terklasifikasi sebagai santri, abangan, dan priyayi. Meski banyak yang mengkritik klasifikasi tersebut, temuan Geertz telah mengkonfirmasi bahwa agama Islam cenderung memiliki banyak wajah. Dengan demikian, keragaman tersebut jika tidak terkonfimasi secara langsung hadir di tengah-tengah masyarakat pada beberapa wilayah di Indonesia akan menjadi sumbang nilai agamanya.

Apalagi ilmuwan-ilmuwan besar seperti Geertz menjadi referensi penting dalam keilmuan-keilmuan di perguruan tinggi. Dengan demikian, wajah agama Islam memerlukan pandangan luas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Belum lagi, Indonesia tidak hanya memiliki satu suku, ras, dan bentuk praktik budaya.

Kehadiran diri di tengah lingkungan yang berbeda juga memerlukan akal budi. Menerima perbedaan tanpa memojokkan perbedaan harus tetap menjadi ruh setiap orang yang berkerakyatan. Terutama anak didik dan mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus. Kesadaran perbedaan praktik dan pandangan keagamaan serta budaya, suku, dan ras harus dijunjung dan hal ini bukan hanya sebatas teori dalam mata pelajaran saja tetapi benar-benar dipraktikkan pada perilaku dan bahasa. Mahasiswa yang merupakan rumpun terkahir untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat harus siap membawa diri dan melebur di tengah-tengah kondisi masyarakat.

Peran mahasiswa sebagai *agent sosial of change* bukan sekadar pada saat mereka menjadi mahasiswa, tetapi juga setelah mereka lulus dari kuliah dan hidup ditengah masyarakat. *Agent sosial of change* bukan perkara mudah, mengubah paradigma masyarakat yang buruk menjadi baik, mengubah kebiasaan hidup buruk menjadi baik, dan membantu masyarakat memahami kondisi Indonesia yang multikultural dan multiagama ini harus dilaksanakan dengan mengembalikan ajaran agama pada akal budi yang mampu melahirkan keluhuran jiwa.

GUS DUR: NILAI DAN PENDEKATAN

Ayon Diniyanto
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) telah selesai dilaksanakan pada penghujung tahun 2021. Muktamar yang berlangsung di Provinsi Lampung berhasil menetapkan K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027. Gus Yahya sebagai nahkoda eksekutif PBNU dalam salah satu gagasan besarnya mengusung visi "Menghidupkan Gus Dur". Gus Dur yang dimaksud tentu K.H. Abdurrahman Wahid. Presiden Republik Indonesia (RI) ke-4 dan Ketua Umum PBNU (1984-1999). Menghidupan Gus Dur yang dimaksud oleh Gus Yahya adalah menghidupkan nilai-nilai universal yang dipegang dan dilaksanakan oleh Gus Dur. Menghidupakan Gus Dur juga dimaknai sebagai menjalankan apa yang pernah dilakukan dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Gus Dur.

Upaya menghidupkan Gus Dur juga dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. IAIN Pekalongan yang kelak akan bertransformasi menjadi universitas dan bernama Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid juga terus menggaungkan narasi tentang sosok Gus Dur. Berbagai tema literasi tentang Gus Dur juga terus dihidupkan. Tentu kita berharap bukan karena akan berganti nama menjadi UIN KH Abdurrahman Wahid sehingga melakukan upaya labelisasi dengan mengangkat sosok Gus Dur. Kita berharap narasi dan literasi yang dibangun memang benar-benar dalam rangka membumikan

dan menerapkan nilai-nilai Gus Dur dalam tataran akademik dan masyarakat. Narasi dan literasi yang dibangun oleh IAIN Pekalongan dapat dikatakan juga sebagai bentuk upaya untuk menghidupkan Gus Dur.

Ditempat-tempat yang lain, upaya menghidupkan Gus Dur juga terus dilakukan dan bahkan semakin masif. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan komunitas-komunitas masyarakat begitu hangat mempelajari dan berdiskusi tentang Gus Dur. Bahkan, terdapat komunitas atau organisasi yang disebut sebagai GUSDURian, yang memang konsen pada "membumikan" nilai-nilai Gus Dur dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi tersebut sebenarnya memberikan arti bahwa banyak masyarakat Indonesia yang rindu akan sosok Gus Dur. Gus Dur memang tidak mungkin akan bisa hidup kembali secara fisik. Namun, nilai, sifat, semangat, dan bahkan pendekatan yang dimiliki oleh Gus Dur dapat hidup kembali. Berbicara mengenai sosok Gus Dur tentu tidak akan lepas dari dua hal yaitu tentang nilai dan pendekatan. Walaupun ada hal lain yang mungkin hampir setiap penggemar Gus Dur tahu, yaitu humor *ala* Gus Dur yang begitu khas, spontan, dan bermakna.

Membahas tentang nilai yang ada dalam Gus Dur, setidaknya ada tiga nilai yang dianut oleh Gus Dur yaitu tentang Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan. Nilai tersebut dalam praktiknya sering dilakukan dengan pendekatan yang *non legal formal*, progresif dan revolusioner. Nilai Keislaman atau nilai agama yang dipegang oleh Gus Dur yaitu tentang substansi. Gus Dur dalam memandang agama tidak terfokus melihat dari bentuk. Gus Dur melihat agama lebih pada menekankan aspek substansi (hakikat). Hal ini misalnya terlihat betul pada diri Gus Dur yang sering melantunkan syair "Tanpa Waton". Begitu juga dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam agama yang lebih mengedepankan pada substansi. Pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur dalam menerapkan nilai tersebut cenderung progresif. Tidak heran jika kemudian Gus Dur banyak dianggap menimbulkan pro dan kontra

karena lebih mementingkan substansi. Namun, nilai inilah yang sebenarnya lebih penting untuk dilaksanakan sehingga dalam menjalankan agama menjadi ringan dan tidak membebani. Karena memang pada dasarnya beragama bukan untuk membebani.

Nilai keindonesiaan yang ada pada diri Gus Dur juga merupakan nilai yang progresif dan revolusioner. Penerapan nilai keindonesiaan pada diri Gus Dur dapat kita lihat saat Gus Dur menjadi Presiden RI. Banyak kebijakan Gus Dur yang dianggap progresif dan revolusioner. Namun, banyak juga yang menganggap kebijakan Gus Dur bersifat "*nyleneh*". Misalnya, kebijakan Gus Dur yang sangat kontroversial yaitu tentang pembubaran Departemen Sosial (Depsos). Gus Dur dalam salah satu *talk show* Kick Andy pernah ditanya oleh Andy F. Noya tentang alasan Gus Dur membubarkan Depsos. Gus Dur dengan tenang menjawab bahwa di Depsos yang seharusnya menyejahterakan rakyat, tetapi korupsinya "*gede-gede*". Andy F. Noya pun membalas dengan mengumpamakan bahwa membunuh tikus tentu tidak harus membakar lumbung padi. Gus Dur dengan enteng menjawab bahwa benar membunuh tikus tidak harus membakar lumbung, tetapi kalau tikusnya sudah menguasai lumbung, ya lumbungnya dibakar sekalian. Jawaban *joke* Gus Dur tersebut tentu membuat kita tertawa terbahak-bahak. Namun, dari sudut pandang ketatanegaraan tentu sudah tepat. Mengingat pendirian lembaga atau institusi negara bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Jika institusi negara tidak mampu menyejahterakan masyarakat, lebih baik dihilangkan saja. Itu salah satu contoh dan masih banyak kebijakan-kebijakan Gus Dur dalam rangka menerapkan nilai keindonesiaan selama menjadi Presiden RI.

Setelah tidak menjadi Presiden RI, Gus Dur menyuarakan pendapat tentang penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pronografi. Gus Dur menyatakan setuju penolakan pornografi tetapi menolak undang-undang yang mengatur. Karena bagi Gus Dur, pornografi adalah urusan masyarakat dan undang-undang adalah urusan negara. Urusan masyarakat tentu lebih baik diurus masyarakat, karena peranan

masyarakat dalam kehidupan juga penting. Posisi Gus Dur yang seperti itu tentu sangat tepat jika dilihat dari perspektif konsep negara dan hak asasi manusia. Lahirnya negara adalah dengan tujuan untuk melindungi dan menyejahterakan warga negara (rakyat), bukan untuk masuk dalam urusan yang dapat diurus oleh masyarakat. Negara jangan terlalu jauh terlibat urusan masyarakat yang dapat diurus oleh masyarakat sendiri terlebih menyangkut privasi individu. Negara lebih baik mengurusi permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh rakyat seperti keadilan dan kesejahteraan.

Tindakan-tindakan Gus Dur tersebut dapat dimaknai "*nyleneh*" karena berbeda dengan kebiasaan pada umumnya. Namun, sikap atau tidakan Gus Dur tersebut dapat dikatakan lebih cenderung menggunakan pendekatan yang *non legal formal*, progresif dan revolusioner. *Non legal formal* artinya tidak *rigid* (kaku) terhadap aturan atau prosedur yang ada. Progresif berarti mempunyai pemikiran kedepan yang melampaui kebiasaan saat ini. Revolusioner dapat dimaknai mampu mengubah suatu hal secara cepat, seperti membubarkan Depsos.

Nilai selanjutnya yang dipegang dan dilaksanakan oleh Gus Dur adalah nilai Kemanusiaan. Nilai ini sesungguhnya mengedepankan pada aspek universalitas dan hak asasi manusia. Gus Dur telah menerapkan nilai kemanusiaan secara paripurna. Bahkan Gus Dur dalam pernyataan yang mengadung makna besar menyatakan bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Pernyataan tersebut telah memosisikan kemanusiaan berada pada level yang tinggi. Nilai kemanusiaan yang ada pada Gus Dur telah diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, saat menjadi Presiden RI, Gus Dur sangat melindungi dan mengayomi kelompok minoritas. Bahkan, Gus Dur terang-terangan memerangi diksriminasi terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Sikap Gus Dur yang toleran dan anti diskriminasi tersebut membuat Gus Dur dekat dan bahkan dikagumi oleh kelompok minoritas.

Akhirnya, atas keterbatasan tulisan ini penulis ingin mengakhiri dengan pertanyaan sudahkan kita siap menghidupkan nilai-nilai dan pendekatan yang ada pada Gus Dur? Kita memang mungkin tidak bisa seperti Gus Dur, tetapi berupaya untuk meneladani dan menerapkan universalitas nilai dan pendekatan Gus Dur merupakan suatu keniscayaan.

TA'ARUF & BEDAH BUKU
ISLAM DEMOKRASI ATAS BAWAH
Polemik Strategi Perjuangan Umat Model
Gus Dur & Amien Rais
PMII

GUS DUR, HUMOR KRITIS, DAN KIPRAH KEMANUSIAAN

Abdul Mukhlis
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Gitu aja kok repot! Barangkali jargon tersebut adalah ungkapan paling tepat sebagai mukadimah pada memoar singkat ini. Meski empunya sudah berpulang pada akhir 2009 silam, jargon ini ternyata begitu populer. Saya ingat betul ketika sedang *ngeronda* rutin di kampung, seorang tetangga pernah berujar persis seperti jargon itu. Saya bertanya, apa sebab dia berujar demikian, saya sedikit kaget. Katanya, "*Mikir kuwi ojo sing abot-abot ndhisik. Urut, sing gampang-gampang nembe sing ruwet. Ngono wae kok repot*!" ujar tetangga saya ini dipungkasi dengan *bahak*/gelak tawa. Kalau saya terjemahkan kurang lebih begini, "Berpikir itu jangan yang berat-berat dulu. Berurutan, yang mudah didahulukan, baru yang sulit kemudian. Begitu saja kok repot!" Saya *nyengir* mendengar argumennya.

Memang betul, dalam konstruk dunia berpikir, kita sudah diajari bagaimana hierarki bernalar yang benar sejak tingkat dasar; dari sederhana menuju kompleks. Namun, sesungguhnya bukan jawaban itu yang menjadi soal, melainkan partikel berupa klausa -*gitu aja kok repot*-nya itulah yang jadi sorotan utama. Ada apa sebenarnya sampai-sampai jargon ini masuk dalam kehidupan masyarakat yang sedang meronda malam? Mengapa bukan jargon-jargon lain saja yang bernada sejenis? Lantas, seberapa penting atau sedemikian *urgent*-kah jargon tersebut bagi

masyarakat arus bawah sehingga bisa "hidup" di tengah masyarakat? Kalau kita punya *research sensitivity* yang tinggi, pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu bisa menjadi penuntun kajian ilmiah maupun analisis ringan atas jargon -*gitu aja kok repot*-.

Jargon -*gitu aja kok repot*- dan jokes-jokes Gus Dur lain yang jumlahnya masih banyak itu adalah warisan beliau yang akan selalu abadi, tentunya selain pemikiran humanisnya pula. Kita bisa uji hipotesis itu dengan sederhana saja. Misalnya, masih banyakkah yang memanfaatkan *quotes* dari beliau untuk dijadikan *story* di lini masa yang banyak dimiliki oleh orang-orang kekinian? Atau bisa saja kita menemukan warisan beliau itu pada petikan-petikan naskah pidato, pun percakapan langsung yang sering didengar sehari-hari. Atau mungkin lebih ekstrem lagi, adakah yang menjadikan *quotes* maupun artefak pemikiran beliau sebagai inspirasi hidup untuk meredam konflik pribadi juga golongan? Pada titik ini, kita patut bersyukur kalau masih banyak yang menjawab normatif. Namun, kita harus segera pasang alarm jika jawabannya minor. Sebab saya meyakini, orang yang tidak menyukai humor, ia termasuk pribadi yang kering hati, akal, juga pikirannya.

Jargon atau jokes yang dalam tulisan ini disepakati sebagai humor Gus Dur, selain memantik tawa juga mendorong pikiran manusia untuk dimaksimalkan penggunaannya. Setiap pribadi yang meminjam atau mereproduksi humor Gus Dur dalam percakapan, tentu tidak diniati sebagai sebuah keisengan belaka. Pasti ada alasan-alasan kuat yang melatari itu. Sumarlam dalam buku *Teori dan Praktik Analisis Wacana* (2008: 47) misalnya memberi gambaran, pribadi yang menggunakan wacana humor dalam sebuah peristiwa tutur, biasanya didorong oleh suatu konteks, baik bahasa maupun luar bahasa. Menilik dari penjelasan singkat itu, kita bisa menangkap bahwa konteks wacana menjadi faktor terkuat atas kognisi seseorang ketika melemparkan humor kepada mitra tutur.

Ziarah via Humor Kritis

Saya pikir, *jokes-jokes* yang diproduksi oleh Gus Dur itu lebih dari sekadar humor umum. *Jokes-jokes*nya punya "daya" yang kapan waktu bisa memantik pikiran kritis siapa saja. Kalau dalam kacamata linguistik, *genre* humor Gus Dur ini masuk pada kategori anekdot. Fitur khusus berupa lelucon, sindiran, dan kritikan, menjadi pembeda antara anekdot dengan humor meski keduanya sekilas identik. Humor, kehadirannya tidak cukup untuk dijadikan sebagai bahan mengkritik atau menyampaikan ketaksepakatan situasional. Karena itu, tidak salah jika *jokes-jokes* Gus Dur punya level lebih tinggi dibanding *genre* humor lain yang sejenis.

Mengetengahkan humor kritis dalam peristiwa tutur adalah upaya dari jiwa-jiwa pengagum estetika. Manusia estetik, saat ini atau barangkali di masa depan, punya peluang menjadi populasi pemenang peradaban. Dengan catatan, mampu mengolaborasikan jenis-jenis kecerdasan menjadi seperangkat keterampilan yang integratif. Saya punya sedikit gambaran akan hal demikian. Bayangkan seandainya ada guru Matematika yang mampu memadupadankan macam-macam kecerdasan, misalnya kecerdasan verbal-linguistik dengan logika-matematika, lalu ditambah kecerdasan estetika. Sudah barang tentu, kegiatan berhitung yang termaktub dalam pelajaran Matematika, tidak melulu jadi momok bagi sejumlah pelajar di tingkat dasar sampai tingkat atas. Atau barangkali saya alihkan bidikannya pada peran guru. Pasti juga akan minim komentar pelajar yang menilai guru-gurunya tak cakap menjabarkan penjelasan ilmiah setiap mata ajar yang rumit itu. Mungkin bisa pula, para peserta didik yang diajar akan betah berlama-lama dengan sosok guru yang punya kemampuan majemuk semacam itu. Demikian inilah jamak kita sebut sebagai melahirkan nalar kritis yang estetik.

Mengingat kembali humor-humor Gus Dur, sejauh ini bagi saya pribadi berekuivalensi dengan metode bernalar kritis. Untuk bisa memahami *jokes-jokes* beliau, manusia mesti punya pandangan yang luas

agar tidak terperosok pada jurang dikotomi antara hitam dan putih. Humor beliau ini ibarat hujan di tengah musim kemarau. Kehadirannya menjadi penawar bagi hati, akal, juga pikiran yang sedang mengalami kekeringan panjang.

Relasi Humanisme

Meminjam analisis Piet H. Khaidir dalam *Nalar Kemanuisaan Nalar Perubahan Sosial* (2006: xvii), tokoh maupun aktivis perubahan sosial punya kesiapan matang yang tidak sekadar menciptakan riak atau buih untuk perubahan semata, melainkan juga *telaten* melahirkan gelombang transformasi untuk tujuan kemanusiaan. Gus Dur, selain gemar berkelakar kritis, juga seorang pejuang kemanusiaan sejati. Baginya, asas kemanusiaan itu terletak di atas segalanya. Bagaimana tidak, di tengah hegemoni mayoritas umat Islam yang begitu masif di Indonesia, beliau tampil heroik dengan tetap memperhatikan nasib kaum marjinal dan minoritas.

Kita bisa menilik langkah humanisme Gus Dur dalam meredam persoalan ketika beliau masih menjabat sebagai presiden. Konflik disintegrasi bangsa di beberapa wilayah pada waktu itu, berhasil dipadamkan dengan pendekatan yang muaranya adalah humanisme. Kalau biasanya pemimpin-pemimpin terdahulu mengambil langkah militeristik guna menghadapi rakyat, Gus Dur tampil beda. Beliau berhasil mendekonstruksi cara-cara tradisional menjadi bentuk yang segar; negosiasi.

Sementara itu, memahami persoalan kemanusiaan kalau kita *mafhumi* bersama hari-hari ini, memunculkan tren baru semacam gerakan kesadaran kolektif. Barangkali kesadaran itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Gus Dur dalam langkah-langkah pergerakannya. Kesadaran kolektif bernuansa kemanusiaan yang digagas Gus Dur ini, seharusnya juga menjadi spirit bagi manusia-manusia modern dalam mengarus-utamakan misi kemanusiaan, termasuk civitas kampus. Semoga!

GUS DUR, SALAFISME, DAN DILEMA ORTODOKSI BERAGAMA

Ahmad Khotim Muzakka
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dalam kata pengantarnya untuk *Ilusi Negara Islam* (2009), KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah memberikan penjelasan tentang eksistensi beberapa organisasi masyarakat yang tidak sejalan dengan para tokoh nasionalis-religius dalam mempertahankan bangunan kebangsaan NKRI. Bagi Gus Dur, orang-orang yang mampu menerima perbedaan kemajemukan adalah pribadi-pribadi yang terus berupaya berkontribusi pada kemanfaatan publik, yang disebut masuk dalam kategori jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthmainnah*).

Berbeda dengan *al-nafs al-muthmainnah* tersebut, beberapa organisasi masyarakat, di antaranya Gus Dur menyebut Darul Islam, berupaya mengubah negara bangsa menjadi negara agama, mengganti ideologi negara Pancasila dengan gagasan Islam versi mereka untuk kemudian menjadikan *khilafah Islamiyah* sebagai penggantinya. *Wanti-wanti* Gus Dur ini tidak terlepas dari upaya aktivis garis keras yang terus berjuang mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Dalam tahap ini, siapapun yang berbeda pandangan keagamaan dengan mereka akan dianggap melawan Islam versi mereka sendiri.

Pada saat yang bersamaan, mereka juga menolak *anasir* budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan bangsa Indonesia dan berupaya menjadikan budaya dan tradisi Timur Tengah

sebagai opsi pengganti hanya dikarenakan ketidakmampuan membedakan agama dari kultur tempat Islam diwahyukan. Penolakan atas *anasir* budaya lokal ini dapat berimbas pada penerimaan terhadap gagasan kenegaraan dan instrumen yang membangun negara tersebut termasuk di dalamnya konsep negara demokrasi dan turunannya.

Ortodoksi keagamaan Islam transnasional di Indonesia ini tidak bisa dibiarkan melenggang seenaknya sendiri menentukan nasib keberagama(a)n Indonesia. Kita tidak sepatutnya berdiam diri mematung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kewaspadaan mesti dibangun di level individu semua warga negara yang tentunya perlu disokong oleh organisasi keagamaan yang telah lama berkomitmen untuk kemajuan bangsa dan negara. Bagi mereka yang masih ragu perlu dirangkul dan disadarkan bahwa gerakan dan ideologi yang mereka perjuangkan tidak senafas dengan perjuangan pluralitas bangsa Indonesia, yang dalam waktu bersamaan menghargai perbedaan itu sendiri.

Muara Teror

Ditangkapnya Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah oleh Densus 88 karena diduga terlibat dalam aksi terorisme sebenarnya tidak terlalu mengejutkan lantaran MUI sudah lama mendapat sorotan terkait sikap dan respons atas berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi di Indonesia. Pandangan ini setidaknya dikonfirmasi oleh Moch Nur Ichwan dalam tulisannya bertajuk "*Toward A Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and The Politics of Religious Ortodoxy*" (2013).

Menurut Moh Nur Ichwan, pasca pemerintahan Suharto, Majelis Ulama Indonesia melakukan transformasi menjadi orientasi ke-Umat-an. Berdasarkan orientasi ini juga MUI dianggap lebih cenderung mencerminkan aspek Islam Puritan di tengah fakta Islam Indonesia. Gejala keagamaan ini yang oleh Martin van Bruinessen disebut sebagai "conservative turn", yakni gejala keagamaan (sebagian) muslim yang mengartikulasikan paham keislamannya mengarah pada konservatisme.

Hal ini dikarenakan Islam moderat yang puritan sekalipun berpeluang mengarah pada Islam radikal yang puritan. Atas dasar itu pula, ditangkapnya anggota MUI seperti mengkonfirmasi kemungkinan tersebut. Apalagi, sebagai organisasi yang menjadi rujukan umat Islam di Indonesia dalam hal fatwa, MUI tidak terlepas dari kontestasi berbagai macam pemikiran di dalamnya, antara lain tradisionalis, modernis, puritan, dan radikal.

Noorhaidi Hasan dalam artikelnya "Transnational Islam, Violent Activism, and Cultural Resistence" (2018: 246) menggambarkan bahwa terjadinya intensifikasi globalisasi membuat Indonesia mudah terimbas gagasan Islam transnasional, yakni gerakan yang secara agresif mempropagandakan pemurnian pemamahan keagamaan yang *rigid* sebagai "anak kandung" *salafisme*. Meskipun secara umum, muslim Indonesia dikenal karena jalan akomodatif dan toleransinya yang ditempuh terhadap lokalitas dan keberagaman.

Salafisme, yang secara genealogis dapat dilacak terinspirasi gagasan pemurnian Islam yang digagas oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab lebih berfokus pada penguatan keimanan dan moralitas, bermuara pada pemikiran para pendahulunya, antara lain Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Taymiyya, dan Ibn Qayyim al-Jawziy. Dalam perkembangannya, salafisme terbagi menjadi tiga kelompok, pertama; *purists*, yang sangat berfokus pada pemurnian Islam dan menolak aktivisme politik, kedua; *politicos*, yang politis dan mengkritik rezim penguasa, dan ketiga; *jihadits*, yang berkeyakinan mengenai urgensi Jihad untuk memperjuangkan Islam.

Membuka Peta

Pasca lengsernya rezim Soeharto, perhatian publik Indonesia dikejutkan dengan aktivitas salafisme yang mulai dikaitkan dengan jihadisme yang bengis. Dalam lintasan sejarah tercatat, sebagaimana dijelaskan oleh Noorhaidi, aktivisme jihad tersebut diwujudkan ketika Ja'far Umar Thalib membentuk Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal

Jama'ah pada 1999 dan mendorong resolusi muslim Indonesia untuk berjihad di Maluku, yang berjibaku dengan konflik komunal antara Kristen lokal dan Muslim. Tercatat sebanyak lebih dari 7.000 pejuang berangkat ke Maluku untuk menunaikan aksi jihadnya. Dalam gerakan ini, Laskar Jihad dan Laskar Mujadihin—yang terhubung dengan Darul Islam dan Jama'ah Islamiyah—memobilisasi masa untuk bergabung ke Maluku.

Sebagai kelompok *salafisme* terkuat dalam lanskap politik Indonesia pasca-Soeharto, tertangkapnya anggota Jamaah Islamiyah ini menandai babak baru jihadisme kelompok ini. Adalah bahwa kelompok yang memiliki pertautan historis dengan *Darul Islam* ini semakin menegaskan eksistensinya yang dibuktikan dengan kemampuannya melampaui batas budaya dan politik yang mapan dan berhasil menembus lingkungan baru. Tidak mengherankan jika Jamaah Islamiyah dianggap sebagai kelompok yang paling gencar menaburkan ideologi jihadi salafi di nusantara.

Keterkaitan Zain an-Najah sebagai Dewan Syura Jamaah Islamiyah (JI) tentu membuka peta ideologi jihadi salafi yang ternyata mampu menembus ruang kultural dan struktural yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ruang keagamaan di Indonesia. Tentu, hal ini menjelma dilema bagi keberagamaan kita, mengingat bahwa MUI memerankan peran cukup vital dalam arus diskursif wacana agama, di samping dua organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Infiltrasi anggota JI ke tubuh MUI ini menjadi bukti sahih bahwa mereka sanggup melampaui batas budaya dan politik serta dapat merasuk dalam organisasi yang jauh lebih mapan dan memiliki pengaruh dalam lanskap kebudayaan dan keagamaan di Indonesia. Dengan demikian, sudah sudah seharusnya, berkaca dari penangkapan ini mestinya bisa membunyikan alarm kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya ideologisasi jihadis transnasional karena dapat mengancam masa depan wajah kebudayaan Indonesia.

MEMBEDAH VISI KEILMUAN UIN ABDURRAHMAN WAHID: KEMANUSIAAN, KEINDONESIAAN, KEISLAMAN

Nanang Hasan Susanto
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Saat ini, IAIN Pekalongan sedang mempersiapkan diri menuju UIN. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk membangun visi keilmuan. Sebagai sebuah perguruan tinggi, visi keilmuan tentu menempati posisi signifikan bagi perkembangan UIN Pekalongan ke depan. Hal ini berangkat dari amanat perguruan tinggi sebagai lembaga akademik yang diharapkan menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

Pada berbagai kesempatan, IAIN Pekalongan mewacanakan nama Abdurrahman Wahid sebagai nama kelembagaan UIN. Abdurrahman Wahid (baca: Gus Dur) sendiri merupakan tokoh penting yang cukup mewarnai perjalanan Bangsa Indonesia. Disamping pernah menjabat sebagai Presiden, Gus Dur juga memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia (NU), pada rentang waktu yang cukup lama, yakni tahun 1984 hingga 1999. Menurut Fogg, Indonesia merupakan Negara yang cukup kental dengan peran Ormas (Fogg: 2018). Dengan demikian, posisi sebagai ketua umum Ormas terbesar di Indonesia pada rentang waktu yang cukup lama, mengukuhkan keberadaan Gus Dur sebagai tokoh penting di Indonesia pada akhir abad XX.

Kiprah Gus Dur bagi Indonesia terlihat dari peran multi yang dimainkannya. Di samping dikenal sebagai Kiai (*religious leader*), Gus Dur

juga berperan sebagai politisi, tokoh masyarakat, dan tokoh intelektual. Terkait dengan peran sebagai tokoh intelektual, Barton menyebut Gus Dur dan Nurcholish Madjid sebagai pemikir Indonesia paling berpengaruh dalam mempertemukan tradisi dan modernisme, menjadi pemikiran neo modernis (Barton, 1997).

Pada titik tertentu, peran multi yang dimainkan Gus Dur berpotensi melipatgandakan pengaruh yang ditimbulkan bagi bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Salah satu contoh yang bisa disebutkan adalah adanya transformasi di tubuh NU. Jika pada era awal kemerdekaan, NU merupakan salah satu ormas yang mendukung pendirian Negara Islam, tetapi setelah Muktamar di Situbondo tahun 1984 hingga sekarang, NU konsisten menyuarakan slogan Pancasila sudah final.

Mungkin terlalu berlebihan jika dikatakan adanya perubahan sikap terkait relasi Islam dan Negara di tubuh NU, karena figur Gus Dur. Meskipun begitu, tidak terlau berlebihan jika dikatakan, bahwa Gus Dur adalah figur penting dibalik perubahan sikap tersebut. Pemikiran Pluralisme Gus Dur yang diakui oleh banyak kalangan, nampaknya sedikit banyak mempengaruhi pemikiran bahkan Gerakan NU. Terlebih lagi Gus Dur merupakan anak pertama (Wachid Hasyim), dari anak pertama pendiri NU (Hasyim Asy'ari). Bagi NU, yang basis massanya adalah pesantren, budaya feodal yang melihat ketokohan seseorang berdasarkan keturunan masih terasa. Inilah nampaknya yang membuat pemikiran Gus Dur cukup efektif dalam memengaruhi warga Nahdliyin.

Sebuah universitas yang menggunakan nama Abdurrahman Wahid memiliki beban serta tanggung jawab untuk memahami secara utuh pemikiran sekaligus perjuangannya. Salah satu poin pemikiran sekaligus gerakan Gus Dur adalah pluralisme. Begitu kuatnya semangat pluralisme pada diri Gus Dur, membuat banyak kalangan, termasuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyebutnya "Bapak Pluralisme". Semangat pluralisme Gus Dur terlihat pada keberpihakannya pada kaum lemah (tertindas). Misalnya saja pembelaan

terhadap etnis Tionghoa, agama lokal (penghayat), Syi'ah dan Ahmadiyah, serta usulan pencabutan larangan penyebaran ajaran marxisme, komunisme dan leninisme.

Berbagai isu yang diangkat Gus Dur terkait pembelaan terhadap kaum lemah merupakan isu yang strategis jika ditangkap oleh sebuah universitas. Karena, pembelaan terhadap kaum lemah (baca: isu kemanusiaan), merupakan isu universal yang menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Berbagai lembaga yang bergerak di isu itu juga cukup banyak. Berbagai litertur yang menjadi rujukan untuk menganalisis berbagai isu kemanusiaan juga melimpah. Namun demikian, berlayar dengan sungguh-sungguh pada isu kemanusiaan bukanlah tanpa resiko. Di samping harus sungguh-sungguh bergumul dengan realitas kehidupan, resistensi yang dihadapi tidaklah sederhana. Meskipun hampir semua kalangan mengaku peduli terhadap isu kemanusiaan, tetapi prakteknya, tidak sedikit di antara mereka yang "mata pencahariannya" berlawanan dengan semangat kemanusiaan. Oleh karena itu, menggunakan isu kemanusiaan, berpotensi akan berhadapan dengan pihak-pihak yang kepentingannya terancam.

Tantangan paling besar untuk menggunakan isu kemanusiaan pada tataran perguruan tinggi, justru berada pada wilayah internal. Berdasarkan investigasi Tempo, perguruan tinggi di Indonesia lebih banyak mengejar peringkat ketimbang kualitas (Tempo: 2021). Tulisan Zuly Qodir di Kompas berjudul "kemunafikan dan prostitusi akademik", tanggal 17 Januari 2022, masih satu tarikan nafas dengan laporan Tempo. Intinya, kampus disibukkan dengan aturan birokrasi, sehingga mengindahkan tugas utamanya, sebagai agen perubahan sosial.

Keberadaan perguruan tinggi sebagai lembaga birokrasi berpotensi menggeser aspek akademis, menjadi birokratis. Dengan demikian, terkait dengan isu kemanusiaan, perguruan tinggi yang mengusung isu ini bisa jadi hanya berhenti pada tataran formalitas. Bukannya memberi kontribusi pada aspek kemanusiaan, perguruan tinggi mengedepankan aspek birokrasi dan formalitas, bisa jadi menjadi salah satu bagian dari

problem kemanusiaan itu sendiri. Padahal, perguruan tinggi dibekali modal sosial dan material yang cukup untuk fokus pada isu kemanusiaan. Belum lagi berbagai kerjasama yang bisa dilakukan dengan banyak kalangan yang *concern* pada isu "seksi" ini.

Tantangan selanjutnya dalam menjalankan isu kemanusiaan adalah nama kelembagaan. UIN sebagai nama perguruan tinggi, tidak bisa melepaskan diri dari identitas keislaman. Penekanan yang tinggi pada identitas agama (Islam), berpotensi mengalihkan aspek substansi. Aspek benar dan salah hanya diukur dari kepercayaan (iman). Seseorang yang memiliki "kepercayaan" yang benar, akan selalu benar, sebaliknya, orang "kafir" akan selalu salah. Karena identitas agama, berbagai kajian akademis, susah melepaskan sepenuhnya dari aspek doktrin.

Tantangan identitas keislaman ini bukannya mereda, tetapi justru menguat pasca meninggalnya Gus Dur. Berdasarkan survey LSI, keinginan publik terhadap penerapan Negara bersyari'ah terus meningkat. Pada tahun 2005, publik yang menghendaki penerapan Syari'at Islam sebanyak 4,6 %. Angka ini meningkat menjadi 7,3 % pada tahun 2010. Pada tahun 2015 kembali meningkat jadi 9,8 %, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 13,2 %. Selain itu, beberapa Lembaga riset seperti PPIM, LaKIP dan Setara Institut juga menyebut maraknya, pemahaman Islam yang cenderung eksklusif dan radikal di kalangan pelajar dan guru di Indonesia.

Nampaknya, Gus Dur merasakan tantangan berat yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi kemanusiaannya. Berbagai pemikirannya kerap berupaya melawan "kekangan identitas" tersebut. Misalnya saja karyanya berjudul "Tuhan tidak perlu dibela", atau slogan pribumisasi Islam. Untuk pribumisasi Islam, Gus Dur seolah ingin menyampaikan, bahwa aspek identitas keagamaan, tidak boleh menghilangkan jati diri keindonesiaan.

Dengan demikian, jika IAIN Pekalongan akan mengusung Abdurrahman Wahid sebagai nama UIN, maka harus berhati-hati dengan identitas keislaman. Karena, secara substantif, yang

diperjuangkan Gus Dur adalah aspek kemanusiaan, termasuk di dalamnya adalah keindonesiaan, bukan identitas keislaman. Bahkan, upaya untuk meredam identitas keislaman yang berlebihan (baca: Islam radikal), merupakan salah satu poin perjuangan Gus Dur itu sendiri, yang bisa ditangkap oleh UIN Abdurrahman Wahid.

SCTV

SANG TOLERAN ITU BERNAMA ABDURRAHMAN AD DAKHIL

Ahmad Taufiq
Dosen Pascasarjana
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Gus Dur berasal dari keluarga yang tergolong campuran 'darah biru' dan ulama khususnya di pulau Jawa ini. Gus adalah panggilan bagi anak kiai sebagai bentuk penghormatan dan mempunyai makna bagus, Cucu KH. Hasyim Asy'ari sekaligus pendiri NU (Nahdlatul Ulama') yang bernama lengkap Abdurrahman ad Dakhil, kiai kelahiran Jombang, 7 September 1940 ini pernah menjabat sebagai presiden Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1999-2001, beliau selain sosok kiai, juga merupakan tokoh politisi, juga sebagai akademisi. Putra dari KH. Wahid Hasyim dan ibu Hj. Sholehah Putri KH. Bisri Syansuri, setelah mengalami perjalanan intelektual yang tidak sedikit sehingga dapat mengangkat kaum sarungan ke permukaan yang pemikiranya tak pernah ketinggalan bahkan melebihi masanya, lokomotif yang selalu nomer *wahid*. Pendidikan yang beliau tempuh adalah a) Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang (1957-1959), kemudian b) Pondok Pesantren Muallimat bahrul Ulum, Jombang (1959-1963), c) Pondok Pesantren Krapyak, d) Universitas Al Azhar, Kairo Mesir (1963) e) Fakultas Sastra Universitas Baghdad (1966), dan masih banyak lagi pendidikan Gus Dur.

Sebagai Presiden keempat gus Dur menjadi contoh konkrit perekat bangsa, walaupun politik pada saat itu semrawut, sebagaimana

pada buku perjalanan politik Gusdur. Teringat pesan beliau ketika beliau dilengserkan dari kursi kepresidenan "*jangan rusak persaudaraan hanya karena kekuasaan*" dari sinilah bisa belajar bahwasanya kekuasaan itu adalah *position power* yang tidak perlu diperebutkan apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Dalam hal yang demikian ini, berbicara dan memahami arti dari toleransi menjadi kebutuhan yang sangat perlu dimiliki oleh masyarakat plural yang harus dilaksanakan agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak mengalami disintegrasi Negara Indonesia

Sikap bertoleransi tidak memiliki batasan waktu, zaman, dan kepada siapa orangnya kita mengaplikasikanya, tetapi toleransi harus dilakukan kepada semua orang tanpa memandang ras, agama dan budaya. Ini adalah bagian dari esensi budaya dan karakteristik sebagai tonggak sebuah bangsa, dan mengkontekstualkan teks dalam toleransi sehingga terealisasi dalam kehidupan. Toleransi sering dibicarakan oleh masyarakat yang plural, toleransi yang dalam hal ini dimaknai memberi tempat kepada orang lain, walaupun terkadang kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat. Toleransi bisa juga diartikan pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau masyarakat yang berbeda dengan dirinya untuk menjalankan keyakinanya dan mengatur hidupnya, dipaparkan pula dalam hadits terkait dengan tolerasi :

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَنِيفِيّةُ السّمْحَةُ.

> Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; ditanyakan kepada Rasulullah saw. "*Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah*?" maka beliau bersabda: "*Al-Hanifiyyah As-Samhah* (yang lurus lagi toleran)"

Kualitas Gus Dur sebagai seorang ilmuwan sangat diakui dan tidak ada yang menolak bahwa Gus Dur adalah *sang toleran*, sebagaimana diungkapkan KH. Husein Muhammad bahwasanya "*Wawasan Gus Dur sangat luar biasa. Mengagumkan, fikirann-fikiranya melampaui zamanya, Gus Dur telah membaca banyak sekali ilmu pengetahuan, bukan hanya yang terdapat dalam kitab-kitab kuning, tetapi juga karya-karya intelektual dunia*" dalam

buku Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab. terbukti beberapa penghargaan kepada beliau sebagaimana mendapatkan perhargaan dari *Global Tolerance Award, Friends of the United Nation New York*, Amerika pada tahun 2003, sebagai tokoh pluralisme oleh Simon Wiesenthal Centee pada tahun 2008. Sebagai seorang muslim, gagasan toleransi Abdurahman Wahid tidak terlepas dari dimensi normatif dalam Islam yang tertuang dalam ayat berikut: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" yang dikatakan gusdur pula bahwasanya "*Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstrimis memutarbalikanya, yang kita butuhkan adalah islam yang ramah bukan Islam yang marah, kemajmukan harus bisa diterima, tanpa adanya perbedaan*"

Sifat toleran sering diaplikasikan dalam model kepemimpinan beliau tidak hanya beliau utarakan dalam lisan saja, akan tetapi Gus Dur aplikasikan dalam kehidupan sehari hari. Dengan gaya kepemimpinan toleran ini Gus Dur menjadi lebih hikmat dalam menghadapi kenyataan selama beliau memimpin Negara ini, pemikiran ini terlihat dalam tulisan beliau "bangsa ini akan kokoh bila umat agama-agama yang berbeda pendapat saling mengerti satu sama lain, bukan hanya sekedar saling menghormati, yang diperlukan saat ini adalah rasa saling memiliki (*sense of belonging*), bukanya hanya saling bertenggangrasa satu terhadap yang lain" ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk menghadapi problematika terkait dengan intoleransi antar umat beragama.

Beberapa contoh intoleran yang ada pada tahun 2020, ketika jamaat Huria Kristen Batak Protestan di kota Serang Baru yang pada saat itu dirusuhi pada saat beribadah pada tanggal 13 September, kemudian disusul oleh sekelompok warga Graha Prima Jonggol yang menolak ibadah jemaat Gereja Pantek kota Bogor, kemudian kasus di Nganjuk pada tanggal 2 Oktober yang melarang beribadah pada jemaat Rumah Doa Gereja GSJA Kanaan. Ada beberapa contoh yang menjadi dasar toleransi pada masa Gus Dur terkait dengan agama Konghucu yang berkembang di Indonesia tanpa ada kekangan terkait dengan kebijakan

menghapus surat bukti kewarganegaraan RI dan tidak ada lagi sekat-sekat hukum antara pribumi dan non-pribumi. Selain itu, Gus Dur juga melakukan perlindungan kaum minoritas yang memeluk agama di luar kelompok-kelompok aliran besar agama-agama di Indonesia.

Meskipun Gus Dur telah tiada, tetapi terkait pemikiran, karya-karya dan jasanya akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia, Gus Dur benar-benar pengamal agama yang sebenarnya tidak sebatas teoretis dengan mempraktikan *maqashid al khamsah*, yaitu 1) Memelihara agama (*Hifdz ad Diin*), 2) Memelihara jiwa (*Hifz an Nafs*), 3) Memelihara Akal (*Hifdz al Aql*), 4) Memelihara keturunan (*Hifdz an Nasl*), 5) Memelihara harta (*Hifdz al mal*). Penulis akhiri dengan *ngendikane* Gus Dur "*Jangan memperjuangkan formalisasi hokum Islam itu hanya untuk penganut Islam, Jadikan Islam itu sebagai ruh atau substansi. Sekulerisasi jangan dibiarkan, tapi Islam juga jangan membuat orang menjadi terancam dan membuat orang lain takut, ajarkan Islam dengan pendekatan cultural, bukan dari pendekatan atas atau formal, jadikan Islam bisa diterima kelompok lain*". Gus Dur sebagai pahlawan Nasional yang selalu tetap ada di hati manusia, selain beliau juga menjadi pahlawan toleransi. *Sugeng tindak* Gus Dur.

MERDEKA BELAJAR ALA GUS DUR

Mochammad Najmul Afad
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Sekitar tahun 2020, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan sebuah kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Merdeka Belajar. Pada ranah kampus, kurikulum ini mengguanakan istilah "Merdeka Belajar Kampus Merdeka". Kurikulum yang memberikan seluas-luasnya kebebesan mahasiswa atau peserta didik untuk belajar di manapun dengan siapapun dengan konsep yang diusung oleh Menteri Pendidikan pertama yakni Ki Hajar Dewantara "Semua adalah Guru dan Semua adalah Murid".

Kurikulum ini konon kabarnya memberikan angin segar bagi semua pihak kampus agar bisa lebih dekat dengan masyarakat. Setidaknya terdapat delapan paket bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yakni pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/ institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Berpijak dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut, saya teringat sebuah cerita tentang sosok kaum santri yang nyentrik dalam hidupnya termasuk dalam proses belajarnya yakni KH. Abdurrahman Wahid. Dari beberapa sumber yang saya temukan, Gus

Dur pernah belajar ke Kairo bersama teman *seletingnya* yakni KH. Mustofa Bisri atau akrab dipanggil Gus Mus. Namun sayangnya, Gus Dur di sana bukan menyelesaikan bangku kuliahnya melainkan ia berjalan-jalan, bekerja dan tidak meninggalkan kebiasaannya yakni membaca buku.

Di usia mudanya, usia yang hari ini sering dikenal dengan usia bucin alias budak cinta, dihabiskan oleh Gus Dur bukan dengan mengagumi seorang perempuan, melainkan ia memilih pacaran dengan buku. Dagelan Gus Dur yang terkenal ialah, *"orang yang meminjamkan buku ialah orang bodoh. Lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan buku"*. Kalimat ini menjelaskan bahwa Gus Dur seorang yang getol membaca. Puluhan buku dilahap Gus Dur sehingga ia mahir beberapa bahasa. Sosok Gus Dur bukan hanya seorang santri yang hobi mengaji melainkan beliau juga gemar menulis. Tak heran, buku-buku berisi *guyon* alias dagelan Gus Dur terus mengalir tebit dan masih laku di pasaran, selain buku-buku ilmiah atau kajian serius. Modal inilah yang kemudian melekat dalam diri Gus Dur saat menduduki posisi penting, Ketua PBNU misalnya, bahkan menjadi Presiden.

Literasi yang kuat, belajar dengan siapapun dan kapanpun serta dalam kondisi apapun menjadikan ia dewasa yang anti *mainstream* dalam mengambil langkah kebijakan. Dengan demikian, publik tidak bisa mengikuti dan membaca apa maunya Gus Dur. Maklum saja pikirannya jauh dari manusia rata-rata. Hal demikian bisa kita lihat dalam kunjungan Gus Dur selama ia menjadi presiden ke beberapa negara. Lawatan Gus Dur dinilai oleh oposisi merupakan kegiatan tamasya keliling dunia. Padahal sudah jelas, kaum santri tidak mengenal jalan-jalan, yang mereka kenal ialah silaturrahim dan ziarah. Gus Dur menyambangi pemimpin-pemimpin dunia sebagai langkah turut serta perdamaian dunia. Ia tahu dengan *disowani*, dan dialog dari urusan kecil hingga kemaslahatan bisa diselesaikan. Bahkan saking uniknya Gus Dur menggunakan pendekan humor.

Tidak jarang diplomasi yang sebetulnya dijadwalkan hanya beberapa menit saja kemudian saking asyiknya bertambah menjadi berjam-jam. Suasana cair demikian tentu tidak sembarang orang bisa lakukan. *Walhasil* pemimpin dunia pun segan dengan Indonesia. Bahkan sekelas Barisan Serbaguna (Banser) salah satu badan Nahdhatul Ulama' turut kecipratan barokahnya.

Dikisahkan pada suatu "operasi khusus" Banser yang notabene hanya masyarakat sipil ini diterjunkan ke Papua yang tengah terjadi konflik Tolikara. Di tengah jalan mereka bertemu dengan segerombolaan masyarakat Papua yang *dibekingi* dengan pemberontak. Terjadilah ketakutan yang luar biasa pada Banser ini. Mereka hendak "dihabisi". Namun, beruntung saat itu banser menyebut dirinya sebagai "Pasukannnya Gus Dur". Saat itulah tiba-tiba suasana cair. Mereka tidak menembaki Banser melainkan memeluknya karena menganggap sebagai saudara.

Kampus, Gus Dur dan Kebermanfaatan

Seyogyanya Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan berganti nama menjadi Universitas KH. Abdurrahman Wahid ini banyak belajar dari Gus Dur, khususnya dalam konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekalipun kedepan kurikulum akan berubah namun semangat merdeka belajar perlu diusung dalam rangka keberpihakan pendidikan kepada *stakeholder* pendidikan. Gus Dur, sosok pemelajar yang boleh saja disebut sebagai intelektual organik yang belajar dan menyelesaikan persoalan harian dan *ngeroot* (membumi).

Sekalipun Gus Dur merupakan cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar di dunia Nahdhatul Ulama yakni Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, ia tidak *gemagus* jumawa atas status sosial yang mau tidak mau melekat dalam dirinya. Sekalipun menjadi presiden, Gus Dur tetap membuka istana presidennya untuk publik. Siapa saja bisa *sowan* (silaturahmi) bahkan hingga larut malam. Kebiasaan demikian hanya ada di eranya Gus Dur.

Gus Dur selain belajar di pesantren ia juga berteman dengan masyarakat dari agama lain. Dialog antar agama inilah yang menjadi solusi atas problem kebinekaan yang kerap mengancam Indonesia. Hingga saat Gus Dur meninggal dunia, bukan hanya masyarakat muslim saja yang berduka cita melainkan juga dari agama lain turut merasa kehilangan. Bahkan batu nisan Gus Dur tertulis "Di sini Berbaring Seorang Pejuang Kemanusaan" dalam empat bahasa, bahasa arab, inggris dan mandarin. sebuah *legacy* yang diturunkan oleh Gus Dur kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia bahwa keberpihakan menjadi penting dalam setiap langkah kebijakan.

Mengutip buku Sekolah itu Candu karya Roem Topatimasang, ia menyatakan bahwa sekolah berasal dari kata *school, scole, scolae* yang dalam bahasa yunani kuno berarti waktu luang. Pada zaman dulu sekolah diartikan bukan bangunan tempat belajar manusia dengan bangku, papan tulis dan "seabrek" perlengkapan belajar lainnya. Sekolah diartikan sebagai waktu luang. Seorang ayah mengajak anak laki-lakinya untuk ke kebun, sementara Ibu mengajak anak perempuannya belajar memasak. Lambat laun orang tua mulai kerepotan dengan pekerjaan dan tanggungannya sehingga mereka menitipkan anaknya kepada orang yang dianggap pandai dalam suatu hal. Dari sinilah kemudian muncul sebuah lembaga yang dinamakan sekolah.

Jika UIN KH, Abdurrahman mengikuti semangat Merdeka Belajar ala Gus Dur, tentu mahasiswanya tidak puas dengan materi yang ia dapatkan hanya di bangku kuliah semata. Mereka akan mencari dan membuat ruang-ruang belajar di luar jam kuliah. Mahasiswa bukan sebatas mencari nilai antara A hingga E semata, melainkan nilai yang telah terkonversi dalam bentuk kebermanfaatan di masyarakat. Sama juga dengan dosen dan tenaga pendidikannya yang selalu *update* dengan masa. Dengan demikian pembelajaran bukan sebatas normatif mengulang narasi belajar saja, melainkan memerdekakan dosen dan mahasiswa. Pembelajaran yang membuka ruang diskusi dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung sehingga tidak ada

jarak antara kampus dengan masyarakat. Dengan demikian, lulusan dari UIN KH. Abdurrahman Wahid bukan sebatas sarjana yang ahli di bidangnya saja, melainkan mengilhami sosok Gus Dur yang alim, plural, cerdas, dan juga selalu membela minoritas yang bermakna bagi masyarakat.

Refleksi Setahun
FEDERASI
TEATER
INDONESIA
~ Bersama ~
K.H. ABDURRAHMAN WAHID, SLAMET RAHARDJO
PUTU WIJAYA, NABIEL MAKARIM, DIMDOM. WS.
AFRIZAL MALNA, BENI YOHANES, SUJIWO TEJO
RADHAR PANCA DAHANA, DIDI PETET, NOORCA M. MASSARDI

BERDIALOG ALA GUS DUR

Grita Gusti Gandi

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah presiden keempat Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Gus Dur memiliki banyak *bolo* (teman) dari berbagai lingkungan keagamaan. Beliau menganggap bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk tidak dibeda-bedakan. Hal ini yang menjadi basis pergerakan dialog lintas agama Gus Dur untuk mencapai kesepakatan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita bisa belajar bagaimana Gus Dur melakukan dialog lintas agama.

Dialog lintas agama Gus Dur tidak bertujuan untuk menyamakan keyakinan, ajaran, aqidah agama, sebab setiap agama memiliki keyakinan, aqidah, dan kepercayaan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan secara prinsip tersebut adalah kunci dalam melaksanakan dialog lintas iman atau lintas agama. Setiap agama maupun kepercayaan sudah tidak lagi mempermasalahkan keyakinan prinsipiel agama maupun kepercayaan lainnya. Dialog dibutuhkan untuk sama-sama membangun rasa menghargai antar golongan.

Gus Dur terus mendorong dialog antarumat beragama bukan hanya dari kepentingan untuk berkomunikasi membicarakan hal-hal teologis saja. Gus Dur mencoba membentuk relasi dan kerja sama dengan berbagai umat beragama di dunia dengan membicarakan hal-hal kepentingan prinsipiel terkait kebutuhan dasar manusia serta menunjukkan keberpihakan pada prinsip kebenaran yang disuarakan oleh semua pengikut agama di dunia dan semua umat manusia lintas

budaya. Dalam konteks ini, Gus Dur menolak pembatasan prinsip kebenaran secara komunal yang dibatasi oleh simbol komunalisme (Achmad, 2016a).

Gus Dur memegang prinsip bahwa kerukunan antarumat beragama adalah sama pentingnya dengan persoalan kemanusiaan dan pembentukan peradaban manusia. Hal-hal yang sangat berwarna seperti perbedaan agama, kepercayaan, etnis, dan budaya di Indonesia adalah sebuah keniscayaan keragaman yang perlu terus dibina agar tidak menajam dan memicu konflik. Untuk itulah, keperluan kerukunan antarumat beragama menjadi basis dari terciptanya kehidupan masyarakat yang berintegrasi dan damai sekaligus dapat menciptakan narasi nasionalisme, ini disebut *imagined community* (Bennedict Anderson, 2006), yang berarti komunitas terbayang. Istilah komunitas terbayang digunakan untuk memahami nasionalisme, yaitu masyarakat sebagai publik yang mengutamakan nasionalismenya daripada kepentingan kelompok kecilnya. Selain itu, berbagai peran yang sinergi juga menjadi pendukung terciptanya nasionalisme, misalnya seperti media dan kapitalisme cetak yang dipublikasikan lewat buku maupun tulisan-tulisan untuk membentuk narasi diskursus yang menggairahkan semangat masyarakat.

Gus Dur memaknai dialog lintas agama untuk menjalin kerja sama antarumat beragama dalam rangka melanjutkan kepentingan umat manusia. Kerja sama dibangun demi menciptakan kondisi yang damai dan stabil sehingga menjadi "obor" kemanusiaan yang paling utama.

Relasi antar agama yang baik akan menjadi tonggak relasi kerja sama secara global. Hal ini sama halnya dengan kerja *muamalat*, yakni demi kesejahteraan material umat manusia. Gus Dur yakin bahwa relasi yang baik antar agama akan menumbuhkan kerja sama yang baik dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Relasi antar agama ini juga memiliki peran penting yang turut andil dalam penciptaan perubahan sosial. Agama bisa mendorong umatnya untuk bekerja sebagai agen perdamaian yang mengutamakan kemanusiaan.

Sebaliknya, agama juga bisa mendorong umatnya untuk mengeksklusi kelompok lainnya dan memicu peperangan besar.

Dilansir dari necrometrics.com, dalam rentang sejarah perang di dunia, setidaknya ada jutaan manusia terbunuh dalam perang yang berkaitan dengan agama atau keyakinan di dalamnya. Kekerasan atas nama agama adalah justifikasi teologis yang dibenarkan oleh sebagian penganut agama, seperti tidak ada jalan lain dalam meredam konflik yang terjadi antarumat beragama di dunia ini (Aqil, 2019). Di sinilah pentingnya peran agama yang dilihat oleh Gus Dur, agama sebagai ideologi umat manusia bisa menjadi dua sisi mata pisau yang saling berlawanan. Oleh karenanya, merawat kerukunan antarumat beragama adalah tugas yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia.

Jika dikaji secara sosiologis, Gus Dur selalu berusaha membangun interaksi sosial secara global maupun nasional, bersama siapapun, demi menjalin kerjasama dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi pemikiran Gus Dus tentang kemanusiaan dalam dialog antar agama menjadi sesuatu yang ideal, yakni dengan lebih meggaris bawahi pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan daripada mendialogkan persoalan yang bersifat teologis (Aqil, 2019).

Konsep yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam dialog antar agama merupakan cara yang dapat menggerus sikap eksklusif dan sekat-sekat primordialisme masing-masing kelompok. Nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam falsafah hidup Gus Dur dan diimplementasikan dalam dialog antar agama adalah keadilan, kesetaraan, keterbukaan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kearifan, ketauhidan, toleran, harmoni, dan mengedepankan pluralisme dalam bertindak. Dialog antar agama yang mengedepankan nilai-nilai tersebut menjadikan tiap-tiap pemeluk agama mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu kemanusiaan (Achmad, 2016b).

Meminjam istilah dari Hocker dan Wilmot (2018), apa yang dilakukan oleh Gus Dur terkait implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam dialog antar agama adalah sebuah teknik negosiasi yang disebut

expanding the pie. Teknik negosiasi ini mendorong hasil integratif baru karena sebagian besar konflik didasarkan pada persepsi sumber daya yang langka, dengan memperluas sumber daya mengubah stuktur konflik. *Expanding the pie* berarti menciptakan lebih banyak sumber daya. Permasalahan muncul karena sumber daya yang terbatas, maka sumber daya harus diperluas dan ketika isu sumber daya ini diperluas, hasilnya adalah mereka mendapatkan kesepakatan integratif *win-win solution*.

Dari sinilah Gus Dur selalu merujuk pada pembahasan persoalan kemanusiaan yang lebih penting daripada masalah sepele, "Gitu aja kok repot!", ujar beliau. Gus Dur adalah pejuang kemanusiaan, beliau mengenalkan nilai-nilai *humanitarianisme* untuk mengapresiasi segala hal yang baik dalam relasinya antar sesama manusia. *Humanisme-humanitarianisme* Gus Dur merujuk pada Humanisme Islam yang taat pada ajaran Islam serta berkaitan dengan toleransi dan harmonisasi sosial. Ketika dialog antar agama mengabaikan nilai-nilai humanisme, maka sebenarnya dialog tersebut telah gagal sebelum dimulai. Gus Dur menekankan bahwa jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlindungan hak-hak dasar kemanusiaan, dan kebinekaan adalah hal-hal yang mutlak untuk diperjuangkan.

DARI TOLERANSI LINTAS AGAMA GUS DUR SAMPAI MODERASI BERAGAMA

Nur Qomariyah Imzastini

Fenomena sosial keagamaan di Indonesia sangatlah beragam, sama halnya dengan beragamnya kelompok agama dan budaya di dalamnya. Tidak dapat dimungkiri bahwa konflik dan integrasi dalam negeri pasti terjadi, menjadi sebuah keniscayaan. Selalu ada usaha dan upaya untuk merajut ulang keindonesiaan ketika terjadi gesekan-gesekan atas perbedaan yang memicu munculnya konflik.

Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, merujuk pada teori Perdamaian karya Johan Galtung (1964), masih termasuk dalam konteks Perdamaian Negatif. Galtung (1964) menjelaskan ada dua jenis perdamaian, yakni perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif merujuk pada ketiadaan kekerasan secara langsung maupun secara tidak langsung (kekerasan kultural dan struktural), sedangkan perdamaian negatif merujuk pada ketiadaan kekerasan secara langsung, tetapi masih ada kekerasan kultural maupun struktural. Nah, Indonesia ada pada konteks kedua, masih terdapat kekerasan kultural dan struktural yang terjadi di berbagai daerah yang biasanya dipicu oleh hal-hal pragmatis.

Kompleksitas keragaman agama dan budaya terkadang tidak terlihat oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengutamakan kelompoknya sendiri. Kelompok yang seperti ini dalam Antropologi biasanya disebut dengan istilah Primordialisme. Mereka menjadi eksklusif dengan selalu membanggakan kelompoknya dan meganggap

selain kelompok mereka adalah salah. Ini adalah ciri dari eksklusivisme dalam beragama. Menurut Komaruddin Hidayat (2003), implementasi sikap keagamaan masyarakat Indonesia terbagi menjadi lima sikap, yakni eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektisisme dan universalisme.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia, beliau sebagai maha guru perdamaian dan toleransi di Indonesia, beliau juga menjadi ikon toleransi di Indonesia. Dari berbagai kebijakan yang dimunculkannnya hingga rekognisi Konghucu sebagai agama keenam di Indonesia adalah salah satu prestasi yang perlu diacungi jempol. Hak-hak beragama seseorang menjadi sebuah prioritas untuk merajut kemanusiaan. Dari sinilah Gus Dur dikenal sebagai ikon toleransi di indonesia.

Djohan Effendi, menteri sekretariat negara Kabinet Persatuan Nasional era presiden Abdurrahman Wahid, mengartikan toleransi sebagai sikap menghargai kemajemukan yang ada, khususnya dalam konteks masyarakat di Indonesia. Seseorang yang memiliki sikap toleransi berarti terlibat dalam usaha mengetahui dan memahami adanya kemajemukan masyarakat.

Selanjutnya, akademisi asal Amerika, Michael Walzer (1997), menyatakan bahwa toleransi adalah sebuah keniscayaan dalam ruang individu maupun ruang publik masyarakat. Toleransi menurut Walzer (1997) bertujuan untuk membangun kehidupan yang damai di tengah-tengah perbedaan latar belakang sejarah, budaya dan identitas. Ia merunutnya dari pengakuan keberadaan *sang liyan* (*the others*), yang kemudian mampu hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) untuk mencapai pemahaman bersama (*mutual understanding*) dan mencapai praktik tertinggi dari toleransi yakni mendukung, merawat dan merayakan perbedaan yang ada.

Walzer (1997) mendefinisikan toleransi sebagai kemampuan seseorang dalam membentuk berbagai sikap, seperti menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui

hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan dan keragaman. Di sini, Walzer (1997) lebih menekankan keterkaitan negara dan bangsa dalam pembentukan toleransi dan pencegahan intoleransi. Ia menekankan bahwa rezimlah yang menentukan keberhasilan toleransi dalam negara dan bangsa.

Tokoh penyemai perdamaian lainnya yang kita kenal selain Gus Dur adalah Mahatma Gandhi dan Martin Luther. Mereka adalah tokoh damai sekaligus pejuang-pejuang kemanusiaan. Mahatma Gandhi dikenal sebagai pelopor perdamaian dari India, sedangkan Martin Luther adalah tokoh reformasi Protestan yang berasal dari Jerman.

Ajaran Gus Dur mengenai toleransi terhadap agama, golongan, dan budaya yang sangat beragam masih melekat sampai sekarang. Selain menjadi ikon toleransi Indonesia, Gus Dur adalah seorang nasionalis yang mendedikasikan dirinya demi perdamaian di Indonesia. Gus Dur sangat sedih ketika menyaksikan berbagai fenomena perpecahan di Indonesia, terutama yang dipicu oleh perbedaan agama. Kemanusiaan digadaikan demi kepentingan kelompok maupun pikiran pragmatis yang tidak menghargai kelompok lainnya.

Salah satu *quot* dari Gus Dur, "Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al- Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah."

Beranjak dari Gus Dur, saat ini telah dikembangkan konsep Moderasi Beragama yang sudah dimulai sejak 2018. Institusi pendidikan menjadi kanal utama dalam penyebaran konsep Moderasi Beragama yang bisa diserap oleh para pendidik dan anak didiknya. Moderasi Beragama memiliki dua poin utama yaitu adil dan berimbang, kedua terminologi tersebut merupakan upaya untuk mereduksi eksklusivisme

agama maupun aliran keagamaan tertentu yang mulai merebak di Indonesia. Eksklusivisme agama inilah yang menjadi penajaman perbedaan di Indonesia, seyogyanya kita merawat perbedaan tersebut menjadi sebuah kelebihan yang bisa menjadi poin plus integrasi nasional.

"Moderasi beragama memberi pelajaran untuk berpikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya" (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas). Moderasi beragama yang saat ini disosialisasikan di Indonesia merupakan sebuah langkah yang sangat tepat. Merebaknya kasus intoleransi di Indonesia, kerusuhan berbasis perbedaan agama, fenomena politisasi agama yang merugikan banyak orang, pelintiran kebencian (meminjam istilah Cherian George, 2016), serta penyebaran berita *hoax* menjadi pemicu konflik yang tidak mudah ditangani. Penyerangan dalam tataran ideologi menjadi sebuah tantangan di Indonesia yang harus segera ditangani.

Belajar dari Gus Dur, kita bisa melihat bagaimana keragaman menjadi identitas bagi Indonesia. Tidak perlu mempermasalahkan berbagai konsep yang dibangun, tetapi bagaimana kita menjadi seorang manusia yang benar-benar menjaga kemanusiaan *liyan,* tidak diskriminatif, dan menegakkan keadilan. Dua poin utama konsep Moderasi Beragama Kementrian Agama yakni adil dan berimbang juga turut melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam menyemai perdamaian di Indonesia. Patut kita syukuri dan dukung semaksimal mungkin.

MEMBUMIKAN SEMANGAT GUS DUR DI UIN ABDURRAHMAN WAHID

Noorma Fitriana M. Zain
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Membincangkan sosok K.H. Abdurrahman Wahid (1940-2009) atau lebih *kesohor* dengan sebutan Gus Dur memang tidak akan pernah ada habisnya. Meskipun saat ini beliau sudah meninggal dunia, tetapi semangat perjuangan, ide, gagasan, pemikiran, humor serta berbagai kontroversi yang pernah beliau timbulkan di negeri ini masih diingat oleh banyak orang. Saking pentingnya sosok beliau bagi warga Nahdlatul Ulama, tidak mengherankan jika nama beliau sering dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Paling anyar tentu saja saat momentum pelaksanaan Muktamar NU ke 34 di Lampung penghujung tahun 2021 yang lalu, dimana dua kandidat yang berlaga untuk menjadi PBNU 1 yaitu KH. Said Aqil Siradj (petahana) dan Gus Yahya yang notabenenya adalah sama-sama orang dekat Gus Dur. Bisa dikatakan keduanya adalah murid terbaik Gus Dur, sehingga tidak mengherankan saat Muktamar kemarin baik Kiai Said maupun Gus Yahya sama-sama mengusung nama Gus Dur untuk meraih simpati dari muktamirin yang mempunyai hak suara.

Sebagai petahana Kiai Said mengusung visi "Meneruskan Perjuangan Gus Dur" sedangkan Gus Yahya memiliki visi "Menghidupkan Gus Dur". Meskipun pada akhirnya Gus Yahya terpilih menjadi ketua umum PBNU yang baru untuk lima tahun ke depan.

Namun demikian, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Gus Dur telah berhasil melahirkan murid-murid ideologis yang alim, memiliki kualitas intelektual mumpuni, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul. Dan semua itu tidak bisa dilepaskan dari nama besar seorang Gus Dur.

Harus kita akui bahwa Gus Dur adalah sosok pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang sangat legendaris setelah kakeknya yaitu pendiri NU itu sendiri Hadratussyekh KH. Hasyim Asyari. Boleh dibilang bahwa Gus Dur merupakan salah satu kader terbaik yang pernah dimiliki oleh NU. Selain karena memiliki wawasan yang sangat luas dalam ilmu agama dan ilmu umum yang sering beliau tuangkan saat memimpin NU, Gus Dur juga merupakan sosok yang konsisten berjuang dalam membela hak-hak masyarakat utamanya kaum minoritas.

Selain itu, Gus Dur merupakan pribadi yang gemar membaca segala bentuk pengetahuan baik yang berasal dari buku dan sejenisnya maupun membaca kondisi perkembangan zaman. Dengan demikian, tidak mengherankan dari sanalah beliau rajin memproduksi atau mereproduksi gagasan-gagasan *geniune* melalui berbagai tulisan dan serpihan-serpihan lontaran, tetapi juga mengimplementasikan melalui kepemimpinanya di organisasi Keagamaan NU (Suaedy & Ulil:2000).

Bukan hanya dikenal oleh warga Nahdliyin saja sebagai seorang Wali, Gus Dur di tingkat regional dan internasional juga memiliki reputasi yang tidak sembarangan, beliau dikenal sebagai seseorang pejuang dan pembela kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) terutama bagi kaum minoritas di negeri tercinta Indonesia. Tidak mengherankan jika banyak orang yang menyebut Gus Dur sebagai pahlawan kemanusiaan.

Santri Modern

Memperhatikan latar belakang sosial dari Abdurrahman Wahid yang lahir dan dibesarkan dalam kalangan pesantren, sangat wajar jika perjalanan intelektualitas beliau tidak bisa dilepaskan dari kultur

pesantren. Jika kita telaah lebih jauh, perjalanan intelektualitas Gus Dur memang selalu bersentuhan dengan dunia pesantren sehingga banyak ide, gagasan serta pemikiran-pemikiran beliau banyak berlandaskan sosial keagamaan. Berbagai bentuk pengalaman hidupnya yang cukup unik telah ikut mengantarkan proses pematangan pemikiran dan pengembaraan intelektualnya secara mendalam (Listiyono:2004).

Salah satu keistimewaan dari Abdurrahman Wahid adalah, beliau termasuk tokoh intelektual dari pesantren yang memiliki pandangan dan pemikiran yang modern serta visioner. Gagasan-gagasannya seperti pribumisasi Islam di Indonesia, penghormatan terhadap hak-hak kaum minoritas, reformasi kultural, demokratisasi, dan juga toleransi beragama merupakan sejumlah contoh tema aktual yang selalu ditawarkan dalam berbagai kesempatan (Bahar:1999).

Hal yang menarik untuk dipelajari dari seorang Gus Dur adalah tentang cara pandang beliau dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Sudut pandang serta gagasan beliau dalam memberikan solusi atas suatu masalah bisa dibilang memiliki nuansa yang khas dan spesifik. Meskipun menguasai berbagai ilmu pesantren yang bisa dibilang klasik, Gus Dur ternyata memiliki kemampuan berpikir yang modern dan bahkan tak jarang gagasan yang sering beliau kemukakan sangat visioner dan berwawasan jauh ke depan. Tak salah kiranya jika Gus Dur bisa disebut sebagai santri modern.

Indikatornya adalah sebagai seorang santri, Gus Dur memiliki komitmen yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keislaman baik itu ilmu keislaman klasik maupun modern. Bukan hanya karena latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan asalnya yaitu kaum santri dan pesantren, tetapi lebih dari itu semangat belajar dari sosok Abdurrahman Wahid juga menjadi faktor penting luasnya pengetahuan dan wawasan beliau tentang ilmu keislaman. Jejak itu bisa dibuktikan dengan pengembaraan beliau dari satu pesantren ke pesantren lainnya di daerah Jawa. Kesungguhan belajar ilmu keislaman semakin matang manakala Gus Dur juga belajar ke pusat peradaban Islam yaitu Baghdad dan Mesir.

Meskipun dalam kenyataannya Gus Dur tidak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya, tetapi hal itu tidak menutupi keistimewaan beliau semoga sosok yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Sebagai seorang santri tulen, Gus Dur juga banyak belajar ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, filsafat, politik bahkan kesenian. Itulah di antara kelebihan yang dimiliki oleh seorang yang pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta.

Tidak mengherankan jika peneliti luar yaitu Greg Barton mengemukkan bahwa Abdurrahman Wahid merupakan seorang intelektual yang mewakili perpaduan dua tradisi: Kesarjanaan Islam tradisional dan pendidikan Barat modern. Menurutnya, salah satu hasil sintesis itu adalah perhatiannya yang kuat untuk reformasi pemikiran dan praktek Islam, suatu perhatian yang juga ditekankan oleh *modernism* Islam setidaknya pada fase-fase awal. Barton mencoba memahami pemikirannya, menemukan adanya sebuah tema paling dominan dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, yaitu tema humanitarialisme liberal. Tema liberal itulah yang mendapat tempat besar dalam pemikiran Islam Abdurrahman Wahid tanpa harus meninggalkan prinsip Islam traditional (Barton:2006).

Menilik uraian di atas sangat jelas bahwa Abdurrahman Wahid merupakan tokoh NU yang tetap menjadi santri, tetapi memiliki wawasan holistik. Gus Dur yang terlahir di tengah keluarga pesantren tradisional NU memiliki pemikiran yang modernis dan liberalis, baik dalam perspektif politik maupun wacana keagamaan. Dari sinilah Gus Dur mengajarkan kepada kaum santri untuk berpikir maju dan kritis dalam berbagai paradigma tanpa harus meninggalkan ajaran pesantren. Secara sederhana, Gus Dur adalah *role model* santri modern yang harus dijadikan teladan bagi santri saat ini, khususnya generasi penerus Nahdliyin.

Pejuang Kemanusian

Memperbincangkan Gus Dur sebagai seorang tokoh bangsa hampir tidak akan pernah selesai. Tokoh asal Jombang, Jawa Timur itu memang memiliki karisma tersendiri yang diakui oleh banyak kalangan. Gus Dur adalah salah satu ikon pemikir Islam bukan hanya diakui di Indonesia, melainkan juga oleh dunia internasional. Gus Dur merupakan sosok yang senatiasa mengembangkan teologi Islam inklusif dan moderat. Konsistensinya sebagai seorang cendikiawan, tokoh agama, pemimpin, sekaligus sebagai aktivis dalam hak asasi manusia serta membumikan pentingnya menghargai segala bentuk perbedaan di nusantara ini menjadikan beliau dikenal sebagai pendekar multikultural-plural dan demokratis.

Sebagai tokoh intelektual Muslim Indonesia, Gus Dur sangat giat menyuarakan pentingnya hidup berdampingan antar golongan masyarakat secara damai dalam keberagaman di Indonesia. Bukti konkret perjuangan Gus Dur untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan antar masyarakat adalah ketika beliau dengan berani membubarkan "bakostranas" yaitu lembaga ekstrayudisial penerus "kopkamtib" yang memiliki kewenangan luas untuk menindas. Pada saat Gus Dur menjabat presiden ke-4 Indonesia pula tap MPRS No XXV/ 1996 soal pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan penyebaran ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme beliau cabut. Hal itu menunjukkan bahwa Gus Dur sangat menghormati dan menghargai segala perbedaan di negeri ini tanpa harus saling menyakiti.

Sebagai pejuang kelompok minoritas, pada tahun 2001 saat masih menjabat Presiden Gus Dur mengeluarkan kebijakan yang sangat berani yaitu menjadikan Imlek sebagai hari libur Nasional. Bukan hanya itu saja, Gus Dur juga menetapkan Konghucu sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia. Sebagai buktinya, beliau mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China, dan menggantinya dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000. Kebijakan Gus Dur itulah yang dianggap menyelamatkan

masyarakat Tionghoa dari diskriminasi yang terjadi di era Orde Baru masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Kebijakan yang dilakukan Gus Dur terhadap etnis Tionghoa saat itu adalah bentuk perjuangan Gus Dur dalam membela hak-hak kaum minoritas di negeri ini. Hal itu juga menunjukkan bahwa Gus Dur adalah sosok yang inklusif yang senantiasa menghargai berbagai perbedaan di Indonesia, salah satunya adalah perbedaan kepercayaan yang dianut di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Karena perjuangan serta kebijakan Gus Dur membela etnis Tionghoa, ia kemudian diberi gelar sebagai Bapak Tionghoa Indonesia.

Perjuangan dalam membela hak-hak minoritos juga Gus Dur tunjukkan ketika beliau sempat berselisih dengan ormas Front Pembela Islam (FPI). Meskipun sering berbuat onar, namun Gus Dur tidak sepakat apabila FPI dibubarkan, karena menurut beliau setiap orang memiliki hak untuk berserikat. Gus Dur lebih mengedepankan pendekatan dengan cara-cara damai daripada dengan cara kekerasan.

Sebagai seorang pejuang kemanusian Gus Dur juga selalu mengampanyekan hidup damai dalam keberagaman. Gus Dur juga tidak pernah membeda-bedakan seseorang dari latar belakang agama, suku, warna kulit, bahasa, ormas, pilihan politik maupun atribut-atribut lainnya. Yang menjadi fokus perhatian Gus Dur adalah manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Konsistennya KH. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan Kemanusiaan semasa hidupnya memang sudah tidak diragukan lagi. Hal itu dibuktikan saat beliau meninggal, hampir semua golongan merasa kehilangan sosok beliau. Bahkan kelompok dan penganut agama selain Islam di Indonesia pun menggelar doa bersama untuk almarhum Gus Dur hingga beberapa hari setelah beliau meninggal. Karena jasa Gus Dur yang begitu besar dalam memperjuangkan masalah kemanusiaan hingga akhir hayatnya itulah beliau sangat dihargai banyak orang hingga saat ini. Bahkan dalam prasasti makam Gus Dur tertulis “Di Sini Berbaring Seorang Pejuang Kemanusiaan”. Semua itu tentu tidak bisa

dilepaskan begitu saja dari misi kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Dur.

UIN Abdurrahman Wahid

Sebagai bentuk apresiasi perjuangan dan jasa-jasa dari KH. Abdurrahman Wahid itulah, IAIN Pekalongan menjadikan nama beliau sebagai nama baru saat IAIN Pekalongan resmi bertransformasi menjadi UIN Abdurrahman Wahid. Harapan ke depan, segenap civitas academicanya mampu meneladani dan meneruskan perjuangan yang telah diteladankan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) baik itu sebagai seorang santri, intelektual muslim modern, aktivis, pemimpin serta sebagai pejuang kemanusiaan.

Jika nanti IAIN Pekalongan telah bertransformasi menjadi UIN Abdurrahman Wahid, maka sosok Gus Dur harus menjadi *role model* bagi segenap civitas akademik yang memiliki jiwa santri, berintelektual modern serta memiliki visi sebagai pejuang kemanusiaan. Mahasiswa harus dididik sebagai santri yang memiliki keilmuan Islam yang matang, baik itu ilmu islam klasik maupun ilmu umum modern. Mahasiswa juga harus memiliki semangat untuk terus mencari ilmu pengetahuan secara mandiri sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Dur. Literasi harus menjadi budaya bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi segenap dosen dan karyawan di UIN Abdurrahman Wahid.

Sebagai intelektual modern, civitas academica baik itu dosen dan mahasiswa harus mampu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang holistik baik itu dari sisi keagamaan maupun lainnya. UIN Abdurrahman Wahid diharapkan menjadi "kawah candradimuka" untuk melahirkan mahasiswa menjadi aktivis-aktivis kampus yang dapat menjadi *agent social of change* di lingkungan masyarakat sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh seorang Gus Dur. Dengan membawa nama besar Gus Dur harapannya mahasiswa UIN Abdurrahman Wahid kelak menjadi pemimpin yang berkualitas

sebagaimana yang telah diteladankan oleh Gus Dur saat menjadi ketua PBNU dan juga sebagai Presiden ke-4 RI.

Kedepannya UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan diharapkan menjadi lembaga yang senantiasa dapat membumikan dan meneruskan perjuangan Gus Dur dalam membela hak-hak asasi manusia. Pemikiran, gagasan serta ide-ide dari Gus Dur hendaknya dijadikan rujukan bagi segenap civitas academica untuk memajukan UIN Abdurrahman Wahid sebagai kampus kemanusian. Semoga!

MENGUNGKAP PEMIKIRAN SUBSTANTIF-INKLUSIF GUSDUR DALAM BUKU "ILUSI NEGARA ISLAM EKSPANSI GERAKAN ISLAM TRANSNASIONAL DI INDONESIA"

Hendri Hermawan Adinugraha
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dewasa ini, kelompok Islam garis keras atau yang biasa disebut dengan kelompok Islam radikal (sayap kanan) selalu bersikap keras dan tidak kenal kompromi seolah-olah dalam Islam tidak ada perintah *islah*, yang ada hanya paksaan dan kekerasan, oleh karena sikap demikian mereka disebut dengan Islam garis keras. Mereka berusaha mengubah Islam sebagai ideologi politik dan bukan sebagai agama yang memiliki kemurnian syariah.

Fenomena Gerakan Transnasional Timur Tengah

Islam garis keras dapat diklasifikasikan sebagai individu atau organisasi, individu garis keras adalah orang yang menganut pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama; bersikap tidak toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda; berprilaku atau menyetujui prilaku dan/atau mendorong orang lain atau pemerintah berperilaku memaksakan pandangannya sendiri kepada orang lain; memusuhi dan membenci orang lain kerena berbeda pandangan; mendukung pelarangan oleh pemerintah dan/atau pihak lain atas keberadaan pemahaman dan keyakinan agama yang berbeda;

membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman atau keyakinan tersebut; menolak dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia; dan/atau menginginkan adanya dasar negara Islam, bentuk negara Islam, atau pun *Khilafah Islamiyah* (Wahid, 2009: 19). Organisasi garis keras merupakan kelompok yang merupakan himpunan individu-individu dengan karakteristik yang disebutkan di atas, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menunjukan orientasi tidak toleran terhadap perbedaan, baik semua karakter ini ditunjukan secara terbuka maupun tersembunyi (Wahid, 2009: 45-46).

Pada dasarnya aspirasi *proponen* garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Islam transnasional dari Timur Tengah, terutama yang berpaham Wahabi dan/atau *Ikhwanul Muslimin*, atau gabungan keduannya. Kelompok garis keras di Indonesia, termasuk partai politiknya, menyimpan agenda yang berbeda dari ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah, NU, dan pertai-partai berhaluan kebangsaan. Di antara gerakan-gerakan transnasional yang beroperasi di Indonesia adalah Ikhwanul Muslimin yang kemudian melahirkan PKS, Hizbut Thrir Indonesia (HTI), dan Wahabi (Wahid, 2009: 77-78).

Adapun klasifikasi individu Islam moderat ialah individu yang menerima dan menghargai pandangan dan keyakinan berbeda sebagai fitrah; tidak mau memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui pemerintah; menolak cara-cara kekerasan atas nama agama dalam bentuk apa pun; menolak berbagai bentuk pelarangan untuk menganut pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi negara Indonesia; menerima dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama dan bentuk NKRI sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang melindungi perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air. Sedangkan, yang dimaksud dengan organisasi moderat adalah kelompok yang memiliki karakteristik seperti yang tercermin dalam klasifikasi individu moderat, ditambah

dengan visi dan misi organisasi yang menerima dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia dan bentuk NKRI sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahid, 2009: 46-47).

Kelompok-kelompok garis keras selalu berusaha menebar pesona untuk mendapatkan simpati umat Islam melalui jargon *tarbiyah* dan dakwah *amar ma'ruf nahy mungkar* (Assyaukanie, 2014). Ditambah lagi dengan jubah fundamentalisme keagamaan dan *style* penampilan ala orang Arab yang berpakaian gamis, bercadar, bercelana jonggrang, berjenggot lebat, ber-*batuk* biru, dan lain sebagainya. Tidak sedikit dari mereka memahami Islam tanpa mengerti substansi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para wali, ulama, dan pendiri bangsa ini. Kelompok-kelompok garis keras juga tidak segan-segan untuk mengafirkan, memusyrikkan, bahkan memurtadkan (perkataan) orang Islam lainnya yang tidak sejalan dengan ideologi mereka, padahal Nabi telah bersabda "barang siapa yang mengafirkan saudaranya tanpa penjelasan yang nyata, adalah dia sendiri yang kafir" *(man kaffara akhahu bighairi ta'wil-fahuwa kama qala)*, yang mana menurut mereka tidak ada ideologi yang paling benar selain ideologi Wahabi dan/atau Ikhwanul Muslimin. Mereka layaknya mewarisi trdisi ekstrem kaum *khawarij* (Wahid, 2009: 24-25).

Strategi utama gerakan Islam transnasional dalam usaha membuat umat Islam menjadi radikal dan keras adalah dengan membentuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan "penyebar" ideologi Wahabi/Salafi mereka, serta berusaha meminggirkan dan memusnahkan bentuk-bentuk pengamalan agama Islam yang lebih toleran. Dengan cara demikian, mereka berusaha keras melakukan infiltrasi ke berbagai bidang kehidupan umat Islam, baik melalui cara-cara halus seperti penawaran diri menjadi *cleaning service* di masjid-masjid yang berujung pada penguasaan masjid tersebut, infiltrasi ke lembaga pendidikan melalui jargon *tarbiyah,* mereka yang sedikit demi sedikit menyusupkan ideologi radikal dan menjadikan kader ormas lain

terkontaminasi dengan ideologi mereka. Ada juga cara-cara keras melalui pemaksaaan, tindakan anarki, terorisme, perkataan (kafir, musyrik, murtad, dll) kepada sesama Muslim, dan lain sebagainya (Wahid, 2009: 43). Simbol, identitas dan kuantitas bagi mereka lebih penting dibandingkan tingkat kesadaran spiritual dan kualitas dalam beragama (Wahid, 2009: 115-116).

Kelompok-kelompok garis keras tidak hanya mengklaim sebagai yang paling benar diantara sesama Muslim yang lain, mereka berjuang untuk mengubah tradisi dan budaya bangsa ini. Demikian ini, merupakan proyek formalisasi agama yang akan berujung-salah satunya- pada realisasi Wahabisasi global, penegakan *Khilafah Islamiyah*, atau Islamisasi negara Indonesia dan melenyapkan NKRI. Oleh karena itu, cita-cita mereka tentang negara Islam hanya ilusi. Negara Islam yang sebenarnya tidak terdapat dalam konstruksi pemerintahan, tetapi dalam kalbu yang terbuka kepada Allah swt, dan kepada sesama makhluk-Nya. Sebab Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (Wahid, 2009: 111-112).

Dalam karyanya yang lain, Gus Dur panggilan akrab dari KH. Adurrahman Wahid menjelaskan tentang *Khilafah Islamiyah*, tiadanya pendapat yang baku dalam dunia Islam tentang dua hal. *Pertama,* Islam tidak mengenal pandangan yang jelas tentang pergantian pemimpin (*bai'at*/presetia, penunjukan langsung, pemilihan melalui dewan pemilih/*ahl halli wal aqdhi*, sampai kepada sisitem kerajaan). *Kedua,* besarnya negara yang dikonsepkan menurut Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan kaum Muslimin. Tidak ada kejelasan, misalnya, negara Islam yang diidealkan bersifat mendunia dalam konteks negara-bangsa *(nation-state),* ataukah hanya negara-kota *(city-state)* (Wahid, 2006: 81-83).

Secara umum, Wahabi sebenarnya bertentangan dengan semangat Islam sendiri. *Tabi'at*-nya yang keras, suka memvonis seenaknya, serta aksi-aksi destruktif yang gemar mereka lakukan adalah bukti yang sulit

ditolak. Perbuatan mereka seutuhnya bertentangan dengan pandangan para ulama *Aswaja* seperti yang ditegaskan dalam kaidah *fiqh* bahwa menolak kerusakan, kekacauan, kekejaman dan semacamnya *(mafsadah)* harus lebih didahulukan dari pada mewujudkan kesejahtraan *(dar'ul mafasid muqadamun 'ala jalbil masalih)*. Dalam hal ini, Wahabi justru gemar melakukan *mafsadah* demi-menurut mereka-mewujudkan *maslahah (versi Wahabi)*. Dalam hal ini juga, Islam menjadi tumbal dalam usaha Wahabisasi global (Wahid, 2009: 77).

Reaksi keraspun bermunculan dari ormas-ormas Islam yang menentang infiltrasi gerakan ini, di antaranya ialah Muhammadiyah melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 149/Kep/1.0/B/2006, dan NU melalui Fatwa Bahtsul Masa'il NU tentang *Khilafah Islamiyah*, seta respon para ulama dan tokoh tentang bahaya dan ancaman gerakan-gerakan transnasional (Wahid, 2009: 43).

Infiltrasi kelompok-kelompok garis keras dilakukan melalui beberapa aspek, seperti melalui fasilitas yang disediakan ormas-ormas Islam. Infiltrasi di Muhammadiyah misalnya, melalui SKPP tahun 2006 Muhammadiyyah secara tegas mengecam aktivitas PKS di tubuh Muhammadiyah yang mengatasnamakan dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, juga disebut dalam SKPP ini telah digunakan untuk kepentingan politik. Sedangkan infiltrasi kelompok-kelompok garis keras di NU dilakukan melalui masjid-masjid, majlis-majlis *ta'lim*, dan pondok-pondok pesantren yang menjadi basis warga NU (Wahid, 2009: 189). Dan masih banyak lagi model infiltrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras untuk mencapai tujuannya.

Pokok Persoalan

Di antara pokok persoalan dari buku "Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia" ini adalah pandangan dan respon para agen garis keras terhadap isu-isu sosial politik dan keagamaan di Indonesia dewasa ini, pemahaman tentang peta gerakan-gerakan Islam transnasional dan kaki tangannya di Indonesia saat ini,

pembuatan agenda mereka berkaitan dengan persoalan-persoalan Indonesia mutakhir dan strategi mereka untuk menjalankan agenda tersebut, hubungan kelompok-kelompok garis keras lokal dengan gerakan-gerakan Islam transnasional di Timur Tengah dan hubungan mereka dengan kelompok-kelompok Islam yang berhaluan moderat, pengaruh kelompok-kelompok garis keras terhadap ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, dan infiltrasi kelompok-kelompok garis keras untuk mewujudkan negara Islam dan formalisasi agama Islam di Indonesia (Wahid, 2009: 47-48).

Tipologi Pemikiran Gusdur

Dalam menyikapi setiap masalah, Gus Dur menggunakan kerangka berfikir secara substantif-inklusif. Paradigma pemikiran seperti ini memiliki empat ciri-ciri yang menonjol. *Pertama,* adanya kepercayaan yang tinggi bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci berisikan aspek-aspek etik dan pedoman moral untuk kehidupan manusia, tetapi tidak menyediakan detail-detail pembahasan terhadap setiap objek permasalahan kehidupan. Argument utama dari pendukung paradigma ini adalah, bahwa tidak ada satu pun dari ayat al-Qur'an yang menekankan bahwa umat Islam harus mendirikan negara Islam. Akan tetapi, al-Qur'an hanya memuat kandungan etika dan panduan moral untuk memimpin masyarakat politik, termasuk bagaimana menegakkan keadilan, kebebasan, kesetaraan, demokrasi, dan lain-lain.

Kedua, pendukung paradigma substantif-inklusif meyakini bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau negara. Akan tetapi untuk menyempurnakan akhlak umatnya melalui berdakwah dengan nilai-nilai Islam dan kebajikan. Sebagaimana Sabda beliau "*innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq*".

Ketiga, para *proponen* paradigma ini juga berpendapat bahwa syariat tidak dibatasi atau terikat oleh negara. Karena jika mengutip dari pendapat Al-Ashmawi (1983), pada hakikatnya syariat adalah sebuah

jalan dan gerak langkah yang selalu dinamis dan membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi-orientasi etis yang mulia.

Keempat, refleksi lain yang ditunjukan oleh para proponen paradigma ini bila dilihat dalam bidang politik, mereka berpendapat bahwa politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan menifestasi substansial dari nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik. Hal ini dibuktikan dengan totalitas dukungan mereka mengenai kulturalisasi dalam proses Islamisasi (Wahid, 2006: xvii-xix).

Terakhir, Gus Dur melalui pemikiran substantif-inklusifnya menekankan kepada seluruh komponen bangsa untuk membangkitkan kesadaran, khususnya para elit dan media massa, tentang bahaya ideologi dan paham garis keras yang dibawa ke tanah air oleh gerakan transnasional Timur Tengah dan tumbuh dengan pesat dalam era reformasi di negara Indonesia. Juga, sebagai seruan untuk melestarikan Pancasila yang merefleksikan esensi syariah dan menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* yang sejati.

UIN ABDURRAHMAN WAHID SEBAGAI KAMPUS YANG RAMAH DISABILITAS

Khairul Anwar
Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan akan bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dengan nama UIN Abdurrahman Wahid. Menjadi kampus yang menggunakan nama salah satu tokoh yang berjasa besar bagi bangsa ini, tentunya harus diiringi dengan peningkatan kualitas dalam segala hal. Baik dari segi kualitas SDM pengajar, sarana pendidikan, program studi baru dan lainnya.

Peningkatan kualitas dan perbaikan-perbaikan pada berbagai elemen ini sangat penting supaya UIN Abdurrahman Wahid menjadi kampus yang tidak hanya terkenal dari segi namanya saja, tetapi juga bisa dikenal luas oleh masyarakat sebagai kampus yang memiliki kualitas bagus.

Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah aspek sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Bahri, 2018).

Disabilitas bukan hanya masalah medis. Ini adalah fenomena rumit yang mencerminkan interaksi kualitas fisik seseorang dengan karakteristik budaya tempat mereka tinggal. Namun, pengidap disabilitas tentu memiliki kebutuhan yang sama dengan orang yang normal dan sehat, seperti imunisasi, pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya penyakit tertentu dan masih banyak lagi (Fadli, 2019). Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan orang normal, termasuk dalam pendidikan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dijelaskan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Hal ini berarti setiap orang, termasuk kaum disabilitas, berhak mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi atau tekanan dari pihak lain khususnya dalam mendapatkan hak memperoleh pendidikan di Perguruan Tinggi (Pratiwi, 2015).

Untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan pelaksanaannya, di antaranya tertuang dalam Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Pergurun Tinggi. Melalui permen ini, pemerintah berharap agar semakin banyak kesempatan bagi individu disabilitas untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Permen ini juga dimaksudkan agar para mahasiswa disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga mereka dapat belajar dan mencapai prestasi akademik yang optimal (Fitri, 2018).

Kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memudahkan bagi penyandang disabilitas agar dapat ikut menuntut ilmu juga sejalan dalam ajaran Islam. Dalam al-Qur'an Surat An-Nur ayat 61 disebutkan:

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآىِٕكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ.

> "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu…" (An Nur: 61)

Dalam potongan Surat an-Nur ayat 61 di atas, ditegaskan bagaimana Islam menganggap sama dan setara orang-orang yang dengan keterbatasan fisik dengan orang-orang lainnya. Islam mengecam sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Bagi mahasiswa penyandang disabilitas, fasilitas penunjang pembelajaran merupakan hal krusial yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu, perguruan tinggi perlu memberikan perhatian khusus bagi para penyandang disabilitas. Agar apa? Agar mahasiswa disabilitas dapat terpenuhi haknya dalam menuntut ilmu. Penyediaan lingkungan sosial, sarana belajar, fasilitas khusus yang mendukung aksesibilitas adalah suatu trinitas yang perlu dioptimalkan untuk mewujudkan kampus yang ramah bagi disabilitas.

Hak aksesibilitas sendiri merupakan salah satu hak bagi penyandang disabilitas yang sudah tercantum di dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016. Menurut undang–undang tersebut, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Lenna,2017).

Sejauh ini UIN Abdurrahman Wahid sendiri secara umum belum dikatakan sebagai kampus yang ramah disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan sangat minimnya fasilitas kampus bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Tercatat, di Kampus 2 yang berlokasi di Kajen, hanya ada jalur khusus untuk difabel atau penggunaan kursi roda, dan juga *lift* yang itu pun hanya ada di gedung FEBI. Guna memenuhi hak penyandang disabilitas di kawasan UIN Abdurrahman Wahid, maka perlu dilakukan penambahan sarana.

Tambahan-tambahan sarana tersebut antara lain: 1) *Guiding block* bagi mahasiswa difabel yang tuna netra agar mudah untuk berjalan dan

mengakses gedung yang ada di UIN Abdurrahman Wahid. 2) Tangga *ramp* bagi mahasiswa yang menggunakan alat bantu kursi roda, sehingga mereka lebih mudah dalam bermobilitas dan mengakses gedung perkuliahan yang ada di UIN Abdurrahman Wahid. 3) *Hand rail* atau pegangan tangan bagi mahasiswa difabel. 4) *Signage* atau tanda-tanda bagi mahasiswa difabel. 5) tempat parkir khusus pengguna kursi roda. 6) Toilet khusus bagi penyandang disabilitas.

Fasilitas dan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas tentunya berbeda-beda bagi setiap jenis disabilitas. Misalnya bagi penyandang tuna netra, jika memang UIN Abdurrahman Wahid bersedia menerima mahasiswa dengan disabilitas jenis ini, adalah penggunaan *Google Voice* sehingga penyandang tuna netra secara murni mendengarkan rekaman suara dan sedikit penggunaan visual dalam Proses Belajar Mengajar (PBM).

Kemudian, bagi penyandang tuna rungu dengan menggunakan *Google Text* sehingga suara berubah menjadi tulisan dan mereka akan dapat membaca tulisan tersebut. Teknologi tersebut adalah yang paling sederhana untuk diimplementasikan. Selain itu, diperkenankan juga bagi para mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengerjakan ujian yang inklusif dengan soal ujian rekaman suara bagi penyandang tuna netra, dan *Google Text* bagi penyandang tuna rungu.

Selain itu, demi mendapat predikat kampus yang ramah disabilitas, UIN Abdurrahman Wahid saya kira juga perlu membentuk Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD), seperti yang sudah dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fungsi dan tugas dari unit ini adalah untuk memberikan layanan kepada mahasiswa difabel, mengembangkan penelitian isu disabilitas dan melakukan pengabdian kepada maysarakat.

Kampus ramah disabilitas dapat terwujud jika civitas academica dan tenaga kependidikan dapat memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas agar dapat menyelesaikan studinya dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Selain itu, komunikasi intens guna meyakinkan penyandang disabilitas dapat berkuliah di UIN

Abdurrahman Wahid perlu dilakukan. Untuk itu, ke depan UIN Abdurrahman Wahid mungkin perlu mengundang secara khusus calon mahasiswa melalui sosialisasi ke beberapa sekolah luar biasa.

Harapan saya adalah UIN Abdurrahman Wahid benar-benar menerapkan kampus yang ramah disabilitas. Sebab, hal ini juga akan mengimplementasikan nilai-nilai Gus Dur. Ada 9 nilai utama Gus Dur yakni ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan dan kearifan lokal. Nah, kampus yang ramah disabilitas ini masuk pada kategori keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan.

REBRANDING UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDURRAHMAN WAHID MELALUI AKREDITASI UNGGUL

Teddy Dyatmika
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Usia Lima Puluh Empat tahun bukanlah usia yang muda bagi sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi. Pada usia setengah abad lebih ini, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan akan melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid. Harapan, tantangan, dan peluang menjadi sesuatu yang harus dihadapi oleh institusi ini. Harapan untuk menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan memiliki kontribusi untuk negara tercinta Indonesia menjadi sebuah keharusan. Akan tetapi, untuk mencapai harapan tersebut tentu ada tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan harapan tersebut. Peluang sebagai institusi atau perguran tinggi menjadi modal utama bagi Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid untuk mejadikan program studi yang ada di dalamnya menjadi program studi yang unggul.

Sebagai institusi perguruan tinggi negeri yang mendapatkan aliran dana dari pemerintah tentu akan lebih mudah dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta yang harus berjuang menghidupi instutusinya dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Apalagi, saat ini, institusi tercinta ini sudah memiliki sarana prasarana yang sangat

memadai. Empat gedung Fakultas yang megah dan satu gedung perpustakaan yang nyaman dan representatif menjadi kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh institusi ini. Jadi, kalau bicara masalah sarana dan prasarana institusi ini sudah dianggap paripurna dan lebih dari cukup.

Sarana prasarana sangat penting bagi sebuah institusi pendidikan tinggi, tetapi megah dan nyamannya sebuah sarana prasarana menjadi percuma apabila akreditasi institusi dan program studi belum mencapai unggul. Derasnya teknologi komunikasi dan munculnya dunia virtual atau saat ini dikenal dengan istilah *metaverse* menjadikan gedung perkuliahan menjadi sesuatu hal yang tidak begitu penting untuk dijadikan daya tarik mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan. Melalui dunia virtual mahasiswa dapat memperoleh pengetahuannya tidak harus datang ke kampus. Mahasiswa cukup berdiam diri di rumah untuk dapat mengakses segala sesuatunya, kapanpun dan di manapun. Dengan demikian, daya tarik yang paling utama yang bisa ditawarkan oleh Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid adalah melalui mutu dari perguruan tinggi tersebut yaitu diperolehnya akreditasi unggul.

Mencapai akreditasi unggul tentu bukanlah perkara yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Perlu perjuangan dan integritas yang tinggi dari berbagai pihak mulai dari manajerial kampus, baik di tingkat institusi, fakultas dan program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan dan tidak lupa yang terpenting adalah mahasiswanya. Penjaminan mutu internal wajib dilakukan oleh institusi sebelum behadapan dengan penjaminan mutu ekternal. Siklus Penetepan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan atau sering dikenal dengan PPEPP wajib untuk dilakukan. Institusi harus menetapkan melalui kebijakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat yaitu 1 tahun ke depan dan jangka menengan dalam waktu 5 tahun ke depan. Setelah kebijakan ditetapkan, maka kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan harus dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya adalah evaluasi, penjaminan mutu di tingkat institut dan

fakultas menjadi ujung tombak dalam melakukan evaluasi. Tentu setelah evaluasi dilakukan harus ada pengendalian dari hasil evaluasi tersebut dengan melakukan peninjauan kembali atas hasil evaluasi. Terakhir institusi wajib melakukan peningkatan agar lebih baik lagi. Siklus ini terus berputar dan terus mengalami peningkatan. Apabila ini berjalan dengan konsisten mutu dari institusi ini tentu akan mudah tercapai.

Institusi minimal harus menjalankan 9 aspek yang harus dilakukan dengan optimal. Aspek yang pertama adala Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan akan melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid saat ini memiliki Visi Terwujudnya IAIN Pekalongan sebagai perguruan tinggi terkemuka dan kompetitif ditingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang salih, cerdas, unggul, dan moderat. Visi ini tentu harus diikuti oleh Fakultas dan Visi keilmuan yang ada di Program Studi. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran harus selaras dan seirama. Kalau diibaratkan institusi tercinta ini adalah sebuah kapal yang mengangkut sumber daya manusia yang ada dalam institusi. Kalau sumber daya manusianya memiliki visi yang sama, maka akan sangat mudah kapal tersebut sampai pada tujuannya. Tentunya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran harus disosialisasikan dengan masif baik itu melalui media cetak, elektronik maupun melalui *new media* seperti media internet dan media sosial. Hal tersebut dikarenakan dalam dunia komunikasi semakin sering seseorang diterpa sebuah pesan maka semakin tinggi orang tersebut tahu akan pesan tersebut.

Aspek yang kedua adalah tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Tata pamong dan tata kelola yang baik salah satunya adalah sertifikasi ekternal yang dimiliki. Tata pamong dan tata kelola institusi sudah sangat bagus dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018. Perlu menjadi perhatian utama adalah di bidang kerja samanya, baik kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama ini bukan hanya sekadar penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Terpenting

adalah implementasi dari MoU tersebut. Aspek yang ketiga adalah input dari mahasiswa. Sosialisasi secara masif memperkenalkan institusi kepada masyarakat wajib dilakukan. Jangan terlena dengan status negeri, karena biasanya institusi negeri merasa bahwa mahasiswa akan datang dengan sendirinya. Sebagai sebuah Universitas Islam Negeri banyak sekali segmen yang bisa dimasuki untuk memperoleh input mahasiswa yang berkualitas. Mahasiswa asing harus ada dalam daftar mahasiswa baru kalau ingin mendapatkan akreditasi unggul.

Selanjutnya adalah aspek yang keempat yaitu sumber daya manusia. Tidak dimungkiri institusi ini masih minim sumber daya manusianya baik dari segi kuantitas maupun dari segi jabatan fungsional akademiknya. Bersyukur saat ini institusi memiliki program percepatan guru besar dan sudah menghasilkan tiga guru besar yang kompetensinya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, saat ini yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan bagi dosen agar segera mengajukan jabatan fungsional akademiknya menuju lektor, lektor kepala dan juga guru besar. Mendorong dosen untuk studi lanjut doktoral juga harus menjadi prioritas. *One year three publication* harus dijadikan sebuah kebijakan yang wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh dosen tidak terkecuali dosen struktural. Selama ini dosen masih terbelenggu dengan urusan administasi saja. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan juga wajib dilakukan melalui berbagai macam *workshop* dan sertifikasi keahlian baik itu sertifikasi keahlian laboran maupun pustakawan.

Aspek yang kelima adalah keuangan, sarana dan prasarana. Aspek ini sudah paripurna dan sudah tercukupi dengan sangat baik. Tinggal bagaimana institusi ini mengelola keuangannya dengan bijak. Kurangi kegiatan-kegiatan yang hanya menjadikan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai penonton saja. Perbanyak kegiatan yang menjadikan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pemain utama. Memberikan dukungan finansial bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang dapat melakukan presentasi,

publikasi, dan paten di tingkat Internasional bukan sesuatu yang merugikan.

Aspek yang keenam adalah pendidikan, di mana menempatkan kurikulum yang *up to date* dan mengikuti perkembangan zaman menjadi sesuatu yang penting. Peninjauan kurikulum minimal dilakukan 3 tahun sekali. Hal tersebut dikarenakan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini. Mendatangkan pemangku kepentingan dari eksternal wajib hukumnya. Minimal institusi ini bisa mengetahui apa yang sedang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Lulusan yang banyak tanpa adanya serapan dalam dunia kerja menjadi sesuatu yang percuma.

Aspek ketujuh dan kedelapan adalah pelibatan mahasiswa dalam semua *project* dosen baik dalam bidang penelitian maupun bidang pengabdian masyarakat. Pelibatan mahasiswa tentunya jangan pada hal teknis saja. Mahasiswa harus diajari sebagai pemeran utama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Inilah yang dimaksud mengoptimalkan dosen dan mahasiswa sebagai pemain bukan sebagai penonton. Institusi ini sudah pada trek yang benar, tinggal bagaimana dioptimalkan lagi *roadmap* penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat instutusi, fakultas, program studi, dosen dan mahasiswa. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan *roadmap* yang sudah ditentukan.

Aspek yang terakhir dan yang paling besar sumbangsihnya adalah aspek luaran dari institusi ini berupa *output* mahasiswanya. Pada aspek luaran ini institusi harus dapat membuat mahasiswa lulus tepat waktu dengan indeks prestasi yang sangat baik. Mahasiswa juga dituntut memiliki publikasi ilmiah, *book chapter*, prestasi akademik dan *non* akademik, dan juga paten HAKI. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang lebih dominan di bidang non akademik harus mulai diseimbangkan dengan Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang akademik. Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa memperoleh prestasi di tingkat Internasional baik dibidang *non*-akademik maupun bidang akademik. Publikasi ilmiah mahasiswa dapat berjalan optimal tentu jika ada bimbingan secara

intensif dari dosennya. Arahan dari dosen menjadi sangat penting. Publikasi international akan sangat mudah tercapai melalui seminar international. Kendala utama dari mahasiswa untuk mengikuti seminar Internasional paling dominan adalah pada saat melakukan pembayaran. Oleh karena ity, dukungan dari institusi menjadi sebuah keharusan. Selanjutnya pada aspek ini juga melihat bagaimana institusi mampu menghasilkan mahasiswa yang dapat diterima di dunia kerja. Artinya mahasiswa tidak terlalu lama menunggu mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus. Mahasiswa juga bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan bekerja di perusahaan multi nasional atau jika memilih berkarir di bidang kewirausahaan usahanya bisa bersaing dan bisa *survive*. Institusi wajib melacak lulusan untuk mengetahui bagaimana saat ini lulusannya. Diresmikannya *Career Development Centre* di institusi ini menjadi satu langkah penting institusi melakukan *tracer study*. Selain itu, didalam *Career Development Centre* juga terdapat layanan konseling yang bisa membantu mahasiswa jika memiliki problematika akademik.

Apabila sembilan aspek tersebut dapat dilakukan secara baik dan secara optimal, maka mendapatkan akreditasi unggul menjadi sangat mudah semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerjasama dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua wali, masyarakat, pemerintah, media massa, pengguna lulusan dan semua komponen yang terlibat dengan institusi tercinta ini yang sebentar lagi akan bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid. Memiliki super *team* akan jauh lebih baik dibandingkan hanya memiliki super *man*.

TRANSFORMASI BUDAYA KAMPUS

Vika Inayati
Alumni IAIN Pekalongan; Guru SDN 02 Notogiwang, Paninggaran

Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Pekalongan adalah sebuah kabar bagus. Ini adalah salah satu bentuk integrasi ilmu agama dan sains. Meskipun demikian, alih status IAIN Pekalongan menjadi UIN Abdurrahman Wahid ini idealnya bukan sekadar perubahan status belaka. Perubahan ini haruslah diiringi dengan transformasi budaya, baik akademik maupun non-akademik pada civitas academica. Di antara langkah pertama transformasi budaya baru adalah mengoreksi pekerjaan rumah maupun masalah lama yang selama ini dihadapi IAIN Pekalongan.

Sebagai alumni, ilmu yang sudah didapat saat penulis kuliah di IAIN Pekalongan sangat bermanfaat di dunia kerja. Misalnya, ilmu tentang pengelolaan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Dalam prodi PGMI yang penulis ambil, mahasiswa diberi bekal untuk membuat media pembelajaran yang menarik pada setiap mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran di SD/MI, seperti Matematika, Akidah Akhlak, IPA dan lain-lain. Hal ini menjadi poin lebih, karena lulusan PGMI dicetak untuk menjadi guru yang tidak monoton dalam mengajar.

Kiprah alumni menjadi sesuatu yang esensial. Wajah kampus bisa dilihat dari bagaimana alumninya berperan di dunia pasca kampus. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari 14.804 (dari data yang diketahui penulis) alumni IAIN Pekalongan yang telah dihasilkan, apakah sudah

terserap dalam lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya? Apakah sudah memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing? Apakah sudah mampu bersaing dalam dunia global? Jika ketiga pertanyaan ini mendapatkan jawaban 'belum', maka hal ini menjadi problem yang harus segera diselesaikan. Wajib hukumnya bagi IAIN Pekalongan untuk membuat formula baru agar ketiga pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan sempurna.

Masalah terkait *output* IAIN Pekalongan di atas disebabkan oleh beberapa aspek yang saling berkaitan, seperti sistem pembelajaran, kualitas dosen, fasilitas kampus, budaya akademik, serta kompetensi bahasa asing. Membaca pengalaman penulis sebagai alumni, sistem pembelajaran lama yang telah berjalan dirasa kurang tertata rapi. Dilihat dari kurikulum misalnya, jumlah mata kuliah wajib dari institut dan fakultas yang harus diselesaikan mahasiswa terlalu banyak, sehingga terjadi penggemukkan SKS yang mengakibatkan mahasiswa tidak bisa lulus tepat waktu.

Aspek selanjutnya adalah tentang kualitas dosen. Apakah para dosen sudah mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan seimbang dan benar? Di masa pandemi seperti ini, tidak jarang para dosen memberikan tugas kepada mahasiswa dengan jumlah yang banyak, tetapi sedikit intensitasnya dalam memberikan pengajaran. Misalnya, dosen hanya melakukan 3 kali pertemuan dari keseluruhan pertemuan yang seharusnya dilaksanakan. Hal ini sangat memengaruhi semangat belajar mahasiswa, terlebih bagi mahasiswa baru yang masih membutuhkan banyak bimbingan.

Aspek lain yang harus diperhatikan adalah fasilitas kampus. Ketersediaan buku-buku yang menunjang perkuliahan, sarana dan prasarana yang memadai, program kampus yang dapat mengembangkan skill mahasiswa dan lain-lain. Fasilitas kampus yang terpenuhi dapat menjadi nilai plus tersendiri. Namun hal ini juga bisa menjadi bumerang jika fasilitas kampus tidak ditata dan dirawat dengan baik.

Hal kecil yang dapat penulis lakukan untuk melihat apakah fasilitas kampus sudah terpenuhi dan terawat dengan baik yaitu dengan menelusuri *website* IAIN Pekalongan. Apakah seluruh informasi terkait kampus sudah tersedia di sana? Realitanya sangat disayangkan, masih ada laman yang memberikan informasi dengan asal-asalan. Seperti laman http://mahad.iainpekalongan.ac.id/, informasi terkait program kegiatan belum terisi dengan baik. Padahal di zaman serba digital ini, manusia akan mencari tahu sesuatu yang diinginkannya melalui internet. Jika program yang dicantumkan dalam *website* belum memberikan informasi dengan jelas, bagaimana dengan pelaksanaan program tersebut?

Salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah budaya akademik kampus, yakni membaca, diskusi, menulis dan riset. Budaya akademik ini membentuk pola pikir mahasiswa serta menjadi bukti proses intelektual. Kurangnya minat mahasiswa untuk berdiskusi, membaca, menulis dan melakukan riset sangat memengaruhi kualitas *output* yang dihasilkan. Ketika para alumni melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka akan mengalami *culture shock.* Budaya akademik yang harusnya sudah melekat pada mahasiswa, akhirnya menjadi semacam budaya baru yang harus dibiasakan.

Aspek terakhir yang harus diselesaikan adalah minimnya dosen dan mahasiswa yang memiliki keahlian bahasa asing. Persaingan global yang ketat, mewajibkan para kompetitornya ahli berbahasa asing. Terlebih dalam transformasi IAIN menjadi UIN ini merupakan salah satu strategi membangun PTKIN menjadi *the world class university.* Oleh karena itu, IAIN Pekalongan harus menata ulang SDM dan membuat program baru guna menunjang skill bahasa asing.

Proses mengubah wajah lama IAIN Pekalongan menjadi UIN Pekalongan membutuhkan proses yang tidak pendek. Dibutuhkan kerja cerdas dan tangkas, selain itu IAIN Pekalongan harus terbuka terhadap perubahan dengan mengembangkan sikap siap belajar dan mau

memperbaiki diri. IAIN Pekalongan dapat belajar dari Universitas Islam Negeri lain yang telah lama berdiri.

Kita ambil contoh UIN Maulana Malik Ibrahim, dalam integrasi ilmu agama dan sains mereka menggambarkan dengan sebuah metafora pohon ilmu. Pohon diasumsikan tumbuh di atas tanah yang subur yang menggambarkan adanya kewajiban untuk menumbuhkembangkan kultur kehidupan kampus yang berwajah Islami. Sedangkan pohonnya menggambarkan bangunan akademik yang akan menghasilkan buah yang sehat dan segar. Buah yang menggambarkan produk pendidikan Islam, yaitu: iman, amal shaleh, dan akhlak mulia.

Salah satu hasil transformasi UIN Maulana Malik Ibrahim yang dapat ditiru adalah mendirikan Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah adalah sebuah asrama (baca: pondok pesantren) yang ada di lingkungan kampus. Mahasantri yang bermukim di Ma'had Al-Jami'ah adalah para mahasiswa yang telah lolos seleksi. Ma'had ini tidak hanya memiliki misi dalam bidang keagamaan, tetapi ia juga memiliki misi lain seperti memberikan keterampilan berbahasa Arab dan Inggris, serta melaksanakan bimbingan terpadu antara kegiatan Ma'had dan Universitas. Hasilnya tidak diragukan lagi, mahasantrinya mampu bersaing di kancah internasional.

IAIN Pekalongan dapat mengadopsi program ini dengan menyeleksi mahasiswa bidikmisi. Kemudian membuat sebuah asrama kecil yang memiliki struktur kepengurusan dan program yang terpadu dengan kampus. Melihat program yang sudah berjalan sebelumnya, mahasiswa bidikmisi IAIN Pekalongan hanya ditempatkan di Pondok Pesantren mitra. Akhirnya program-program kampus yang dititipkan di Pondok mitra tidak dapat dikontrol dengan baik. Ditambah tidak ada integrasi antara ilmu agama dan sains di Pondok Pesantren mitra.

Sekali lagi, perubahan status IAIN Pekalongan menjadi UIN Abdurrahman Wahid harus diikuti transformasi budaya kampus. Budaya baik yang selama ini berjalan harus terus dikuatkan. Sementara budaya konvensional yang tidak konstruktif perlu diperbarui dengan

visi-visi kemajuan. Ditambah dengan nama Abdurrahman Wahid yang melekat di UIN Pekalongan, visi kampus baru ini semoga akan mendapatkan spirit kemajuan menuju budaya-budaya kampus yang baik.

ROAD TO UIN ABRURRAHMAN WAHID

Riril Widi Handoko
Mahasiswa Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pertama kali mendengar nama yang akan disematkan pada IAIN Pekalongan adalah UIN Abdurahman Wahid, sejenak kita bertanya-tanya, kenapa yang dipilih adalah KH. Abdurahman Wahid? Mantan Presiden Ke-4 Republik Indonesia, mantan ketua umum PBNU, Pejuang perdamaian dunia, yang tidak dilahirkan di Pekalongan. Beliau adalah cucu *hadrotusyaikh* KH. Hasyim Asy'ari pendiri NU, anak mantan Mentri Agama RI.

Kenapa nama yang dipilih bukan tokoh Pekalongan seperti Habib Hasyim bin Yahya Guru *hadrotusyaikh* K.H Hasyim Asy'ari yang dimakamkan di sapuro, Habib Luthfi bin Hasyim bin Yahya Wantimpres RI, atau tokoh pejuang lain, Kiai-kiai Pekalongan saja yang asli dilahirkan dan berjuang untuk Pekalongan? Atau karena Gus Yaqut menteri agama adalah dapil Pekalongan? Iya, ini adalah terka-menerka saja.

Banyak peluang jika kita mendapat nama Gus Dur, karena beliau adalah guru bangsa yang sudah dikenal di dunia, beliau bukan hanya berdarah khas pesantren yang mumpuni baik ilmu dan nasabnya, tetapi juga tokoh jurnalisme, pejuang kemanusiaan, politikus, pejuang gender, pejuang HAM, budayawan, sastrawan, dan sebagainya.

Banyak hal yang dimiliki oleh Gus Dur jika kita analisis mendalam tentang apa yang Gus Dur perjuangkan semasa hidupnya. Hingga pluralisme, humanisme, adalah *ma'rifat* atau puncak dari karir beliau. Hal

ini merupakan peluang yang sangat besar karena kita bisa *ndompleng* atas kebesaran Gus Dur.

Nama Gus Dur adalah nama sejuk, semua yang mendengar kata Gus Dur pasti akan senang melihatnya, karena Gus Dur hidup untuk mengangkat harkat martabat manusia, Gus Dur adalah kebanggaan bagi manusia yang sudah sadar akan perihnya berjuang, perasan keringat Gus Dur curahkan, air mata Gus Dur kucurkan, darah bahkan nyawa untuk "Ibu Pertiwi" Gus Dur relakan demi keutuhan sebuah konstitusi bangsa, alasan berdirinya sebuah bangsa. Ini peluang yang sangat besar jika kita mampu meramu Gus Dur menjadi jelmaan sebuah kampus yang mampu membawa peradaban dunia. Gus Dur bukan dijadikan jargon tetapi visi misi yang dengan jiwa besar direalisasikan.

Besar dan kecilnya kampus ditentukan oleh besar dan kecilnya jiwa civitas academica universitas itu sendiri, jika mampu solid dan bergerak sesuai renstra dengan jiwa yang besar pasti kebesaran Gus Dur mampu direalisasikan dengan gerakan yang konkret bukan hanya dijadikan jargon atau kampanye saja. Tantangan selain pada jiwa yang besar untuk mendalami, menyelami, menelisik hingga meneladani Gus Dur, juga *mindset*.

Apakah semua mampu memahami Gus Dur secara utuh yang diterjemahkan melalui standar mutu kualitas insfratruktur dan kurikulum yang jelas? Maukah dosen membaca Gus Dur dengan benar dan sampai khatam agar Gus Dur menjadi spirit bersama yang ditancapkan di hati sanubari pegawai, dosen, dan civitas academica? Agar semangat Gus Dur benar benar hidup menjadi ruh pengabdian kita bersama kampus kemanusiaan UIN Abdurahman Wahid? *Grand design* seperti apa jika Gus Dur menjadi nama besar kampus kita? Citra nama baik kampus apakah mampu menjaga keakbaran nama Gus Dur? Tri dharma perguruan tinggi apakah akan benar benar di rasakan oleh masyarakatnya? Apakah mampu birokrat tegas pada diri sendiri, seperti Gus Dur yang senantiasa tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi welas asih kepada orang lain, terutama *wong cilik*, kaum minoritas, kaum

mustadafin yang dibela mati-matian, tetapi birokrat menjadi jenaka pada umum, agar pelayanan kampus benar benar dirasakan layaknya prinsip kerja Kementerian Agama. Bukan menjengkelkan karena tidak mampu senyum dan jauh dari kata ramah apalagi professional.

Mampukah UIN Abdurahman Wahid menjadi basis rumah riset dunia tentang gagasan besar Gus Dur yang mampu kita sumbangkan untuk menolong sistem dunia yang sudah lumpuh, yang kaya semakin jaya, yang miskin tambah sengsara? Karena kampus adalah Laboratorium peradaban, maka semangat Gus Dur harus bisa dimanifestasikan pada paradigma pembangunan sosial masyarakat melalui institusi perguruan tinggi. Menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Kampus memang perlu megah agar mampu mengelabuhi masyarakat dengan tembok tembok raksasa tapi apakah hanya itu saja bukti membesarkan kampus? Kita ingin selain sarana prasana yang tidak bertele-tele dalam memfasilitasi, pelayanan yang humanis kepada siapapun, tanggap dan responsif serta memiliki etos kepekaan yang dinamis sehingga selalu kontekstualis. Kita mengharap ada taman GUSDURian, semacam taman Islam Nusantara di Jombang, sehingga menjadi taman nasional yang mengantarkan kita pada pemahaman ilmiah tentang sejarah dan perjuangan Gus Dur semasa hidupnya. Taman itu bukan hanya sebagai *selfie* saja tetapi juga media alternatif pendidikan yang menyederhanakan.

Dari harapan, peluang, tantangannya yang sederhana ini kami juga ingin semua kebijakan kampus sebelum disahkan, mengajak mahasiswa berdiskusi bukan hanya mengintervensi karena kita harus sama sama berfikir. Konsepsi lulusan melalui *grand* desain dengan renstra kampus, konsepsi pengembangan kualitas kurikulum, meningkatkan kualitas pelayanan kampus terhadap mahasiswa, pemenuhan sarana prasarana mahasiswa dan ormawa secara cepat dan tepat sasaran, kemudian bagaimana memasukan paradigma pembangunan sosial melalui konsepsi yang Gus Dur bangun sebagai tokoh yang paham birokratis

jenaka. Mampukah UIN Abdurahman Wahid secara kolektif kolega satu komando membangun peradaban dengan humanis dan tepat sasaran?.

Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus muncul dan bergulir agar kemudian dirumuskan satu pondasi dan strategi yang mapan dalam menjawab peran perguruan tinggi di masyarakat secara komprehensif karena insfratruktur intelektual yang kuat harus dibangun layaknya menggunakan spirit perjuangan yang mapan melalui kader inti ideologis, agar idealisme Gus Dur tidak hanya menjadi slogan kampanye, jargon-jargon *tagline* saja. Kekuatan intelektual yang dibangun adalah prasasti semacam apa agar melahirkan kader penggerak masyarakat, pembela kaum *mustadafin*, agar citra kampus secara bersama sama mampu menginterpretasi paradigma Gus Dur sehingga relevansi dan kolektivitas perguruan tinggi bertemu dalam muara juang yang sama untuk melahirkan kapital keilmuan sesuai dengan kebutuhan zaman yang akan disokong oleh UIN Abdurahman Wahid sebagai kampus rujuakan mahasiswa muslim dunia? Bagaimana juga meningkatkan standar mutu kualitas lembaga kampus agar (minimal) setara dengan kampus metropolitan yang tidak diragukan kualitas pendididikannya serta kemampuan manajerial distributor alumi sebagai basis kekuatan kampus yang menyokong nama baik kampus mampu berdiri dengan eksistensi jaringannya?.

Pandangan terlahir dari budaya, agama dibentuk dari budaya, maka budaya UIN Abdurahman Wahid harus mampu merespon dan mengoneksikan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat agar lulusan kampus mampu menjawab tantangan bangsa dan negara serta agama melalui darah juang pengabdiannya di spesifikasi keahliannya dengan membawa semangat Gus Dur dengan ideologisnya. Kita memang tidak dilahirkan oleh Gus Dur tetapi melalui pemikiran Gus Dur kita harus mampu melahirkan gagasan inovatif dan kreatif sesuai dengan tuntutan zaman agar kampus tetap relevan karena kualitas dan kedalaman kapasitasnya.

UIN Abdurahman Wahid harus menjadi sarang juang ideologi Gus Dur dengan tetap fokus pada pengembangan sinkronisasi basis jurusan yang relevan, citra jurusan relavan dengan zamannya, Gus Dur sebagai pondasi spirit perjuangan yang menyatu dalam hati sanubari. Gus Dur menjadi alternatif terdekat cara kita belajar terhadap tokoh-tokoh sebelumnya. UIN Abdurahman Wahid sebagai jawaban dunia bahwa mahasiswa akan tetap dibutuhkan masyarakat karena aksi nyata membangun peradaban melalui keilmuan yang sahih dan humanis yang menyatu dengan masyarakat.

Jayalah UIN Abdurahman Wahid dengan kualitas terbaiknya. Kami merindukan kejayaan Indonesia melalui sumbangsih kampus kemanusiaan Pekalongan.

TEOLOGI KOSMOPOLITAN GUS DUR: SEBUAH TINJAUAN FILOSOFIS

M. Minanur Rohman
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pendahuluan

Mengingat berbagai krisis kemanusiaan yang dihadapi, dalam beberapa tahun terakhir, para sarjana telah berusaha mencari alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif yang relevan, dan ini perlu elaborasi lebih lanjut, adalah kosmopolitanisme. Ini adalah sebuah etika dalam menyambut kehadiran manusia lain yang beragam (Nusbaumm, 1997: 3-4). Dengan kata lain, menurut pandangan ini, kosmopolitanisme merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan dunia yang damai.

Pandangan kosmopolit acapkali diajukan sebagai solusi atas masalah kemanusiaan. Ini adalah upaya menghadirkan masyarakat integral yang menghargai satu sama lain dalam keberagaman. Kosmopolitanisme menangani masalah ini dengan mendalilkan moralitas inklusif dan kolektif. Dengan mengingat postulat ini, kosmopolitanisme hadir sebagai relasi ekuilibrium antar manusia di dunia (Zlatko & Woodward, 2013: 1).

Salah satu upaya menghadirkan kosmopolitan di Indonesia adalah Islam Kosmopolitan Abdurrahman Wahid (Selanjutnya disebut Gus Dur). Dalam sebuah antologi artikel yang mencerahkan dan menarik berjudul "Islam Kosmopolitan", Gus Dur menegaskan nilai-nilai

universal Islam; suatu upaya penegasan bahwa Islam kompatibel dengan nilai demokrasi, humanisme, pluralisme dan sikap terbuka atas ragam perbedaan. Di sini saya akan mencoba memaparkan argumen Islam Kosmopolitan Gus Dur dan meninjaunya dari perspektif filosofis.

Tulisan ini akan disajikan ke dalam tiga bagian utama. Bagian pertama tulisan menyajikan sejarah ide kosmopolitanisme. Bagian kedua mengetengahkan teologi kosmopolitan Gus Dur. Bagian ketiga, dan terakhir, membahas upaya perluasan atas teologi kosmopolitan Gus Dur.

Memahami Kosmopolitanisme

Kosmopolites, dalam bahasa Yunani, berakar dari dua kata *kosmos* (berarti: dunia) dan *polites* (berarti: warga). Dari tinjauan etimologis, kosmopolitan menegaskan bahwa manusia, pertama-tama, adalah warga negara semesta, bukan semata anggota dari negara atau bangsa tertentu. Sebelum pelbagai identitas melekat kepadanya, manusia adalah warga negara semesta (Wattimena, 2018: 126). Pada titik ini, kosmopolitanisme berupaya mengembalikan manusia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana rumusan tradisi, filsafat, agama, maupun sains.

Kosmopolitanisme awal berkembang di kalangan filsafat Stoik. Kaum Stoik menolak sekat daerah, adat, lokalitas yang dilekatkan pada eksistensi manusia. Hierokles, salah satu penganut mazhab Stoik, menjelaskan lingkaran pusat pada diri manusia, lalu meluas lingkaran-lingkaran berikutnya (lingkar keluarga, teman, organisasi dan seterusnya), sampai bermuara pada lingkaran kesatuan warga dunia (Nusbaumm, 1997: 9-10). Konsekuesinya, ada suatu kedekatan antar manusia karena berada pada satu lingkaran yang sama, lingkar warga semesta. Dengan kata lain, kesadaran kosmopolitanisme Stoik adalah kesadaran memanusiakan manusia.

Dalam alam fikir modern, kosmopolitanisme Stoik dikembangkan oleh Immanuel Kant. Wacana kosmopolitanisme Kantian berpijak dari gagasan etikanya. Etika deontologis Kant mendalilkan bahwa sesuatu harus dilakukan karena tindakan itu baik dan benar, terlepas dari apapun

konsekuensinya (Nardin, 1992: 136). Etika deontologisnya bersifat *apriori* (mendahului pengalaman dan bisa ditemukan jika manusia berfikir rasional). Artinya, etika sejak awal sudah inheren dalam diri manusia. Pada awalnya, menurut Kant, manusia tidak menyadari etika ini. Akan tetapi karena konflik kepentingan antar manusia, manusia akan menyadari etika ini.

Kant mengadopsi logika individu di atas ke dalam logika negara. Sebagaimana logika individu, relasi dalam lingkup negara, pada akhirnya, akan bergerak dari perang menuju perdamaian (Kant, 2005: 85). Pada titik ini, kosmopolitanisme Kantian adalah mediasi dari fase konflik menuju fase kosmopolitan, dimana manusia bisa saling berkunjung, berkomunikasi dan menciptakan kehendak bersama (*common will*). Keramahan (*hospitality*) inilah yang akan terus membimbing menuju perdamaian abadi (*perpetual peace*).

Teologi Kosmopolitan Gus Dur

Gus Dur, sebagai pemikir kebudayaan, acap kali menulis gagasan dan pemikirannya sebagai respon isu-isu aktual pada zamannya. Salah satu wacana yang diketengahkan adalah teologi kosmopolitan. Gus Dur mendasarkan teologi kosmopolitan pada dua elemen inti, yaitu 1) argumen historis dan 2) argumen normatif.

Elemen pertama mengasumsikan bahwa praktik kosmopolitanisme Islam sudah ada sejak masa Nabi (Wahid, 2007: 8). Peristiwa hijrah, harmoni sosial di kota Madinah, tegaknya keadilan dan pemerintahan yang sejahtera, misalnya, adalah sebuah kosmopolitanisme peradaban. Bahkan, watak kosmopolit juga dipraktikkan pada masa-masa awal Islam. Hal ini ditandai dengan keterbukaan dan saling-serap Islam dengan peradaban Yunani.

Gus Dur, pada elemen pertama, mendasarkan teologi kosmopolitan dengan argumen historis. Argumen ini menegaskan bahwa teologi kosmopolitan bukan hal baru, tetapi sudah dipraktikkan pada zaman Nabi. Konsekuensinya, teologi kosmopolitan memperoleh justifikasinya,

oleh sebab teologi kosmopolitan adalah praktik nabi dan juga pemeluk Islam masa awal.

Elemen kedua mengasumsikan bahwa teologi kosmopolitan lahir dari rangkaian ajaran Islam. Ajaran Islam, yang dirumuskan dalam keimanan (tauhid), etika (akhlaq) dan hukum agama (fiqih), adalah dasar teologi kosmopolitan. Dalam hukum agama, misal, terdapat lima jaminan dasar Islam atas tiap individu dan masyarakat (Wahid, 2007: 4-5). Jaminan tersebut, dalam terminologi Gus Dur, meliputi keselamatan fisik (*hifz an-nafs*), keyakinan (*hifz ad-din*), keturunan (*hifz an-nasl*), kekayaan (*hifz al-maal*), dan keselamatan profesi (*hifz al-'aql*).

Gus Dur menempuh jalan penafsiran ulang atas *Dlaruriyyat al-Khamsah* dengan *tone kosmopolitanisme*. (1) *Hifz an-nafs*, oleh Gus Dur, dimaknai sebagai jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat yang mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat. (2) *Hifz ad-din* dimaksudkan sebagai jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat. (3) *Hifz an-nasl* diartikan sebagai jaminan dasar akan keselamatan keluarga sebagai ikatan sosial paling dasar. (4) *Hifz al-maal* didefiniskan sebagai jaminan dasar akan keselamatan harta-benda (*al-milk, property*) sehingga menjadi sarana berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional. Terakhir, (5) *hifz al-'aql* dijelaskan sebagai jaminan dasar akan keselamatan profesi. Kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri.

Dengan memasukkan tafsir kosmopolitan atas *Dlaruriyyat al-Khamsah*, Gus Dur melengkapi argumen pertama teologi kosmopolitan. Selain berpijak pada argumen historis, Gus Dur juga berpijak pada *ushul fiqh* sebagai logika hukum dan *maqasid syariah* sebagai acuan aksiologisnya. Dengan kedua argumen tersebut, Gus dur menggarisbawahi bahwa praktik dan ajaran Islam kompatibel dengan kosmopolitanisme sebagai watak beragama yang moderat, toleran, terbuka dan menghargai keragaman.

Menggenapi Ijtihad Gusdur

Sejauh ini teologi kosmopolitan tampaknya masih dapat dipertahankan. Akan tetapi dalam praktik, teologi kosmopolitan mendapat tantangan dari sebagian kelompok muslim yang sempit dan eksklusif. Di sisi lain, teologi kosmopolitan juga hanya termanifestasi dalam ranah teoretis, bukan praktis. Oleh karena itu, agar berhasil memecahkan masalah ini, teologi kosmopolitan harus menjawab tiga pertanyaan berikut: (1) Apakah teologi kosmopolitan mungkin? (2) Bagaimana kita dapat melahirkan budaya kosmoplitan publik? (3) Bagaimana implikasi teologi kosmopolitan?

Untuk pertanyaan (1), sejauh bacaan penulis, Gus Dur tidak memaparkannya lebih lanjut. Kita dapat menjawab pertanyaan (1) dengan meminjam kritik Derrida atas kosmopolitanisme Kantian dalam *Toward Perpetual Peace*. Bagi Derrida, keramahan murni (*absolute hospitality*) adalah tak mungkin. Dengan demikian kosmopolitanisme murni juga tak mungkin.

Derrida (2000; 4) memulai gagasannya dengan membongkar oposisi biner di dalam teks kosmopolitan Kant. Dalam analisis Derrida, kosmopolitan mengandaikan di dalamnya oposisi biner: *keramahan/permusuhan, penerima/pengunjung, teman/musuh*. Dalam artian, kosmopolitan mensyaratkan keberadaan tuan rumah yang memberikan rumahnya untuk disinggahi orang asing. Tuan rumah tetap menjadi penguasa dan pengendali teritori yang memiliki hukum, bahasa, tradisi, aturan dan norma yang memaksa tamunya untuk tunduk. Tanpanya, tuan tak memiliki kendali atas teritorinya. Oleh karena itu, penundukan adalah keharusan.

Dalam tilikan Derrida, keramahan yang selalu menuntut adanya oposisi biner ini merupakan paradoks. Oleh sebab tidak bisa dikategorikan keramahan murni atau permusuhan murni secara total, maka hak atas keramahan berada tepat di antara keramahan (*hospitality*) dan permusuhan (*hostility*). Derrida menyebutnya *hostipitality,* suatu

kondisi tak terputuskan (*undecidablity*) antara dua tegangan *hospitality* dan *hostility*.

Jika keramahan murni tak mungkin, apakah Derrida berhenti pada paradoks tersebut dan membiarkan keramahan menjadi gagasan paradoks yang tak mungkin diwujudkan? Pada titik ini, Derrida menegaskan pelampauan atas paradoks kosmopolitan. Pelampauan tersebut adalah sebuah usaha untuk membawanya ke titik terjauh. Derrida berupaya menjembatani antara keramahan-tak-terbatas (*unlimited-hospitality*) dengan keramahan-terbatas (*limited-hospitality*). Walaupun keramahan-terbatas (yang tak murni dan konkret) tak bisa mencapai keramahan-tak-terbatas (yang ideal, altruis, murni dan absolut). Namun, keramahan-terbatas bisa dibuat sedekat mungkin dengan keramahan-tak-terbatas.

Terhadap pertanyaan (2), Gus Dur menegaskan bahwa keseimbangan antara normatif dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat. Gus Dur (2007: 11) menyebutnya sebagai kosmopolitanisme kreatif oleh sebab di dalamnya universalisme ajaran Islam terus menerus mewujudkan diri dalam bentuk nyata.

Jika Gus Dur menegaskan kapabilitas nalar dan argumen logis, maka Nussbaum menegaskan kapabilitas imajinasi. Bagi Nussbaum, nalar belaka tidak cukup. Sebagaimana Heraklitos, Nussbaum menegaskan bahwa banyaknya pengetahuan tak lantas membuat orang mengerti. Oleh karena itu, imajinasi sebagai kemampuan ketiga diajukan guna menjadi bagian warga negara semesta (*cosmopolitanism*). Fakultas imajinatif, dalam tilikan Nussbaum, menempati hierarki tertinggi. Ia menyebutnya sebagai imajinasi naratif.

Metode ini dimaksudkan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain serta dapat melahirkan simpati atas penderitaan orang lain (Nussbaum, 2004: 45). Hanya dengan pendekatan ini, kita mampu melihat seseorang sebagai sesosok pribadi dan tujuan pada dirinya sendiri, bukan objek atau sarana. Imajinasi naratif memungkinkan

perlakuan adil dalam identitas gender, negara, suku, agama atau orientasi seksual.

Atas pertanyaan (3), Gus Dur menegaskan implikasi teologi kosmopolitan pada tiga spektrum; budaya, ekonomi dan politik. Teologi kosmopolitan berimplikasi melahirkan budaya toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan. Teologi kosmopolitan juga membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan yang mencekam kehidupan mayoritas kaum Muslim dewasa ini. Pada akhirnya, teologi kosmopolitan membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial-ekonomis dan kebiadaban rezim-rezim politik yang zalim. (Wahid, 2007: 11).

Selain ketiga spektrum tersebut, implikasi teologi kosmopolitan dapat diperluas meliputi spektrum pendidikan, keamanan dan ekologis. Pada dimensi pendidikan, kurikulum kosmopolitan berupaya agar peserta didik menyadari sebagai makhluk semesta, sebelum segala identitas sosial dilekatkan. Pada dimensi keamanan dan pertahanan, pendekatan kosmopolitan tidak menggunakan kawan-lawan, tetapi pendekatan dialog dan diskusi. Pada level ekologis, teologi kosmopolitan menyadari bahwa hewan dan tumbuhan adalah warga semesta. Oleh karena itu, teologi kosmopolitan mendorong upaya pelestarian lingkungan.

Melalui elaborasi di atas, gagasan kosmopolitan Gus Dur dapat dirumuskan dan direfleksikan secara radikal. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut menghendaki suatu perluasan sehingga diharapkan dapat mengisi suatu celah yang belum terisi oleh pemikiran Gus Dur dan menggenapi *ijtihad*-nya bagi teologi kosmopolitan. Pada akhirnya, teologi kosmopolitan Gus Dur beserta perluasan gagasannya merupakan suatu upaya untuk membuat masyarakat lebih adil, lebih inklusif, dan lebih berbudi. *Wallahu a'lam bi as-showab...*

SEMBILAN NILAI UTAMA GUS DUR SEBAGAI BANGUNAN KEILMUAN UIN ABDURRAHMAN WAHID

Dewi Anggaeni
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Mengupas terkait Gus Dur tak ubahnya seperti menyelami luasnya samudra yang tanpa batas. Selalu ada hal yang menarik dan unik serta hangat untuk didiskusikan. Semasa hidupnya, Gus Dur dikenal sebagai seorang agamawan, budayawan, negarawan sekaligus seorang sufi dan humoris. Perjalanan hidup Gus Dur dalam menaungi samudra intelektualitas serta perjumpaan dengan realitas yang beranekaragam membuka cara pandang tersendiri bagi Gus Dur yang kemudian diperjuangkan demi kemanusiaan. Mengutip apa yang diutarakan oleh Greg Barton bahwa Abdurrahman Wahid merupakan seorang intelektual yang mewakili perpaduan dua tradisi yakni, kesarjanaan Islam tradisional dan pendidikan Barat modern.

Pemikiran-pemikiran Gus Dur tidak hanya dinikmati oleh kalangan pesantren sebagaimana Gus Dur terlahir dari 'rahim' pesantren, melainkan dinikmati lintas kalangan baik agamawan, ilmuwan, cedekiawan, hingga negarawan. Tak heran jika banyak ikon yang disematkan kepada Gus Dur seperti Bapak Pluralisme, Bapak Tionghoa Indonesia, Bapak Perdamaian, Pejuang Kemanusiaan dan lain sebagainya. Semuanya menggambarkan bagaimana Gus Dur memanusiakan manusia.

Apa yang telah diperjuangkan Gus Dur tidak lantas usang setelah kepergainnya. Berbagai gagasan besar Gus Dur seperti; Pribumisasi Islam, Keislaman, Kebangsaan dan Keindonesiaan, serta Kemanusiaan dilanjutkan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Simposisum "Kiristalisasi Prinsip Pemikiran Gus Dur" yang digagas oleh Alisa Wahid pada tahun 2011, menghasilkan nilai-nilai utama yang melandasi perjuangan Gus Dur yang dipedomani khususnya bagi GUSDURian dalam melanjutkan perjuangan dan cita-cita Gus Dur.

Dalam konteks transformasi IAIN Pekalongan menjadi UIN Abdurrahman Wahid, tentunya penyemataan nama Gus Dur menjadi 'PR' tersendiri, dimana idealnya mencerminkan spirit perjuangan Gus Dur. Oleh karenanya, 9 nilai utama Gus Dur harus menjadi pondasi dan karakter dari UIN Abdurrahman Wahid dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada tulisan ini, penulis berusaha menguraikan beberapa pemikiran Gus Dur yang dapat menjadi landasan bagaimana transformasi IAIN Pekalongan menuju UIN Abdurrahman Wahid tidak hanya sebuah nama, melainkan di dalamnya mengambarkan spirit dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Sehingga pemberian nama UIN Abdurrahman Wahid dapat menunjukan *musama.*

Rasional dan Spiritual sebagai Ciri Khas Gus Dur

Dalam membahas bangunan keilmuan tidak terlepas dari aspek ontologis, dalam tataran ini setidaknya diperlukan jawaban mengenai "Apa itu UIN Abdurrahman Wahid?" yang menjadi pembeda dan ciri khas dari perguruan tinggi Islam lainnya atau perguruan tinggi secara umumnya. Mengutip apa yang diutarakan Casanova bahwa spirit moral etik di mana agama hadir dalam berbagai macam kehidupan, di mana agama bukan berada di ruang privat. Dengan kata lain, bahwa transformasi UIN yang menghadirkan berbagai macam disiplin ilmu termasuk kajian-kajian sains tidak kemudian melunturkan bangunan keilmuan agama yang diidentikan dengan IAIN.

Sejalan dengan hal tersebut apa yang dikemukakan oleh Nasir Hamid Abu Zaid, bahwa sejatinya yang sakral adalah '*ad din*' yang kemudian diistilahkan agama sementara '*al afikru ad dini*' atau pemikiran keagamaan, bersifat kontekstual melihat berbagai macam kondisi yang ada di sekelilingnya, dengan kata lain bahwa kehadiran disiplin keilmuan berupa sains dapat menjadi warna dalam pemikiran keagamaan yang bersumber kepada nilai-nilai universal dalam agama.

Dalam konteks ini, pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh IAIN Pekalongan dalam proses tarnsformasinya, jika mengacu kepada konsep pembentukan pemikiran Gus Dur sebagaimana yang diutarkan Greg Barton, mencakup dua unsur yakni Islam tradisional dan pemikiran barat. Gus Dur sangat kental dengan pemikiran khazanah klasik Islam berupa kitab kuning melalui pendidikan pesantren. Tradisi pesantren tidak hanya membentuk sanad keilmuan semata melainkan pula membangun kemandirian dan membekali pembentukan moral atau akhlak. Aspek ini selayaknya menjiwai para civitas academica di lingkungan UIN Abdurrahman Wahid memiliki sanad keilmuan yang *qualified* yang bersumber pada kajian-kajian Islam klasik. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan tidak sebatas *transfer knowledge,* tetapi juga membentuk kemandirian dan kepibadian baik *hard skill* maupun *soft skill* mahasiswa.

Perjumpaan Gus Dur dengan berbagai golongan dimulai semenjak berada di pesantren sehingga dapat membentuk watak yang toleran dalam mengharagai berbagai kebudayaan lokal yang datang dari 'luar dirinya'. Pendidikan pesantren inilah yang menjadi watak kosmopolitanisme pesantren. Agus Sunyoto mengistilahkan ciri khas pesantren sebagai lembaga Pendidikan *indegenious* Nusantara. Nuansa ini, tentunya ditemukan di perguruan tinggi, di mana mahasiswa berasal dari berbagai macam daerah yang membawa corak dan tradisi yang bermacam-macam, sehingga membuka ruang dialog kebudayaan yang dapat membentuk kultur dan suasana kampus yang inklusif.

Gus Dur dengan pendidikan pesantrennya menjadi seorang yang spiritualis. Proses Pendidikan intelektual Gus Dur tidak hanya berhenti di pesantren melainkan melintas benua dari timur hingga barat, beragam perpustakaan di berbagai macam negara Gus Dur singgahi untuk mengobati dahaga intelektualitasnya, hingga bersentuhan dengan berbagai macam pemikiran filsafat klasik hingga barat kontemporer. Aspek rasionalitas ini lah yang kemudian dapat digunakan dalam menjawab pemikiran keagamaan tidak hanya sebatas argumentasi *naqiliyah*, tetapi juga *aqiliyah*. Menelisik dari perjalanan hidup Gus Dur idelanya perguruan tinggi kagamaan mampu mengasah lebih dalam aspek rasionalitas ini, tidak hanya bertumpu kepada hal-hal yang '*ad diny*' sehingga tidak terjerumus kepada *labelling* hukum hitam atau putih.

Pemikiran-pemikiaran Gus Dur memberikan ruang spiritual terhadap dimensi *Ilahiyah* dan *Diniyah*, di sisi lain Gus Dur menghadirkan pemikiran keagamaan termasuk di dalamnya sains dengan pendekatan rasional yang bertumpu kepada kepentingan *Insyaniyah,* atau Kemanusiaan. Dengan demikian, antara keduanya baik agama maupun sains, baik modernitas maupun tradisionalitas tidak kemudian dikonfortasikan melainkan sebagai hubungan yang komplementer sehingga terbagun harmoni. Sebagaimana yang diutarakan oleh Zastrouw bahwa Gus Dur seorang sipiritualis rasionalis.

Harmonisasi Sembilan Nilai Utama Gus Dur dalam Tri Dharma

Gus Dur meninggalkan warisan berupa berbagai macam pemikiran yang diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata. Setiap gagasan-gagsan Gus Dur tidak terlepas dari tataran epistimologis yang mengacu kepada *nash* keagamaan (*Naqli*), penggunaan rasionalitas (*Aqli*), serta kontekstualitas (*Wa'qiiy*). Ketiga aspek inilah yang mewarnai bagaimana Islam bisa tumbuh dan berkembang di Nusantara. Menghidupkan Gus Dur sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Yahya, maka dalam konteks perguruuan tinggi yang mengusung nama Gus Dur sangat diperlukan untuk mengintegrasikan 9 nilai utama Gus Dur dalam tri

daharma perguruan tinggi. Penulis mengistilahkan dengan harmoni sehingga menjadi kesatupaduan dalam aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang tidak hanya terintegarsi, tetapi menjadi utuh sehingga lebih indah.

Sembilan nilai utama Gus Dur meliputi; Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, Kesederhanaan, Kekesatriaan, dan Kearifan lokal. Jika kesembilan nilai ini diintegrasikan dalam tri dhrama perguruan tinggi setidaknya dapat menjadi distingsi IAIN Pekalongan sebagai kampus negeri agama yang menjadi Universitas dengan mengusung pemikiran-pemikiran Gus Dur.

Nilai *tauhid* misalnya menjadi landasan spirit dalam tri dharma dengan mengendepankan bahwa ada kekuatan Sang Maha sumber dari segala sumber. Nilai *tauhid* ini menjadi spirit seluruh civitas academica di UIN Abdurrahman Wahid untuk senantiasa menebarkan cinta kasih dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sehingga dapat memandang manusia dengan unsur kemanusiaannya sebagai *tsamroh* dari keyakinan kepada Tuhan yang terwujud dalam hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan kata lain, bahwa spirit *tauhid* ini membentuk kesalihan individu sebagai mahluk yang bertuhan dan kesalehan kolektif sebagai mahluk sosial.

Kemanusiaan, aspek ini menjadi landasan utama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam praktiknya dapat saling menghargai dan menghormati sesama manusia tanpa melihat ras dan golongan bahkan agama. Inilah jargon yang melekat dengan Gus Dur 'memanusiakan manusia'. *Insaniyah* selayaknya menjadi *core* IAIN Pekalongan yang diintegrasikan dalam kurikulum serta berbagai riset sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Keadilan, Gus Dur dikenal sepanjang hidupnya sebagai pejuang keadilan khususnya membela hak-hak masyarakat tertindas. Selayaknya univeritas hadir di tengah-tengah masyarakat melalui pengabdian yang

memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi masyarakat. Begitu juga dengan riset diarahakan kepada kajian-kajian problemtik di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan universitas tidak sebagai Menara gading. Hadirnya pengabdian masyarakat bukan hanya sebatas pemenuhan 'kum' sebagai akademisi. Namun, nyata peka dalam membela hak-hak masyarakat.

Kesetaraan, memandang manusia sebagai sesama mahluk Tuhan, maka dalam proses pendidikan dan pengajaran hubungan antara pendidik dan peserta didik adalah egaliter yang saling menghargai dan menghormati. Dalam aspek ini, dosen bukan satu-satunya kebenaran tunggal. Perlu memberikan ruang kepada mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang mengeksplorasi minat dan bakatnya. Begitu pula dalam interkasi tidak ada lagi 'gap' antara senior dan junior, sehingga kesetaraan ini dapat membangun hubungan yang harmonis antara seluruh civitas academica.

Pembebasan, mengutip istilah Paulo Freire bahwa pendidikan cenderung melupakan nilai pembebasan. Pendidikan sebagai *center* dalam proses pembelajaran, tak jarang proses pendidikan di kampus yang berbasis agama secara umum masih mengedepankan *teacher center* dengan metode ceramah. Dengan demikian, kurang terbuka ruang dialog yang dapat meningkatkan daya kritis peserta didik dan kemampuan mentransformasikan pengetahuan dalam menyelesaikan problem kehidupan sehari-hari. Diperlukan kemerdekaan dalam belajar, dengan membuka ruang kepada peserta didik. Aspek pembebasan ini sejalan dengan konsep Merdeka Belajar, sehingga proses belajar mahasiswa tidak hanya di peroleh dari bangku perkuliahan tetapi sebagai usaha sadar yang diperoleh di sekelilingnya melalui berbagai macam kegiatan yang mendukung pendidikan itu sendiri.

Kesederhanaan, nilai ini merupakan salah satu yang mulai usang khususnya di era "hedon" seperti saat ini, dimana nilai seseorang dilihat dari apa yang dimilikinya. Kesederhanaan Gus Dur ditampilkan dalam laku hidupnya yang sederhana dan menjadi teladan. Kesederhaan Gus

Dur ini diistilahkan oleh Husain Muhammad sebagai sang Zahid. Sudah selayaknya kesederhaan ini menjadi laku seluruh civitas academica di UIN Abdurrahman Wahid, sehingga dapat terhidar dari mental korupsi yang kian menjamur di seluruh lini.

Persaudaraan, nilai ini lahir dari penghargaan kepada kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. "Kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan" demikianlah apa yang dikatakan Gus Dur. Hubungan baik antar golongan dan antar agama di bangun atas toleransi. Dengan demikian, sudah selayaknya, spirit ini menjadi landasan dalam membangun keilmuan yang diintegrasikan dalam tri dharma

Kesatriaan, Peristiwa ikonik Gus Dur yang meninggalkan istana dengan menggunakan kolor dan kaos putih cukup menggambarkan bagaimana jiwa kesatriaan Gus Dur melepasakan jabatan politik demi kemanusiaan. Seluruh civitas academica di UIN Abdurrahman Wahid selayaknya memiliki jiwa ini dalam menjalankan budaya kerja di bawah naungan kementerian agama; Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladaan yang dijalankan sebagai jati diri dan dengan jiwa kesatria.

Kearifan Lokal, gagasan Gus Dur mengenai pribumisasi Islam bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang mengakar pada tradisi di Nusantara, yang semua tidak bebas nilai, termasuk nilai agama. Ke-Indonesia-an dengan mengedepankan empat pilar serta kearifan lokal sebagai ciri khas Nusantara perlu di integrasikan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sejalan dengan hal ini menjaga dan memelihara kearifan lokal sebagai pilar dalam moderasi beragama. UIN Abdurrahman Wahid dapat menghadirkan pusat-pusat kajian budaya dan Nusantara sebagai bentuk dari kajian pemikiran Gus Dur terkait ke-Indonesia-an dan menghidupkan khazanah Nusantara, sebagai salah satu upaya implementasi moderasi beragama di lingkungan universitas.

Kampus Pembedayaan " Servis University"

Jika UIN Walisongo Semarang mendeklarasikan dirinya sebagai Kampus Riset Asia, maka UIN Abdurrahma Wahid dapat melanjutkan cita-cita Gus Dur dalam pemberdayaan. Aspek ketiga dari tri dhrama ini yang sering dipandang sebelah mata, di mana salah satu indikatornya adalah rendahnya nilai *'kum'* dibanding dengan aspek pendidikan dan penelitiann. Padahal, setidaknya aspek ini lah yang paling dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Peran penting ini perlu diwujudkan oleh UIN Abdurrahman Wahid sehingga keberadaan Universitas sebagaimana yang telah dikemukakan di atas nyata hadirnya di tengah-tengah masyarakat.

Spirit Gus Dur dalam pemberdayaan sebagaimana yang diutarakan oleh Fadhlan bahwa gagasan pemberdayaan Gus Dur setidaknya terdiri atas tiga elemen penting: Pertama, membangun kesadaran masyarakat melalui gerakan intelektual. Kedua, meningkatkan modalitas sosial masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, menciptakan usaha ekonomi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kecil. Para intelektual dalam hal ini civitas academica UIN Abdurrahman Wahid perlu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan melalui pendekatan integratif. Di sisi lain, bagaimana proses pembelajaran di perguruan tinggi dapat mengasah dan mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa melalui berbagai program dan kegiatan pemberdayaan desa sebagai upaya dalam mengembangakan SDM sehingga lulusan dari UIN Abdurrahman Wahid tidak kemudian abai terhadap kondisi di masyarakat. Aspek ketiga, bagaimana UIN Abdurrahman Wahid yang pada masanya nanti akan beralih status menjadi BLU perlu menciptakan peluang usaha, maka jiwa e*ntrepreneurship* sangat diperlukan. Kehadiran UIN ini dapat menjadi inkubator dalam mengembangkan usaha-usaha mikro sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Kesembilan nilai Gus Dur menjadi spirit dalam membangun keilmuan di UIN Abdurrahman Wahid sehingga dimensi aksiologisnya tidak hanya dalam aspek tri dharma dalam bidang pendidikan semata, tetapi juga penelitian dan pengabdian bahkan meliputi berbagai bidang baik agama, ekonomi, sosial-politik, seni budaya dan lain sebagainya. Penulis berharap, tulisan ini setidaknya bisa memberi kontribusi terhadap "Road to UIN Abdurrahman Wahid". Sekali lagi, selamat untuk IAIN Pekalongan, semoga UIN Abdurrahman Wahid hadir dengan membawa spirit yang telah diperjuangkan Gus Dur.

TRANSMISI NILAI HUMANIS GUS DUR SEBAGAI SPIRIT PARADIGMA INTEGRASI TRIADIK UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Shinta Nurani
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan memiliki banyak julukan kota, ada yang menyebut kota santri, kota kreatif dunia, kota batik, dan lainnya. Semua nama yang disematkan kepada Pekalongan tentunya memberikan spirit penciri institusi pendidikan tinggi. IAIN Pekalongan yang sedang bertransformasi menjadi UIN KH. Abdurrahman Wahid ini merupakan satu-satunya institusi pendidikan tinggi negeri untuk mahasiswa (baca: kampus). Jika ditelisik genealoginya, apa kaitannya IAIN Pekalongan yang alih status menjadi UIN KH. Abdurrahman Wahid? dan bagaimana transmisi nilai Gus Dur dapat menjadi paradigma keilmuan UIN KH. Abdurrahman Wahid?

Siapa yang tidak kenal dengan figur seorang KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil 'Gus Dur'. Pasalnya, beliau adalah seorang cendikiawan Muslim yang sangat berpengaruh baik di ranah nasional maupun internasional. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme, karena beliau banyak memperjuangkan hak-hak minoritas sebagai resolusi konflik menjaga persatuan dan kesatuan manusia. Gus Dur (2006) menyatakan dalam bukunya *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, bahwa "tidak ada satu Islam, Islam adalah multiwajah, wajah manusiawi". Ketika Gus Dur mati-matian membela orang Cina,

Ahmadiyah, Nasrani dan orang-orang termarginalkan lainnya, yang diperjuangkan Gus Dur bukan Cinanya, Ahmadiyahnya, bukan Nasraninya, melainkan sisi kemanusiaannya. Nilai humanis ini menjadi spirit yang sangat penting untuk terus ditransmisikan dan diperjuangkan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun terutama oleh masyarakat Pekalongan dan sekitarnya.

Berbicara tentang spirit humanis, ini menjadi ruh yang mengintegrasikan antara nilai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Pertama, nilai keislaman, sebagaimana al-Qur'an sebagai kitab suci yang sangat memanusiakan manusia dengan banyaknya nilai kesetaraan dan keadilan gender yang secara eksplisit disebut al-Qur'an (baca QS. Ali Imran: 195, QS. At Taubah: 71, QS. Al-Ahzab: 35, QS. An-Nisa: 124, QS. An-Nahl: 97, QS. Al-Hadid: 12, QS. Al-Mu'min: 40). Kedua, spirit keindonesiaan, Allah menganugerahkan negara Indonesia dengan beragam karakter unik yang berbeda-beda, seperti perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, tradisi dan lainnya tetapi Indonesia tetap menjunjung tinggi *Bhinneka Tunggal Ika.* Ketiga, prinsip kemanusiaan, yang tidak pernah melakukan subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan, beban ganda dan lainnya terhadap manusia. Sesama manusia membentuk relasi yang berkesalingan (baca: saling menghargai, saling menghormati, saling menerima, saling menjaga, saling melindungi) sebagai kunci kebahagiaan karena memperlakukan manusia sebagai mitra atau partner yang saling membutuhkan satu sama lain.

Paradigma integrasi triadik yang disampaikan oleh Gus Dur melalui simbol nilai humanis ini perlu diejawantahkan dalam paradigma keilmuan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Identitas Pekalongan sebagai kota santri terimplementasikan dalam karakter khas santri yang dicontohkan oleh Gus Dur untuk selalu tawadlu', takdzim atau menghormati pada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, berkhidmat dengan keseimbangan ilmu dunia serta akhirat. Pekalongan sebagai kota batik, memiliki ciri khas yang ulet, telaten, tekun, guyub rukun, sebagaimana dilukiskan dalam mahakarya batik

dengan corak yang *njlimet,* membutuhkan waktu pengerjaan yang relative lama dan butuh keuletan. Begitu juga sebagai kota kreatif dunia, menempa diri untuk terus kreatif, inovatif, berpikir dan bekerja cerdas dengan tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri melainkan juga kemaslahatan banyak orang. Jangan sampai *kaline buthek weteng wareg* (sungainya kotor perutnya kenyang), filosofi ini menjadi alarm untuk tetap memperhatikan kebersihan dan kenyamanan masyarakat tidak hanya mementingkan keuntungan finansial pribadinya (baca: ekofeminisme Islam).

Adapun dalam transmisi nilai humanis Gus Dur dapat dilakukan dengan reaktualisasi UIN K.H. Abdurrahman Wahid melalui paradigma integrasi triadik yang memadukan antara keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Dari segi visi keilmuan, tentunya tidak hanya pada keilmuan yang terpadu tetapi pada keilmuan yang terintegrasi multidisipliner. Spirit keindonesiaan dengan memperhatikan kearifan lokal, kajian Nusantara, vernakularisasi dalam tradisi Islam dan tradisi Nusantara atau Pribumisasi Islam (Gus Dur, 2001). Sedangkan nilai kemanusiaan terimplementasikan pada kebijakan, fasilitas, akses, hingga pada ranah aksiologinya, yang tidak hanya dapat dirasakan oleh kelompok mayoritas tetapi juga minoritas seperti penyandang disabilitas dapat menggunakan fasilitas dan sarpras di lingkungan kampus (seperti adanya tangga bidang miring untuk akses kursi roda), adanya ruang laktasi di setiap gedung, ruang kelas yang tidak bising oleh suara kipas angin, dan kampus yang ramah lingkungan. Selain itu, kampus progresif dengan memperhatikan prinsip humanis dapat menerapkan sistem *work from anywhere* dengan tidak hanya memperhatikan kuantitatif jam kerja saja tetapi juga pada kualitas yang produktif terkait kompleksitas tanggungjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi baik pendidikan, penelitian dan pengabdian atau pemberdayaan kepada masyarakat sehingga memberikan kebermanfaatan bagi seluruh makhluk di jagad raya dalam membumikan kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid yang *rahmatan lil 'alamin*.

غزة
Kamal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

Memasuki usia yang ke 54, IAIN Pekalongan berjuang melakukan transformasi kelembagaan menuju UIN Pekalongan. Perjuangan ini meniscayakan semua elemen dan sumber daya yang kita miliki harus bergerak secara kontributif, kolaboratif dan sinergis untuk menyukseskan alih status tersebut.

Transformasi kelembagaan memang tidak mudah, namun harus terus diupayakan. Secara administrasi, PMA Nomor 20 Tahun 2020 sudah bisa terpenuhi. Namun demikian, ada cacatan-catatan krusial terkait pengembangan sumber daya manusia dan tentunya masalah visi keilmuan yang ingin dikembangkan oleh kampus. Alih status, bukan sekedar perubahan nama Institut menjadi Universitas, tidak sekedar memiliki mandat yang lebih luas, bergerak dari *tafaqquh fiddin,* menuju *Islamic studies, religion studies* atau *natural sciences studies.* Di balik itu, ada kebutuhan fundamental yang perlu dilakukan, yaitu membangun kembali paradigma, visi dan arah keilmuan UIN Abdurrahman Wahid.

Bangunan keilmuan UIN Pekalongan menjadi landasan dan energi bagi pihak-pihak kampus dan mitra untuk berproses bersama, saling bahu membahu dalam melahirkan lulusan yang berdaya saing. Menuju UIN Abdurrahman Wahid tidak cukup modal sumber daya manusia, finansial dan infrastruktur saja, UIN Pekalongan membutuhkan rancang bangun keilmuan.

Alhamdulillah, telah terbit buku berjudul "UIN Abdurrahman Wahid: Gus Dur, Inspirasi, & Imajinasi". Buku ini menyemarakkan transformasi kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan menjadi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Scientist Publishing
UIN Gus Dur

ISBN 978-623-88227-0-6
9 786238 822706

View publication stats